

111pk 50

KERUSUHAN DI PEKALONGAN JAWA TENGAH 1995 - 1999

Direktorat
Budayaan
26

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

HADIAH BK SNT YOGYA IBH
24.11.04

MILIK TRADISI

KERUSUHAN DI PEKALONGAN, JAWA TENGAH

38

~~303.6820~~

6

NUR
K

303.6826

NUR
K

Tim Peneliti
Drs. Nurdiyanto
Drs. Darto Harnoko
Dra. Sri Retno Astuti
Drs. Hisbaron Muryantoro
Dra. Dwi Ratna Nurhajarini, M.Hum.

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL YOGYAKARTA
PROYEK PEMANFAATAN KEBUDAYAAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah DIY dapat menerbitkan buku hasil penelitian berjudul : *Kerusuhan di Pekalongan, Jawa Tengah*. Buku tersebut ditulis oleh Drs. Nurdianto, dkk., Staf Peneliti Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Yogyakarta.

Dalam buku hasil penelitian ini penulis mengulas permasalahan konflik yang terjadi di Pekalongan Jawa Tengah, seiring dengan terjadinya perubahan di segala bidang kehidupan masyarakat, baik bidang politik, sosial budaya dan lain-lain, sesuai dengan tuntutan reformasi. Di Indonesia yang dikenal memiliki berbagai macam ras dan agama, rentan akan terjadinya konflik seperti yang terjadi di Pekalongan Jawa Tengah. Unsur utama pemicunya adalah karena diantara kelompok masyarakat tidak ada saling pengertian dan saling menghargai perbedaan yang ada.

Dengan membaca buku ini diharapkan kita akan mendapatkan gambaran sekilas tentang permasalahan yang memicu konflik, apa yang menjadi penyebab, dan apa solusi terbaik untuk mengatasi terjadinya kerusuhan tersebut, sehingga di masa mendatang tidak terulang kembali.

Untuk itu, kepada semua pihak yang telah bekerja keras demi terbitnya buku hasil penelitian ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.



Pemimpin Proyek

Dra, Emiliana Sadilah
NIP. 130 874 609

SAMBUTAN

KEPALA BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarokaatuh

Diiringi rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa saya menyambut baik diterbitkannya buku hasil penelitian dengan judul : *Kerusuhan di Pekalongan, Jawa Tengah*, karya Drs. Nurdianto, dkk., Staf Peneliti Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan Sumber Daya Manusia (SDM) di negara kita, maka perubahan demi perubahan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara juga ikut mewarnai perjalanan sejarah di Indonesia. Salah satu bentuk perubahan dalam tata pemerintahan di Indonesia adalah berakhirnya pemerintahan rezim Orde Baru untuk di gantikan dengan Orde Reformasi yang dipelopori oleh hampir semua elemen masyarakat. Dalam menghadapi perubahan tersebut tentunya menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat tertentu, sehingga memungkinkan terjadinya konflik internal di masyarakat, seperti halnya yang terjadi di Pekalongan Jawa Tengah.

Buku terbitan hasil penelitian ini merupakan langkah awal untuk mengkaji dan menganalisa terjadinya konflik dan rekomendasi pemecahannya, khususnya kerusuhan di Pekaiongan. Di terbitkannya buku ini juga sebagai bentuk partisipasi dan tanggung jawab pemerintah melalui Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta dan diharapkan buku ini akan menjadi pelajaran bagi perjalanan sejarah yang sangat berharga.

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah DIY beserta tim peneliti, kami ucapkan terimakasih atas prakarsa dan jerih payahnya, sehingga hasil penelitian ini dapat terbit, dan selanjutnya disebarluaskan kepada masyarakat pembaca. Semoga bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarokaatuh

Kepala



Dra. Taryati
NIP. 130 676 861

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang Masalah	1
B Permasalahan	4
C Tujuan Penelitian	5
D Kerangka Teori	5
E Tinjauan Pustaka	6
F Ruang Lingkup	8
G Metode	8
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	9
BAB III KARESIDENAN PEKALONGAN PADA AWAL KEMERDEKAAN	25
A Kondisi Karesidenan Pekalongan Pada Awal Kemerdekaan	25
B Reaksi Elite Birokrat	31
C Kerusuhan di Karesidenan Pekalongan Pada Awal Kemerdekaan	38
BAB IV KERUSUHAN DI PEKALONGAN TAHUN 1995 - 1999	49
A Kerusuhan Tahun 1995	49
B Kerusuhan Tahun 1997	56
C Kerusuhan Tahun 1998	68
D Kerusuhan Tahun 1999	71
BAB V PENUTUP	77
DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR INFORMAN	85
LAMPIRAN	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjelang berakhirnya pemerintahan Orde Baru sampai awal reformasi, kesadaran kolektif sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat sebagaimana ditanamkan secara gemilang oleh para *founding fathers*, seakan sirna. Di beberapa wilayah, konflik antarsuku, ras, agama, kelompok, dan antar golongan terus berkobar silih-berganti dan tidak sedikit disertai oleh jatuhnya korban jiwa. Bersamaan dengan itu, tuntutan Aceh merdeka, kemudian menyusul pula Irian Jaya yang ingin memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terus menguat. Tragedi manusia dan kemanusiaan seakan terus menghantui bangsa Indonesia.

Surutnya peran negara, setelah lebih dari tiga puluh tahun menjadi kekuatan hegemonik di bawah pemerintahan Orde Baru yang kemudian melahirkan apa yang disepakati sebagai Era Reformasi terbukti hilang tidak kunjung menciptakan suasana tertib, melainkan situasi sosial politiknya justru lebih sering tampil penuh kekacauan dan anomalistik. Ruang kebebasan yang begitu terbuka lebar tidak menjadi momentum untuk membangun tatanan sosial-politik yang demokratis, tetapi lebih menjadi ajang ekspresi diri atau kelompok yang mengedepankan unsur perbedaan primordialistik. Konflik multidimensi baik yang manifes maupun laten terjadi di mana-mana dan dari waktu ke waktu menunjukkan tanda-tanda semakin eskalatif.

Ketika pemerintahan Reformasi di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie pada tahun 1999 menggulirkan otonomi daerah, ancaman konflik primordialistik justru merebak ke mana-mana pada masa-masa sesudahnya. Kerusuhan di Sambas, Maluku, Irian Jaya, Aceh, Sampit serta Palangkaraya dan Pekalongan mengindikasikan adanya krisis kebangsaan. Kerukunan antar-etnik sebagai modal sosial dan menjadi simpul integratif bagi sebuah bangsa, semakin problematis.

Agaknya otonomi daerah masih dipahami sebagai kebebasan daerah untuk mengatur dirinya sendiri, tanpa kesadaran akan eksistensi bersama

dalam “bingkai” negara kesatuan. Oleh sebab itu ketika bingkai tersebut dilupakan yang muncul adalah sikap kecurigaan, kebencian, dan ketidaksukaan terhadap segala sesuatu yang berbau pusat (*centra-phobia*) dan terhadap sesuatu yang berbau “yang lain” atau asing (*xenophobia*). Akibatnya, terjadi segmentasi sosial yang *massif* berdasarkan isu-isu primordialisme yang kemudian memperlihatkan potret kehidupan sosial yang terkotak-kotak.

Dalam hidup bernegara, pola-pola relasi antardaerah, antargolongan dan antarkelompok tidak saling melakukan upaya menuju masyarakat integratif, melainkan justru saling curiga mencurigai dalam pola kompetisi sosial yang destruktif. Karakter jalinan interaksi di antara elemen masyarakat tersebut tidak bersifat dialogis yang dilandasi sikap apresiatif satu sama lain, tetapi justru bersifat pejoratif dalam arti masing-masing elemen masyarakat tersebut saling merendahkan. Situasi ini menciptakan kemacetan konvergensi sosial-politik dan masyarakat sangat sensitif terhadap rumor, desas-desus, serta pergunjungan sosial yang semuanya dibungkus dalam paket primordialisme.

Bersamaan dengan itu informasi yang disebarkan oleh berbagai media massa sebagian besar cenderung mengeksploitasi aspek dramatik konflik demi penciptaan sensasi. Implikasinya yang berkembang subur justru potensi konfliknya, sedangkan potensi integrasinya tertekan surut, sehingga eskalasi konflik terus meluas. Jurnalisme perdamaian (*peace journalism*) belum tumbuh di negeri ini, tetapi yang lebih berkembang justru jurnalisme sensasional yang tidak sensitif terhadap upaya mencari solusi konflik-konflik sosial. Jarang terjadi, ekspose media massa berusaha menggali potensi integrasi dalam suatu masyarakat, demi menciptakan tertib sosial (*social order*) yang dinamis dan produktif.

Dalam suatu masyarakat senantiasa hadir potensi konflik dan sekaligus potensi untuk berintegrasi. Akan tetapi jika pola hubungan konfliktual masyarakat tersebut dibiarkan berlanjut, sementara itu informasi media massa terus mengeksploitasi aspek dramatik konflik demi penciptaan sensasi, maka yang akan berkembang subur justru potensi konfliknya, sedangkan potensi integrasinya akan tertekan surut dan situasi ini akan memunculkan konflik secara terus-menerus.

Berbagai penjelasan dilakukan untuk memahami konflik etnis yang kerap terjadi, tidak hanya konflik Dayak-Madura tetapi juga konflik antaretnis di berbagai wilayah di Indonesia menyebutkan bahwa sebagian besar kekerasan yang terjadi dalam masyarakat justru pada arah negara dan struktur sosial yang dilakukan oleh penguasa politik dan pelaku bisnis besar. Untuk wilayah Kalimantan, kekerasan dan tindakan sewenang-wenang atas masyarakat etnis Dayak dilakukan oleh pelaku bisnis besar dalam penguasaan hutan di sana. Masyarakat semakin mengalami frustrasi, ketika mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena tindakan penguasaan hutan tersebut telah mendapat persetujuan dari penguasa politik daerah maupun pusat.¹ Itu artinya, tindak kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat adalah ekspresi atau luapan rasa frustrasi terhadap ketidakberdayaan mereka berhadapan dengan kekuatan penguasa politik dan ekonomi.

Penjelasan tersebut diperkuat oleh Ignas Kleden yang melihat hubungan antaretnis barulah menimbulkan permusuhan dan kekerasan kalau perbedaan antaretnis yang satu dengan etnis yang lain disertai oleh dominasi suatu etnis terhadap yang lainnya. Itu artinya, perbedaan tersebut mengandung perbedaan dalam relasi kekuatan, baik politik maupun ekonomi. Dengan kata lain adanya deferensiasi etnis juga menjadi representasi stratifikasi sosial yang dalam dan tidak adil.²

Dari dua penjelasan terhadap konflik etnis di atas, dapat dilihat dalam perspektif teori konflik yang dibangun oleh Ted Robert Gurr. Menurut Gurr, ada beberapa asumsi mengapa konflik etnis terjadi. *Pertama*, dilihat dari eksplanasi yang didasarkan pada identitas kultural di mana masyarakat merasakan adanya ketidakadilan kolektif yang menimpa mereka dalam bidang ekonomi dan pembangunan, diskriminasi politik, kontrol negara yang represif atau hal-hal yang berkaitan dengan *basic needs*.³ Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, terutama yang berkaitan dengan identitas dan keamanan kelompoknya. *Kedua*, identitas kultural menyediakan landasan bagi gerakan konflik manakala terjadi berbagai kesenjangan dalam masyarakat. Penonjolan

¹ *Perilaku Kekerasan Kolektif*, (harian Kompas, 16-4-1999), hlm. 26

² Ignas Kleden, Sara; *Praktek dan Teori*, (harian Kompas, 29-8-1998), hlm. 45

³ Ted Robert Gurr, "Deprivasi Relatif dan Kekerasan," dalam Thomas Santosa, *Teori-teori Kekerasan*, (Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 64-65

identitas diri ini diakibatkan oleh adanya konflik dengan negara atau etnis dominan lainnya. Ketika ada hambatan antara kemauan dan kemampuan seseorang atau masyarakat, maka sejumlah energi kemudian dimobilisasikan.

Kedua asumsi tersebut berkaitan erat dengan dua teori deprivasi relatif dan mobilisasi kelompok. Yang pertama menekankan adanya motivasi rasa ketidakadilan bagi aktifitas politis dan yang kedua menekankan pada kalkulasi para pemimpin dalam menggalang berbagai *resources* sebagai respon terhadap adanya perubahan politik.

Salah satu daerah di Jawa Tengah yang cukup rawan konflik adalah Pekalongan. Kerusakan itu menjadi catatan tersendiri bagi kota Pekalongan yang notabene adalah kota kecil namun cukup berperan dalam kancah politik, ekonomi, maupun sosial, sehingga hal itu cukup menarik untuk dilakukan penelitian. Kerusakan yang masih hangat dalam pikiran kita adalah kerusakan sosial yang terjadi pada tahun 1995 dan 1999. Dilihat dari waktu berlangsungnya kerusakan dapat dikatakan sekejap, namun akibat yang ditimbulkan sampai sekarang belum selesai ditangani.

Oleh karena itu penelitian tentang kerusakan di Pekalongan cukup signifikan untuk dilakukan. Mengapa ? Sebab secara historis Pekalongan merupakan suatu daerah yang memiliki intensitas konflik yang cukup tinggi. Hal ini terjadi tidak hanya pada zaman reformasi saja, melainkan sejak awal revolusi sudah terjadi. Oleh karena kejadian-kejadian itu kemudian kota Pekalongan mempunyai predikat sebagai kota yang mempunyai temperamen yang tinggi (rawan konflik). Dilihat dari sisi historis, seperti yang telah dikemukakan diatas ternyata kerusakan itu muncul tidak dengan begitu saja, melainkan ada suatu benang merah yang dapat diambil. Meskipun tidak secara eksplisit, namun untuk memberikan gambaran tentang kasus-kasus kerusakan yang terjadi, diperlukan suatu eksplanasi yang jelas dengan teropong kasus-kasus yang terjadi pada awal kemerdekaan.

B. Permasalahan

Penelitian tentang kerusakan di Pekalongan ini menekankan pada faktor-faktor kondisional, apa yang menimbulkan ketegangan struktural

sehingga memicu munculnya kerusuhan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelaahan secara historis.

Permasalahan yang cukup penting dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mengenal dan mengidentifikasi potensi konflik yang terdapat di Pekalongan, Jawa Tengah ?
2. Kapan kerusuhan itu terjadi dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kerusuhan itu muncul ?
3. Bagaimana model atau karakteristik kerusuhan yang terjadi ?
4. Seberapa jauh dimensi keluasan atau cakupan kerusuhan yang terjadi di wilayah Pekalongan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

Menjawab berbagai permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu mengenai waktu berlangsungnya kerusuhan, menemukan faktor-faktor penyebab timbulnya kerusuhan, memberikan klasifikasi dan analisis tentang karakteristik kerusuhan yang terjadi, dan menganalisis dimensi keluasan atau cakupan kerusuhan.

D. Kerangka Teori

Dalam menyusun konseptualisasi pemetaan konflik studi ini berangkat dari kajian teoritik yang relevan sebagaimana lazim dipakai untuk menjelaskan fenomena konflik. Collins (1975)⁴ berpendapat bahwa pemaksaan, termasuk kekerasan, sebagai cara penting untuk mengendalikan konflik. Meskipun demikian, ia juga mengakui pentingnya simbol-simbol pemersatu untuk mengatasi konflik baik pada tataran individual, sosial, maupun struktural. Bahkan sumber konflik sosial terdapat pada hubungan-hubungan sosial, politik dan ekonomi. Gramsci (1971)⁵ memberikan tekanan pada hegemoni kultural kelas penguasa sebagai bentuk dominasi yang melandasi adanya konflik, sedangkan Dahrendorf (1959)⁶ lebih menekankan

⁴ R. Collin, *Conflict of Sociology*, (New York; The Free Press, 1975), hlm. 7-14

⁵ Antonio Gramsci, *Selection From Prison Notebooks*, (New York; International Publisher, 1971), hlm. 10-12

⁶ Rolf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, (Stanford; Stanford University Press, 1959), hlm. 20-23

bahwa yang melandasi konflik sosial terletak pada hubungan-hubungan kekuasaan, bukan hubungan kepemilikan.

Selanjutnya ia juga menjelaskan bahwa konflik ternyata disamping menjadi wahana kompetisi antarkelompok, juga berfungsi menjadi wahana perubahan sosial, sedangkan Gurr (1971) melalui pendekatan psikologis mencoba menjelaskan konflik dengan konsep deprivasi relatif. Konsep ini dibedakan menjadi 3 jenis : (1) dekremental, yaitu ketika harapan relatif tetap berhadapan dengan kapabilitas yang menurun; (2) aspirasional, yaitu ketika kapabilitas relatif tetap sementara harapan meningkat; (3) progresif; yaitu ketika harapan meningkat sementara kapabilitas menurun.⁷

Crawford (1998) dalam menjelaskan fenomena konflik di dunia ketiga senantiasa dikaitkan dengan globalisasi dan liberalisasi pasar. Tesis utamanya menyatakan bahwa negara-negara dunia ketiga sebenarnya mempunyai institusi lokal yang efektif untuk meredam konflik. Akan tetapi institusi-institusi lokal tersebut mengalami pelemahan fungsi integrasi, karena semakin intensifnya pengaruh globalisasi dan liberalisasi pasar yang merusak komitmen kontrak-kontrak sosial. Lebih kacau lagi, proses itu juga diikuti munculnya *political entrepreneurship* lokal atau para petualang politik yang memanfaatkan situasi demi kepentingan mereka sendiri.⁸

E. Tinjauan Pustaka

Karya-karya Hobsbawn, seperti : *Primitive Rebels*,⁹ maupun *Social Banditry*¹⁰ menjelaskan bahwa fenomena perbanditan merupakan bagian dari protes sosial terhadap pemerintahan dan perkebunan yang merugikan arus bawah. Sebagian besar dari protes sosial, perbanditan tidak dapat dilepaskan dengan : (1) perasaan tidak puas, (2) sukar melepaskan perbanditan yang sesungguhnya dengan gerakan sosial, dan (3) gambaran situasi yang masih primitif. Tokoh-tokoh bandit sering dianggap pahlawan atau “jagoan” karena menempatkan para petani sama dengan musuh para bandit.

⁷ Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel*, (Princeton; Princeton University Press, 1970), hlm. 15-19

⁸ Crawford and Ronnie D Lipschultz, *Culture and Politics in Indonesia*, (Berkeley; International and Area Studies, University of California & Berkeley, 1998), hlm. 30

⁹ Hobsbawn, *Primitive Rebels*, (Menchester; University of Menchester, 1959)

¹⁰ Hobsbawn, “Social Banditry,” dalam Henry A Lansberger, *Rural Protest Movement and Social Change*, (London; Mac. Millan, 1974) Lihat juga Hobsbawn, *Bandits*, (Penguin Book, 1972), hlm 1-9

Perbanditan sebagai bagian dari protes sosial sering terjadi di Jawa. Buku mengenai fenomena perbanditan di Jawa selama tahun 1850 - 1945 diungkapkan dengan sangat baik oleh Suhartono dalam bukunya yang berjudul "Bandit-bandit Pedesaan di Jawa". Tulisan ini mengemukakan bahwa munculnya fenomena bandit sebagai reaksi terhadap dominasi perkebunan atas kehidupan petani di pedesaan. Dalam menggambarkan bentuk-bentuk perbanditan yang muncul di pedesaan di Jawa, tulisan ini mengambil tiga sampel yang diyakini mampu mewakili kehidupan perbanditan di pedesaan Jawa. Tiga daerah yang menjadi tokoh ialah Banten - Batavia untuk daerah Jawa Barat, Yogyakarta - Surakarta untuk daerah Jawa Tengah dan Pasuruan - Probolinggo untuk daerah di Jawa Timur. Karya ini sangat membantu dalam melihat bentuk-bentuk kriminalitas yang muncul di Pekalongan.

Selain itu menurut Nordholt bahwa gelombang kekerasan yang terjadi di Indonesia merupakan indikasi adanya suatu *genealogy of violence*. "Kekerasan turunan" menurut Nordholt ditandai dengan kesinambungan rezim teror yang melegitimasi penggunaan kekerasan oleh Negara. Nordholt melacak kesinambungan rezim dimulai dari kasus keris Empu Gandring (masa kerajaan Singasari), kolonialisme Belanda, masa Jepang, hingga dominasi militer di masa Orde Baru.¹¹

Senada dengan Nordholt, William H Frederick melihat bahwa penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan masalah-masalah politik terlembaga dan secara sengaja dieksploitasi oleh pemimpin politik dan militer sepanjang periode revolusi kemerdekaan. Dalam buku itu lebih banyak dijelaskan bahwa penggunaan kekerasan di masa revolusi dibungkus dengan kemasam sejarah patriotisme, heroisme, dan seringkali gagal menyajikan dampak-dampak negatif yang muncul.¹² Buku ini dapat mendukung dalam penulisan terutama untuk mengupas situasi Pekalongan pada masa revolusi.

¹¹ H.S. Nordholt, "A Genealogy of Violence", dalam Freek Colombia and J. Thomas Lindbald (eds), *Root of Violence in Indonesia, Contemporary Violence in Historical Perspective* (Leiden; KITLV Press, 2002), hlm 33 - 60

¹² William H. Frederick, "Shadows of an Unseen hand; Some patterns of violence in the Indonesian Revolution", dalam Freek Colombia and J. Thomas Lindbald (eds), *ibid*, hlm 141-170

F. Ruang Lingkup

Penelitian tentang kerusuhan dengan ruang lingkup spasial Pekalongan ini menekankan pada ruang lingkup temporal 1995 - 1999 yang uraiannya lebih melihat pada segi-segi karakteristik tindak kerusuhan. Sedangkan ruang lingkup materi ingin melihat karakteristik dan ragam tindak kerusuhan pada tahun 1995 - 1999, dengan tidak mengesampingkan kerusuhan - kerusuhan yang terjadi sejak masa awal kemerdekaan, mengapa kerusuhan massa itu muncul, apakah hal itu disebabkan adanya kekecewaan, frustrasi, sinisme dan ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga publik yang meluas dalam masyarakat.

G. Metode

Penelitian tentang kerusuhan di Pekalongan ini lebih menekankan pada pendekatan historis. Oleh karena itu perlu diuraikan tindak kerusuhan pada masa sebelumnya yakni awal kemerdekaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang ditopang oleh observasi dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang secara *eyewitness* mengetahui peristiwa kerusuhan tersebut.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Menurut cerita rakyat yang sampai saat ini masih ada khususnya generasi tuanya, kota Pekalongan muncul dari ketaatan Bupati Pekalongan yang juga merupakan salah seorang panglima kerajaan Mataram ketika mendapat perintah dari Sultan Agung untuk menyerang Batavia tahun 1628. Mendapat perintah semacam itu maka Baurekso demikian nama bupati dan panglima itu mempersiapkan diri baik mental maupun fisik. Kemudian mulailah ia bertapa seperti kalong atau kelelawar (*tapa ngalong*) di hutan Gambiran (sekarang kampung Gambaran). Pada saat bertapa Ki Baurekso digoda dan diganggu prajurit siluman utusan Dewi Lanjar yang dianggap sebagai penguasa laut pantai utara. Namun utusan Dewi Lanjar itu tidak mampu menggagalkan tekad Ki Baurekso. Bahkan Dewi Lanjar akhirnya dapat dipersunting oleh Ki Baurekso dan dijadikan istrinya. Oleh karena keberhasilannya dalam bertapa ngalong inilah maka tempat itu kemudian dinamakan Pekalongan. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa sebutan Pekalongan berasal dari kata *apek* dan *along* (dalam bahasa Jawa; *apek* berarti mencari, dan *along* berarti banyak). Istilah itu apabila dikaitkan dengan posisi geografis Pekalongan yang merupakan kota pantai maka dapat dikatakan atau ditunjukkan bahwa lautnya kaya akan hasil ikan. Dengan kata lain Pekalongan merupakan salah satu penghasil ikan terbesar di daerah Pantura (Pantai Utara Jawa).

Cerita rakyat di atas itu sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa Ki Baurekso sebagai Bupati Pekalongan yang juga panglima merupakan sosok yang disiplin dan patuh terhadap perintah sang raja. Agar supaya tugas-tugas yang diembannya berhasil maka ia harus menempa diri dengan laku tapa. Sesungguhnya cerita rakyat itu sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa apabila seseorang ingin mencapai sesuatu maka ia haruslah ulet dan bekerja keras. Demikian pula bagi masyarakat Pekalongan yang merupakan masyarakat pantai, mereka merupakan pekerja yang cukup ulet dan tangguh.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Pekalongan adalah masyarakat yang agamis dan merupakan salah satu kota santri. Namun demikian cerita rakyat yang kini masih berkembang dan hidup di masyarakat itu dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Paling tidak hampir mirip dengan apa yang diceritakan dalam cerita rakyat itu. Selain itu tradisi yang berakar pada budaya lokal atau budaya tradisional masih cukup menonjol. Sebagian besar masyarakat setempat masih percaya terhadap berbagai bentuk ilmu kesaktian (*ngelmu kasekten*) yang bersifat supra natural.¹

Seseorang dianggap sebagai tokoh masyarakat apabila yang bersangkutan dianggap juga mempunyai ilmu agama yang tinggi dan mempunyai *ngelmu kasekten*.² Di kalangan masyarakat Pekalongan ada anggapan bahwa para kiai khususnya dianggap mempunyai kesaktian, maka tidak jarang bagi penduduk setempat mendatangi kiai tersebut untuk minta kesaktian, berobat, maupun meminta berkah. Aktivitas mencari *ngelmu* ini nampak ketika kondisi kemasyarakatannya dianggap sedang dalam keadaan “kacau”. Kenyataan ini dapat dilihat pada pemilu tahun 1997 itu banyak para anggota simpatisan partai tertentu mencari ilmu kekebalan.³ Oleh sebab itu tidak mengherankan jika para simpatisan partai tersebut akan berani melawan atau menentang aparat jika mereka merasa diperlakukan tidak adil.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa para kiai itu mempunyai posisi sentral di mata masyarakat, termasuk masyarakat Pekalongan. Dapat juga dikatakan bahwa kiai merupakan *informal leader* yang mampu mempengaruhi masyarakat setempat dan bukan tidak mungkin masyarakat lebih percaya kepada kiai ketimbang para birokrat. Untuk itu maka perlu dijalin hubungan kerja sama antara pemuka masyarakat baik yang informal maupun formal untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Termasuk sebelum terjadi sesuatu peristiwa misalnya kerusuhan. Terlebih lagi pada masyarakat Pekalongan yang cukup dikenal sangat temperamental dan pemberani untuk melakukan dialog guna menyelesaikan persoalan yang muncul dalam masyarakat perlu dilakukan dan

¹ Maklor Masoed, dkk (ed), *Kekerasan Kolektif Kondisi dan Pemicu* (Yogyakarta: P3PKUGM, 2001) hlm. 246.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

harus diusahakan. Mengingat dikalangan aparat setempat daerah Pekalongan dikenal dengan istilah “sumbu pendek”, artinya mudah tersulut.⁴ Persoalan kecil yang terjadi dalam masyarakat mudah menjadi besar bahkan dapat memunculkan adanya kerusuhan yang dapat merugikan semua pihak, seperti dapat dilihat pada uraian bab-bab selanjutnya.

Pekalongan telah tercatat sebagai salah satu kota industri batik di Indonesia, terletak di daerah rendah pantai utara Pulau Jawa dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut. Tepatnya berada di sebelah barat Ibukota Propinsi Jawa Tengah (Semarang) dengan jarak sekitar 100 km.

Luas wilayah kota Pekalongan ada 45,25 km persegi yang secara administratif terdiri dari 4 kecamatan atau 46 kelurahan. Masing-masing yaitu Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 13 kelurahan dengan luas wilayah 10,05 km persegi; Kecamatan Pekalongan Timur dengan 13 kelurahan juga, luasnya 9,52 km persegi. Sedangkan Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri 11 kelurahan, luas wilayahnya 10,80 km persegi; dan Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 9 kelurahan dengan luas wilayahnya 14,88 km persegi.⁵

Di wilayah kota Pekalongan terdapat beberapa etnis antara lain yaitu etnis Jawa, Cina, Arab, dan yang paling dominan dalam menguasai perdagangan, di sini adalah etnis Cina dan etnis Arab sehingga kondisi sosial ekonominya jauh lebih baik bila dibandingkan penduduk pribumi. Bila dilihat dari wilayah pemukimannya kedua etnis ini tempat tinggalnya mengelompok dan berdampingan. Untuk etnis Cina yang biasa disebut dengan Kampung Pecinan berada di sekitar Jalan Sultan Agung, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Pintu Dalam, dan Jalan Haji Win; sedangkan kompleks etnis Arab biasa disebut Kampung Arab meliputi kompleks Saragenen, Jalan Patinus, Jalan Kenanga, Jalan Surabaya, Jlamprang, dan Bandengan. Kedua kampung etnis itu hanya dibatasi jalan, sejak dari timur sampai di Pekalongan Barat, di samping Sungai Mentok, dan Sungai Pekalongan. Sejak masa kolonial hingga sekarang wilayah ini tidak ada perubahannya yaitu sebagai wilayah tempat tinggal ke dua etnis tersebut. Hal ini bisa dilihat atau ditengarai dengan adanya bangunan-

⁴ Wawancara dengan Sanusi pada tanggal 10 Juni 2003 di Pekalongan.

⁵ Monografi Kota Pekalongan Tahun 2002.

bangunan kuno peninggalan masa Kolonial yang masih berdiri kokoh di sekitar tempat itu.⁶ Adapun etnis Jawa berada di pinggir-pinggir dan biasanya berada di sekitar Kampung Arab. Mereka berbaur dengan etnis tersebut dan kadangkala perilakunya cenderung meniru etnis Arab sehingga sering disebut ke arab-araban. Kedua etnis Cina dan Arab itu bergerak di bidang perdagangan terutama kain cita dan *malam* (bahan baku untuk membatik), sedangkan etnis Jawa kebanyakan menjadi buruh pembatik meskipun ada pula yang menjadi juragan batik.

Hubungan antar etnis pada dasarnya relatif cukup baik terutama pada hubungan dagang, meskipun kadangkala terdapat perbedaan persepsi terutama dalam hal pandangan hidup atau kepercayaan. Seperti diketahui bahwa beberapa etnis yang ada di Pekalongan ini mempunyai kepercayaan yang berbeda, untuk etnis Arab dan Jawa beragama Islam sedangkan etnis Cina beragama Nasrani, meskipun ada pula yang memeluk agama Islam. Sebagai akibatnya perbedaan-perbedaan kecil itu ada kalanya menimbulkan konflik karena adanya wawasan yang masih terbatas di antara mereka. Namun bila sudah terkait dengan perdagangan maka hubungan antara etnis tersebut akan kembali normal atau baik seperti sedia kala.⁷

Dari berbagai etnis yang ada di Pekalongan yang paling menonjol menguasai perdagangan adalah etnis Cina, mereka cukup ulet di dalam melakukan pekerjaannya. Bahkan sampai sekarang selain berusaha di bidang industri tekstil, mereka juga bergerak di bidang *real estate*.

Selain itu beberapa etnis yang ada di Pekalongan ini masih sering melakukan tradisi nenek moyang mereka antara lain yaitu Sya'banan (ruwahan), diselenggarakan setiap tanggal 14 Sya'ban atau Ruwah. Adapun tujuannya untuk mengenang dan mengingat jasa-jasa Sayid bin Abdullah bin Tholib Al Atas sebagai cikal bakal masyarakat Pekalongan. Kemudian ada pula upacara Balik Gong, Pekcunan dan lain sebagainya yang masih dilakukan oleh etnis Cina sebagai salah satu tradisi warisan para leluhurnya. Selain itu ada pula upacara tradisional sedekah laut yang biasa dilakukan oleh para nelayan. Upacara ini bertujuan untuk memohon keselamatan bagi para nelayan yang

⁶ Wawancara dengan Chaerudin Asslam pada tabgal 4 Juni 2003, di Pekalongan.

⁷ *Ibid.*

sedang melaut dan sebagai ucapan rasa syukur atas limpahan hasil ikan yang mereka dapatkan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa ke tiga etnis itu masih tetap hidup berdampingan, tanpa harus melecehkan antara yang satu dengan lainnya. Kenyataan itu dapat dilihat adanya tradisi-tradisi dari masing-masing etnis yang kini masih hidup.

Kota Pekalongan selain terkenal dengan sebutan Kota Batik, juga terkenal dengan berbagai makanan khasnya seperti *Megono*, yaitu sejenis sayuran tanpa kuah yang terbuat dari nangka muda dicincang halus dicampur dengan urapan kelapa parut. Kemudian *tauto* Pekalongan adalah juga sejenis makanan khas seperti soto, hanya juga untuk *tauto* ini bumbunya ditambah dengan *taucho* sebagai penyedap (semacam saus yang dibuat dari kedelai).

Di kota itu juga terdapat beberapa obyek wisata yang banyak dikunjungi masyarakat sekitar antara lain yaitu obyek wisata Slamaran Indah merupakan daerah pesisir dengan legenda Dewi Lanjar sebagai ratu Pantai Utara Pekalongan yang konon memiliki paras yang cantik jelita. Selain itu ada pula taman rekreasi Pantai Wisata Pasir Kencana, Pemandian Air Panas Tirta Bumi, dan lain sebagainya.

Bila dilihat dari tata ruang perkotaan kuna, Pekalongan bisa dikategorikan sebagai kota kuna. Hal ini terlihat dari letak bangunan-bangunan peninggalan masa kolonial dengan ciri khas arsitekturnya yang masih bisa ditemukan antara lain yaitu gedung residen, kantor pos, gedung *societet*, pasar, masjid, penjara, stasiun kereta api, dan lain sebagainya. Meskipun tempat-tempat itu sekarang sudah beralih fungsi namun semua ini bisa menunjukkan ciri-ciri kota kuna masa kolonial atau zaman Belanda.

Paparan di atas menunjukkan bahwa seandainya dari berbagai ciri khas itu dikemas secara khusus niscaya akan dapat menciptakan lapangan kerja baru, dan apabila ditangani secara professional dimungkinkan akan dapat menambah kesejahteraan masyarakat. Mengingat ciri khas daerah itu merupakan potensi yang dapat menambah devisa, maka diharapkan dari devisa tersebut setidaknya kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi dalam masyarakat akan sedikit teratasi.

Pada masa lalu kondisi ekonomi masyarakat Kota Pekalongan cukup baik meskipun mereka sebagian besar bermatapencaharian sebagai buruh

(pembatik). Hal ini disebabkan karena adanya koperasi yang bisa membantu kesejahteraan para anggotanya. Seperti kita ketahui bahwa pada masa lalu, di Kota Pekalongan sudah ada GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia), yang sebagian besar anggotanya masyarakat di wilayah karesidenan Pekalongan. Kemudian Koperasi Batik Sentono yang ada di paling ujung timur Kota Pekalongan (Batang sekarang), Koperasi Batik Wanapringga, Batik Pencongan dan lain sebagainya. Koperasi-koperasi ini muncul memang dimaksudkan untuk mengangkat perekonomian kaum pribumi dengan memberikan fasilitas-fasilitas tertentu serta hak-hak istimewa dalam penyediaan bahan baku, obat-obatan batik, dan lain sebagainya yang pada masa pemerintahan Sukarno sering disebut dengan "Berdikari".⁸ Namun sangat disayangkan bahwa koperasi-koperasi itu pada saat ini sudah tidak mampu lagi membantu para anggotanya.

Kemudian pada masa orde baru usaha berdikari itu makin lama semakin menurun apa lagi setelah datangnya investor dari luar negeri. Hal ini sangat berpengaruh ke daerah-daerah, sehingga banyak pengusaha-pengusaha Pekalongan yang gulung tikar. Selain disebabkan adanya investor-investor asing juga disebabkan oleh adanya permodalan yang kurang kuat terutama bagi para pribumi. Sehingga muncul istilah "Ali baba". Ali itu dikonotasikan sebagai orang pribumi yang mempunyai keahlian dalam membatik, pencelupan, desain, dan lain sebagainya ibarat buruh dan Baba itu etnis tertentu yang mempunyai banyak modal yang hanya duduk manis sebagai majikan yang tinggal menerima hasilnya saja. Lama kelamaan akibat adanya kondisi seperti ini banyak para pekerja yang lari ke usaha lain. Kemudian pada masa sesudah Orde Baru industri-industri kecil mulai digalakkan lagi. Para pengusaha kecil dipersatukan, hasil industrinya ditampung di kios-kios sehingga menjadi satu usaha grosir. Akhirnya grosir-grosir batik ini menjamur di sepanjang jalan masuk kota Pekalongan.

Selain pengusaha, di wilayah itu juga terdapat nelayan-nelayan yang mendiami disepanjang pantai utara kota Pekalongan. Daerah ini merupakan komunitas nelayan, baik nelayan buruh maupun nelayan yang mempunyai

⁸ Wawancara dengan H. Ali Imron Bin Hasbullah pada tanggal 11 Juni 2003 di Pekalongan.

modal besar seperti kapal dan lain sebagainya. Di wilayah inilah upacara sedekah laut dilakukan oleh para nelayan, dengan tujuan untuk mengucapkan syukur atas hasil tangkapannya dan mohon keselamatan sewaktu melaut.

Semasa bangsa kita dilanda krisis ekonomi, aktivitas perdagangan di kota Pekalongan tidak begitu terpengaruh terutama dalam masyarakat bawah. Hal ini nampak pada pengusaha-pengusaha kecil seperti warung-warung masih tetap bertahan. Namun bagi pengusaha-pengusaha bermodal besar seperti pabrik tenun, batik, dan lainnya terpaksa mengurangi karyawan dan buruhnya. Adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) semacam ini mengakibatkan banyaknya pengangguran, sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang kurang baik seperti kriminalitas, pencurian, dan sebagainya.

Pada tahun 1999 semenjak adanya multi partai banyak anggota masyarakat Pekalongan dari berbagai etnis yang menjadi anggota salah satu partai yang ada di Indonesia ini. Adapun hubungan antara etnis yang ada di Pekalongan dengan partai-partai itu nampaknya tidak begitu mencolok. Seandainya nanti timbul berbagai persoalan itu hanya merupakan suatu kesalahpahaman.

Seperti telah disebutkan di muka bahwa Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Pekalongan Utara, Kecamatan Pekalongan Selatan, Pekalongan Barat, dan Pekalongan Timur. Salah satu dari ke 4 kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Pekalongan Selatan terdapat satu desa atau kelurahan bernama Buaran.

Kelurahan Buaran atau Desa Buaran berada di sebelah barat kota Pekalongan berjarak kurang lebih 3 km dari kota Pekalongan atau 7 km dari Kecamatan Pekalongan Selatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa desa ini sangat dekat dengan kota Pekalongan. Adapun batas wilayahnya di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pringlangu, di sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Banyu Urip, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Bumirejo dan di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kradenan.⁹

Luas wilayahnya kurang lebih 44.8887 ha antara lain terdiri dari 19.5412 ha tanah kering, tanah sawah seluas 22.1366 ha, pemukiman

⁹ Monografi Kelurahan Buaran tahun 2002.

12.5847 ha, untuk jalan seluas 1.3264 ha, industri seluas 2 ha, dan untuk perkantoran serta pertokoan ada seluas 0,0447 ha.

Bila dilihat dari kondisi geografisnya, Desa Buaran berada pada ketinggian 1 m di atas permukaan laut, dengan topografinya rendah, suhu udara kira-kira 30 derajat celcius serta curah hujannya 2500 mm/tahun.

Penduduk Desa Buaran berjumlah 3.176 jiwa terdiri dari 694 KK dengan rincian laki-laki 1.595 jiwa, perempuan 1.581 jiwa. Mayoritas penduduknya beragama Islam yaitu sebanyak 3.166 orang, pemeluk agama Kristen 4 orang, dan pemeluk agama Budha 6 orang. Mereka hidup rukun berdampingan saling hormat menghormati diantara sesamanya sehingga sangat jarang dijumpai adanya kesalahpahaman atau konflik diantara warga desa.¹⁰

Bila dilihat dari tingkat pendidikannya sebagian masyarakat Desa Buaran hanya mengenyam pendidikan setingkat sekolah dasar, meskipun ada pula yang tamat sekolah lanjutan pertama, sekolah lanjutan atas, dan perguruan tinggi. Di desa ini memang hanya ada sekolah dasar sebanyak 2 buah, masing-masing 1 buah sekolah dasar negeri dan 1 buah sekolah swasta (Madrasah Ibtidaiyah). Oleh karenanya bila mereka akan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi mereka harus pergi ke luar desa yaitu ke kota kecamatan atau ke kota kabupaten. Masyarakat Desa Buaran memang sangat patuh pada aturan pemerintah terutama pada soal pendidikan. Pemerintah menganjurkan agar supaya anak-anak bisa mengenyam pendidikan sesuai dengan program pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 tahun. Oleh karena itu maka para orang tua di Desa Buaran tentu akan menyekolahkan anaknya sesuai dengan program pemerintah tersebut. Namun demikian meskipun di sini sebagian besar masyarakatnya hanya berpendidikan sampai dengan tamat sekolah dasar tetapi tidak ada yang namanya kawin muda. Biasanya selepas sekolah mereka kemudian bekerja menjadi buruh konveksi ataupun buruh di pabrik tekstil. Oleh sebab itu hal-hal yang bersifat negatif seperti minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya sangat jarang bahkan tidak dijumpai.

¹⁰ Wawancara dengan Khaeron Jazuli pada tanggal 10 Juni 2003 di Pekalongan

Masyarakat Desa Buaran sebagian besar bermatapencaharian sebagai pedagang dan pegawai swasta, mencapai kurang lebih 1.566 orang. Namun ada pula yang menjadi pegawai negeri, tani maupun buruh tani meskipun hanya sebagian kecil. Disini sangat jarang dijumpai adanya pengangguran sehingga dapat dikatakan meskipun hanya menjadi buruh, mereka dapat menghidupi keluarganya serta bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai tamat sekolah dasar.

Untuk memenuhi kebutuhan ibadah bagi masyarakatnya di desa ini terdapat satu buah masjid dan 10 buah mushola. Sedang gereja, pura, dan vihara tidak ada karena memang pemeluknya kurang begitu banyak dan apabila akan menjalankan ibadah mereka harus pergi ke kota kecamatan atau ke kota kabupaten. Namun demikian mereka dapat hidup berdampingan secara baik, sehingga tidak ada rasa curiga mencurigai diantara pemeluknya.

Selain itu di desa ini juga terdapat 4 kelompok Majelis Ta'lim dan 1 Pondok Pesantren yang cukup besar dengan santri-santrinya yang cukup banyak pula. Bahkan kyai pemimpin pondok ini cukup disegani dan dihormati oleh masyarakat Buaran dan sekitarnya. Mereka banyak yang datang ke pondok itu untuk minta nasehat dan berkah dari kyai demi keselamatan hidupnya. Di dalam pondok ini selain kegiatan belajar mengajar juga sering diadakan satu tradisi yang biasa disebut dengan *Khol*, yaitu suatu tradisi untuk memperingati wafatnya sesepuh pondok yang dilakukan setiap bulan Syawal, satu minggu sesudah Lebaran, biasanya dengan membuat *nasi samin*. Tradisi ini selain dihadiri oleh para santri dan masyarakat Desa Buaran juga banyak dikunjungi oleh masyarakat di luar Desa Buaran. Kedatangannya untuk mohon doa restu agar bisa lancar dan selamat di dalam menjalani hidup ini.

Di Desa Buaran, sarana transportasi dan komunikasi sudah cukup memadai. Hal ini didukung oleh adanya jalan-jalan kabupaten maupun jalan kecamatan yang sudah beraspal. Kemudian juga sarana kendaraan yang cukup banyak baik itu kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, sehingga desa ini mudah dijangkau dengan kendaraan apapun. Melihat data sarana transportasi di kelurahan itu nampak bahwa masyarakat Desa Buaran sudah banyak yang mempunyai kendaraan sendiri baik itu sepeda, sepeda motor, truk, becak, dan lain sebagainya. Melihat kondisi transportasi yang demikian

inilah maka dapat dikatakan bahwa untuk sarana transportasi di desa ini cukup lancar tidak ada kesulitan.

Kemudian untuk sarana komunikasi di desa ini sudah ada 2 buah telepon umum, di samping itu kepemilikan telepon pribadi pun cukup banyak mencapai 115 orang, kepemilikan televisi ada 392, radio 79, dan juga antena parabola sebanyak 2 buah. Dengan demikian bila dilihat dari kepemilikan sarana komunikasinya masyarakat Desa Buaran sudah cukup maju, mereka cukup mampu sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi ekonominya cukup baik.

Perlu juga diketahui bahwa di wilayah ini tidak ada persaingan yang cukup menonjol dalam kehidupan sehari-harinya, terlebih lagi dengan adanya kegiatan-kegiatan sosial keagamaan seperti pengajian, arisan, PKK, gotong royong, dan lain sebagainya. Hal itu dapat menjadikan mereka hidup lebih rukun, hubungan bertetangga juga baik sehingga dicapai suasana yang aman dan tenteram.¹¹

Selain itu mereka juga sudah melaksanakan program keluarga berencana (KB). Banyak anggota masyarakat yang sudah menjadi akseptor KB yaitu dengan menggunakan alat kontrasepsi yang sesuai dengan keinginannya baik itu dengan IUD, Pil, Susuk, dan lain sebagainya. Ini semua disadari untuk dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan hidupnya serta meningkatkan kehidupan ekonominya. Melihat kenyataan yang ada ternyata masyarakat tetap taat pada program-program pemerintah. Terbukti program-program yang dicanangkan oleh pemerintah itu berjalan dengan baik dan diikuti oleh warga masyarakat. Namun demikian yang perlu diingat bahwa mereka jangan sampai tersinggung akan harga dirinya, dan bahkan kepercayaannya. Sudah barang tentu apabila dikemudian hari terjadi sesuatu seperti kerusakan misalnya, pasti ada kebijakan yang kurang tepat dilakukan.

Desa Buaran juga terkenal dengan industri batiknya. Ada beberapa industri yang ada di Buaran ini antara lain yaitu industri kecil sebanyak 31 buah, industri rumah tangga sebanyak 3 buah dan industri sedang sebanyak 3 buah. Para pemilik industri ini sebagian besar berasal dari kelompok pribumi

¹¹ Wawancara dengan Hj. Maslichah pada tanggal 11 Juni 2003 di Pekalongan.

atau etnis Jawa yang sebagian besar bergerak pada industri batik dan konveksi yang menyebar hampir ke seluruh perkampungan Desa Buaran. Industri-industri kecil ini akan menyetorkan hasilnya kepada pedagang yang lebih besar dan sangat jarang untuk menjualnya sendiri. Hal ini memang salah satu kendala bagi para pemilik industri kecil untuk memasarkan hasil produksinya dan akhirnya mereka hanya menyetorkan kepada para pemilik modal yang lebih besar.

Adanya industri-industri ini sangat membantu pemerintah desa dalam mengatasi pengangguran. Masyarakat Desa Buaran selepas tamat sekolah dasar kemudian bekerja menjadi buruh di industri-industri tersebut. Bahkan ada pula yang sudah tamat sampai perguruan tinggi namun mereka tidak menggunakan ijazah yang didapat pada perguruan tinggi tersebut dengan bekerja di luar daerah, di perkantoran yang lebih menjanjikan, namun mereka tetap kembali ke rumah dan tetap berusaha meneruskan usaha orangtuanya. Inilah rupanya jiwa kewiraswastaan yang ada di dalam masyarakat Pekalongan umumnya dan masyarakat Buaran pada khususnya.

Masyarakat Desa Buaran sebagian besar adalah warga NU, namun seiring dengan perkembangan kepartaian di Indonesia banyak warganya yang kemudian masuk ke partai yang dianggap sesuai dengan aspirasinya. Akhirnya merekapun "terpecah" sehingga kadangkala terjadi "permusuhan". Namun demikian seringkali dijumpai sesuatu hal yang kontroversi. Misalnya saja selama mereka bekerja menjadi buruh atau pekerjaan lainnya secara bersamaan mereka akan rukun, namun bila sudah di luar pekerjaannya dan berkaitan dengan kepartaian mereka pun bersaing. Untungnya mereka ini bisa memisahkan antara pekerjaan dan kepartaian yang akhirnya berbagai macam persaingan atau dampak-dampak negatif yang mungkin ada bisa berkurang bahkan dihindari. Sebenarnya hal-hal yang bersifat persaingan atau permusuhan sangat tidak disenangi oleh masyarakat. Mereka percaya bahwa mereka ini adalah saudara, mereka akan senang bila desanya aman dan tenteram, namun dengan adanya banyak partai ini menjadikan mereka kebingungan.¹² Lebih-lebih para pemimpin yang dahulu menjadi pimpinan

¹² *Ibid.*

mereka berlainan arah dengan mereka. Melihat kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Buaran masih mendambakan figur (tokoh) yang bisa menjadi contoh, panutan, dan pegangan hidupnya. Mereka tidak menginginkan persaingan atau permusuhan, mereka tetap mendambakan ketenangan di dalam bermasyarakat. Dengan demikian suasana aman dan tenteram tetap menjadi prioritas utama bagi masyarakat Pekalongan.

Perlu diketahui bahwa kota Pekalongan yang memiliki ciri menonjol pada usaha industri tekstil, terutama batik. Hal itu dapat dilihat pada data tahun 1993 yang menyebutkan persentase Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) sektor industri di Pekalongan mencapai 17,15%. Kemudian pada tahun 1994 menjadi 18,37%, berarti selama kurun waktu satu tahun ada kenaikan sebesar 1,22%. Hal itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini mengenai persentase di lapangan usaha yang lain, jika dibandingkan dengan lapangan industri.

Tabel.2.1 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Brutto di Kodya Pekalongan Tahun 1993 - 1994

Lapangan Usaha	1993	1994
Pertanian	15,80	16,49
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00
Industri	17,15	18,37
Listrik, Gas, dan Air Minum	1,72	1,87
Bangunan	9,66	9,24
Perdagangan	19,49	20,41
Pengangkutan dan Komunikasi	8,48	7,90
Keuangan, Persewaan	12,32	11,44
Jasa-jasa	15,38	14,28
Total PDRB	100,00	100,00

Sumber : Kodya Pekalongan Dalam Angka 1995

Uraian data di atas apabila dibandingkan dengan data yang ada di Kabupaten Pekalongan terutama di sektor industri, persentase PDRB nya pun juga cukup menonjol. Persentase mengenai usaha industri di wilayah itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto di Kabupaten Pekalongan Tahun 1993 - 1994

Lapangan Usaha	1993	1994
Pertanian	26,19	23,12
Pertambangan dan Pengegalian	0,75	0,71
Industri	25,51	27,92
Listrik, Gas, dan Air Minum	0,60	0,61
Bangunan	5,05	4,92
Perdagangan	18,83	19,62
Pengangkutan dan Komunikasi	3,56	4,08
Keuangan, Persewaan	5,67	5,56
Perusahaan	13,85	13,46
Jasa-jasa	-	-
Total PDRB	100,00	100,00

Sumber : Kodya Pekalongan Dalam Angka 1995.

Menurut data statistik mengenai lapangan pekerjaan warga Pekalongan tahun 1995 sebanyak 23.772 angkatan kerja. Ternyata dari sekian jumlah angkatan kerja yang ada, di sektor industri menyerap tenaga kerja paling banyak. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Banyaknya Pekerja di Kotamadya Pekalongan Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 1995

Lapangan Usaha	Jumlah
Pertanian	1.980
Pertambangan dan Penggalian	-
Industri	17.500
Listrik, Gas, dan Air Minum	144
Bangunan	-
Perdagangan	1.587
Pengangkutan dan Komunikasi	318
Bank dan Lembaga Keuangan	1.107
Sewa Rumah	-
Pemerintahan dan Pertahanan	-
Jasa-jasa	1.166
Jumlah	23.772
Tahun 1994	15.155

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kodya Pekalongan 1995

Secara kualitatif menunjukkan bahwa peningkatan sektor industri itu pada kenyataannya disertai dengan pergeseran pemegang kendali ekonomi, yaitu dari pribumi ke non-pribumi (Cina). Hal ini dapat menciptakan adanya kelompok buruh berjumlah besar dalam masyarakat, yang mayoritas adalah warga pribumi. Kenyataan ini juga diakui oleh Kyai Tohir (Pimpinan Pondok Pesantren Al Qur'an Buaran) bahwa para santri dan masyarakat lingkungannya sangat tergantung dari keberadaan industri batik. Akan tetapi karena keberadaan mereka tergeser oleh etnis non-pribumi (Cina), maka mereka yang semula merupakan pengusaha kemudian menjadi buruh.¹³

Timbulnya pengusaha batik di kalangan orang-orang Cina cukup berpengaruh terhadap terdesaknya industri batik yang dikelola oleh warga pribumi. Kenyataan ini dapat dilihat dari tindakan pengurus yang telah menjual sebuah pabrik tekstil yang ada di wilayah Buaran kepada pengusaha Cina.¹⁴

¹³ Mohtar Mas'oed, dlk (ed). *Op.Cit.* halaman 230.

¹⁴ *Ibid.*

Kenyataan yang telah diuraikan di muka ternyata dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Hajriyanto Y Thohari yang berjudul “Patah Tumbuh Hilang Berganti”¹⁵ tentang usaha batik di wilayah Buaran, juga ditemukan suatu fakta bahwa masyarakat Pekalongan terutama para pengusaha batik menghadapi persaingan dengan pengusaha Cina. Mereka (para pengusaha batik pribumi) dulu disebut-sebut sebagai pengusaha, pedagang, punya modal kuat, kreatif, inovatif di bidang perbatikan. Akan tetapi semenjak tahun 1980-an status mereka berubah menjadi buruh. Dengan kata lain, warga yang dulu berstatus sebagai pengusaha kini bergeser statusnya menjadi buruh pabrik.¹⁶

Dengan adanya pergeseran status semacam itu maka akan dapat menimbulkan dampak kegelisahan sosial. Hal inilah yang akhirnya merupakan salah satu pemicu kerusuhan pada tahun 1997. Masalah pergeseran ini juga dapat menimbulkan kerengangan hubungan antara warga pribumi dengan warga non-pribumi (Cina). Kerengangan bentuk hubungan yang dianggap tidak harmonis antar kelompok yang pada umumnya berkaitan dengan faktor ekonomi dan agama.

Sehubungan dengan penjelasan yang telah dikemukakan bahwa kondisi sosial masyarakat setempat dapat digambarkan adanya suatu persepsi yang menyatakan “Cina - Kaya - Kristen dan Pribumi - Miskin - Islam”.¹⁷ Persepsi semacam itu sudah barang tentu dapat menimbulkan ketegangan struktural.

¹⁵ Hajriyanto, Y Thohari, *Patah Tumbuh Hilang Berganti* (Thesis MA unpublished), Jakarta: Pasca Sarjana UI, 1993. halaman 1- 10.

¹⁶ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Tahun 1966 Tahun Kekerasan*, Jakarta: YLBHI, 1997. Halaman 1 - 3.

¹⁷ Mohtar Mas'ood, dikk (ed), *Op.Cit.* Halaman 235.

BAB III

KARESIDENAN PEKALONGAN PADA AWAL KEMERDEKAAN

A. Kondisi Karesidenan Pekalongan Pada Awal Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan di Kota Pekalongan pengibaran bendera Merah-Putih ditentang keras. Barisan Pelopor Pekalongan tidak mampu mengerahkan rakyat. Pemimpinnya orang baru, organisasinya tidak luas, dan kaum santri yang lebih menonjol, sedangkan di Tegal pemimpinnya adalah tokoh eks-Digulis yang sudah lama dikenal, dan organisasinya menjangkau seluruh kota.

Pada tahap awal kemerdekaan di Pekalongan para aktivis Jawatan Kereta Api yang menonjol dengan memeriksa penumpang-penumpang apakah sudah memakai lencana Merah-Putih, dan mendirikan sebuah menara besar di depan stasiun untuk mengibarkan Sang Dwiwarna. Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) walaupun kurang senang dijuluki sebagai gerakan “piknik dan bal-balan” oleh para pemuda (lantaran berasal dari golongan menengah kota atau pengusaha), bekerja sama dengan Barisan Pelopor untuk mengambil alih sebuah pabrik penggilingan beras serta menjual hasilnya kepada KNI untuk didistribusikan. Tokoh-tokoh AMRI aktif pula dalam gerakan pengibaran bendera di luar gedung-gedung pemerintah. Tokoh-tokoh AMRI A. Junaid mengibarkan bendera di depan kantor Pengadilan Negeri, tetapi segera diturunkan kembali atas perintah Jaksa Suprpto, tokoh terkemuka kalangan priyayi Pekalongan.¹

Kepatuhan pada status sosial merupakan masa lalu. Pemuda Permi (priyayi muda) ikut aktif menyebarkan poster bertuliskan “Merdeka atau Mati”, dengan cepat menurunkan bendera Jepang. Kegiatan itu baru terbentur ketika mereka menurunkan bendera Jepang di halaman karesidenan dan menaikkan bendera Merah-Putih di depan mata sejumlah pejabat Jepang.

¹ Pemimpin AMRI juga memimpin Pemuda Permi. Beberapa aktivis muda priyayi mempunyai hubungan dengan kelompok mahasiswa fakultas kedokteran di Jalan Prapatan 10 Jakarta yang memberikan bahan-bahan kepadanya. Hakim pada peradilan tokoh-tokoh Tiga daerah adalah sama orangnya dengan hakim yang memerintahkan penurunan bendera Merah-Putih yang berkibar di depan kantor Pengadilan Negeri; ia menolak pertanyaan pembela mengenai insiden ini sebagai “di luar tata tertib” dalam persidangan enam terdakwa pemimpin Tiga Daerah pada awal tahun 1947 itu.

Residen Jepang marah dan meminta penjelasan dari Mr. Besar selaku *Fuku Shuchokan* (wakil residen). Mr. Besar memanggil siding kilat KNI dan menyampaikan rasa amarah residen Jepang atas insiden itu. Bayangkan andai kata para pejabat Indonesia mendukung aksi para Pemuda Permi itu, padahal berdasarkan kenyataan Jepang masih memegang senjata. Sungguh merupakan penghinaan besar bagi orang-orang Jepang menyaksikan benderanya di turunkan, dalam kondisi mental goncang akibat kekalahannya.

Situasi menjadi semakin menegang di depan kantor karesidenan. Para pejabat Indonesia dan tokoh-tokoh KNI berdatangan atas panggilan Mr. Besar. Pimpinan KNI meminta tokoh-tokoh pemuda Permi menurunkan bendera Merah-Putih dan menaikkan kembali bendera Jepang. Mereka menolak, sehingga semakin membingungkan pimpinan KNI. Akhirnya beberapa pegawai kantor karesidenan dibujuk untuk menurunkannya, guna mencegah bentrokan yang lebih parah.²

Menyusul insiden ini berlangsunglah pertemuan antara Mr. Besar, KNI dan *shuchokan* (residen) Jepang. Dalam pertemuan itu di sepakati bahwa bendera Jepang maupun Indonesia akan dikibarkan di luar kantor karesidenan. Beberapa minggu kemudian barulah Jepang menyetujui pengibaran bendera Merah-Putih di depan semua kantor karesidenan di Pekalongan.

KNI : Komite Nasional Indonesia

Pada tanggal 22 Agustus 1945, Sukarno mengumumkan keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian menamakan dirinya Komite Nasional Indonesia (KNI). Diapun mendirikan partai negara, PNI (Partai Nasional Indonesia), Badan Keamanan Rakyat (BKR), dan KNI-KNI lokal. Dengan penangguhan pembentukan partai-partai pada akhir Agustus, KNI di setiap daerah menjadi "satu-satunya badan penghubung antara Pemerintah Republik dengan kekuatan-kekuatan rakyat di setiap tingkatan" pemerintah.³ Anthony Reid berpendapat, KNI-KNI itu merupakan

² Bupati Pematang, Pertanyaan No. 9, "Jawaban", 1946, Proc. Gen (arsip)

³ Anthony Reid, *Indonesia Nationalism Revolution* (Melbourne, Youngmans, 1974), hlm. 34

kelanjutan dari cabang-cabang *Hokokai* pada masa perang dan sebegitu jauh merupakan organ elite nasionalis tua.

Bagaimanapun juga, peranan KNI di Karesidenan Pekalongan mencerminkan kenyataan-kenyataan di wilayah itu daripada di tingkat nasional atau propinsi. Sikap pasif pangreh praja terhadap Proklamasi berakibat timbulnya kekosongan kekuasaan. Para tokoh tua perjuangan memandang KNI sebagai pengganti aparat pemerintahan kolonial yang lemah dan tidak mampu bertindak secara bijaksana, dan dianggap berbahaya bagi kelangsungan berdirinya republik. KNI-KNI adalah basis kekuasaan baru sebagai sarana bagi para pemimpin tua untuk dapat berunding dengan Jepang demi mendapatkan senjata, dan mengatur kegiatan pemuda. KNI juga menangani masalah ekonomi di banyak kawasan.

Keberhasilan KNI-KNI itu sebagian besar bergantung pada apakah mereka itu merupakan KNI angkatan yang ditunjukkan oleh pangreh praja, atau KNI pilihan karena terpilih oleh dan di antara anggota-anggota perjuangan. Dari enam KNI tingkat kabupaten dan karesidenan, empat dipilih dan dua diangkat. KNI Kotapraja Tegal-lah yang memainkan peranan penting, karena berhasil merundingkan penarikan kenpetai dari Tegal. Ini terutama disebabkan karena dalam bulan menjelang meletusnya revolusi sosial (7 Oktober 1945), ketua KNI, Ki Citrasatmaka, guru sekolah Taman Siswa, didukung oleh tokoh-tokoh radikal senior dalam Barisan Pelopor, Negen Broeders, dan golongan Islam. Menurut pandangan salah seorang Negen Broeders, yang menjadi anggota KNI Kotapraja Tegal, karena pejabat-pejabat pangreh praja dan polisi tidak tegas, bersikap ragu-ragu. KNI-lah yang harus menghadapi tentara Jepang pada waktu perebutan atau penyerahan senjata.⁴ Anggota Barisan Pelopor berpendapat bahwa KNI itu sebuah tempat yang menghimpun anggota-anggota perjuangan setempat bila ingin bertemu. KNI adalah sebuah badan tempat suara rakyat dapat didengar dan diarahkan. Ketua KNI sendiri berpendapat, selama tugas utama KNI kotapraja adalah keamanan, maka KNI gabungan kabupaten dan kotapraja di bulan Oktober telah mengisi kekosongan kekuasaan sebagai akibat revolusi sosial.

⁴ Kadarisman, "Riwayat Perjuangan", tertanggal 11 Januari 1978 (unpublished)

Apakah KNI-KNI itu kemudian merupakan hal yang unik dalam sejarah politik revolusi? Lain dengan Pemalang, Tegal tidak mempunyai tokoh seperti Supangat yang mempunyai kewibawaan karismatis sehingga mampu mempersatukan semua kelompok perjuangan. Yang ada hanyalah KNI (kemudian badan pekerjaanya) yang memainkan peranannya di Tegal menempa terjadinya kerja sama semua kelompok. Salah satu anggota Negen Broders menuturkan kenangan :

Pada mulanya setelah proklamasi seolah-olah orang-orang pergerakan melepaskan ideologisnya dengan partai maupun organisasinya masing-masing dan dapat menerima penuh KNI sebagai pusat pimpinan revolusi daerah. KNI dianggap sebagai dapur yang memasak segala masalah, baik masyarakat atau pemerintahan. Orang lebih suka dan merasa bangga memasuki kantor KNI daripada kantor-kantor pemerintahan, sehingga kantor KNI terbuka siang atau malam.⁵

Jenis KNI yang kedua adalah angkatan. Contoh yang menonjol adalah KNI Pemalang. Di Pemalang, KNI terdiri dari pejabat-pejabat tinggi, nasionalis-nasionalis tua moderat dan tokoh-tokoh muslim konservatif yang ditunjuk oleh sidang kabupaten. Sidang itu dihadiri anggota KNI Pekalongan sebagai wakil dari kantor residen, dan ditunjuk untuk “memimpin bagian penerangan”, tetapi ia menolak.⁶

Ketidaksenangan kaum perjuangan di Pemalang terhadap KNI timbul karena KNI daerah selalu mendominasi pangreh praja. Ini tercermin dalam sikap Bupati Pemalang, R.T.A. Raharjo Sosro Adikusumo, yang menganggap tugas KNI daerah adalah “bekerjasama dengan pemerintah setempat dan memenuhi keinginan rakyat, yaitu hidup di alam kemerdekaan,”. Tugas utamanya yaitu “menjaga keselamatan dan ketertiban rakyat” dan membantu pangreh praja setempat dalam pekerjaannya” memperbaiki kesejahteraan rakyat.” Karena itulah sudah selayaknya kalau yang dipilih sebagai ketua KNI Pemalang seyogyanya dari pangreh praja, kata bupati. Tuntutan ini “agar

⁵ Bupati Pemalang “Jawaban”, 1946, Proc. Gen, hal. 6

⁶ Bupati Pemalang menceritakan mengenai pertemuan pemilihan KNI dalam Pertanyaan No. 6, ibid

tindakan-tindakan KNI segaris dengan pemerintahan”. Bupati Pemalang berpendirian bahwa fungsi utama KNI adalah “menenangkan rakyat.”⁷

Supangat, kaum nasionalis Pemalang, dan kebanyakan warga kabupaten berpendirian sebaliknya. Mereka berpendapat KNI seharusnya berada di barisan terdepan perjuangan, membangunkan rakyat guna memenuhi panggilan proklamasi dan kemerdekaan. Tetapi KNI dalam kenyataannya tidak dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat, karena pangreh praja tidak bersedia mengibarkan Sang Dwi Warna lambang kemerdekaan.

Memang jumlah anggota KNI pilihan lebih banyak di Tegal daripada di Brebes atau Pemalang. Sebagai contoh pemilihan yang menarik yaitu di Pangkah, dimana pemilihan ketua KNI berlangsung dalam suatu sidang di kantor kawedanan. Setiap lurah dari 53 desa dalam kawedanan itu harus hadir mengajak “lima orang tokoh masyarakat”. Rapat dipimpin bekas camat. Setiap calon yang jumlah semuanya tujuh orang ditandai dengan nomor. Para pemilih menulis nomor calonnya diatas secarik kertas dan memasukkan ke dalam kotak suara. Sugiono, seorang guru pembantu dan yang termuda diantara tujuh calon berhasil terpilih sehingga dapat mengalahkan atasannya, yaitu kepala sekolah dasar setempat, dan tiga calon lainnya, yaitu pegawai pabrik gula yang juga anggota-anggota API. Menyadari dirinya muda (27 tahun) Sugiono berhati-hati dalam mengucapkan pidatonya.

Adapun pidato itu anatara lain sebagai berikut :

Saya suruh mengucapkan terimakasih, kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya. Padahal saya yang paling muda. Maka oleh karena itu sekali lagi saya menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada hadirin, para pemilih, khususnya kepada Bapak Wedana (yang lama) yang terhormat, kepada Bapak Asisten (Wedana) yang terhormat, terhormat, terhormat, terhormat.⁸

Pemilihan ketua KNI Pangkah melambangkan kemerosotan kekuasaan wedana yang diperkirakan menjadi anggota gerakan VVV dan menerima uang

⁷ *Ibid.*

⁸ Sugiono, Transkripsi II/25, 27, 11, 75. (arsip)

untuk mensubversi republik. Sugiono, ketua KNI, mulai dipanggil “Pak” Wedana oleh rakyat setempat. Keragu-raguan Sugiono atas kesetiaan Wedana semakin kuat sewaktu ada jamuan makan siang seusai pemilihan bersama-sama dengan camat Pangkah, Kedungbanteng, dan Jatinegara.⁹ Dalam kesempatan itu Wedana mengatakan bahwa benarlah kemerdekaan itu, namun ia sedang menanti “majikannya yang lama” untuk kembali. Sugiono lalu melanjutkan ucapannya bahwa “majikannya yang baru” datang itu ialah KNI, lalu Wedana kelihatan tidak menyukainya.

Kegiatan KNI Pangkah mencerminkan peran ekonomi yang di mainkan beberapa KNI pada masa itu. Setelah terpilihnya Bupati Tegal yang baru, Sugiono mengunjungi pabrik tekstil Tegal dan membeli kain dari dana KNI dengan “harga pantas” untuk dibagi-bagikan secara cuma-cuma kepada rakyatnya. Selain itu, Sugiono juga mengangkat Kiai Umar “yang sangat berpengaruh” untuk menangani Seksi Penerangan KNI bersama seorang anggota BKR (yang juga anggota API) dan juga mengoordinasi para pemuda. Sebagai petugas penghubung diangkat seorang bekas Inspektur Perumahan Program Pemberantasan Penyakit Pes yang berpengalaman. Keberhasilan Sugiono lainnya yang menarik ialah pengawasannya terhadap pemilihan lurah di desa-desa dalam kewedannya.

Kedayagunaan KNI setempat pada dua bulan pertama tergantung pada beberapa faktor. Pertama, siapa ketuanya dan bagaimana caranya ia diangkat; kedua, sejauh mana KNI itu mempunyai fungsi ekonomi dalam mengambil prakarsa untuk meringankan beban penderitaan ekonomi rakyat yang masih berlanjut itu; ketiga, sikap pangreh praja.

Bagi KNI pilihan, tugas yang paling berat adalah masalah ekonomi, pembagian bahan sandang, pangan yang tersedia dari Jepang. Untuk rakyat fungsi ekonomi ini sangatlah penting dan memberi legitimasi rakyat kepada KNI. Boleh dikatakan bahwa KNI adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang mampu menyalurkan aspirasi rakyat pada saat itu dan menjadi wadah kepemimpinan baru dari perjuangan revolusi kemerdekaan. Dengan sendirinya berdirinya KNI pilihan di kawedanan dan kecamatan menandai

⁹ Tiga kecamatan ini termasuk Kawedanan Pangkah, dan memperlihatkan betapa mendalamnya kegiatan revolusi sosial di kawasan ini.

merosotnya kekuasaan pangreh praja, yang pada umumnya seperti Wedana Pangkah menanti “majikannya yang lama” (Belanda) untuk kembali.

B. Reaksi Elite Birokrat

Tanggapan semula kaum elite tradisional terhadap pengibaran pertama Sang Merah-Putih di karesidenan itu adalah sama. “Turunkan itu!” katanya kepada kaum perjuangan, “karena kita tidak mendapat perintah resmi dari Dai Nippon.” Sikap demikian di masa kemerdekaan jelas menandai keraguan akan makna Proklamasi. Suara pangreh praja di luar ibukota karesidenan sendiri mengatakan penyerahan Jepang tidak dipastikan baik oleh residen Jepang maupun radio resmi Jakarta. Mereka juga takut akan reaksi Jepang apabila gerakan revolusioner melanjutkan kampanyenya menurunkan bendera Jepang dan menggantikannya dengan Merah-Putih. Akhirnya setelah penyerahan itu menjadi suatu kepastian, mereka mengira Sekutu akan segera datang dan menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda. Sikap semacam itu tentu saja tidak terbatas pada kalangan pangreh praja, melainkan juga merupakan sikap sebagian terbesar kaum tua Indonesia yang tidak ikut serta dalam geraka revolusioner. Beberapa pejabat pangreh praja dapat dengan cepat mengubah sikap dan pandangannya. Namun bagi mereka yang sikap keraguannya mencolok, kewibawaannya jelas cepat musnah di kemudian hari.

Sarimin yang pada bulan Agustus 1945 menjadi Bupati Brebes untuk masa tiga bulan lamanya, telah meraih keberhasilan yang langka terjadi di bawah kekuasaan Belanda. Ia adalah anak laki-laki sebuah keluarga petani tembakau di dekat Dieng. Ayahnya berambisi besar agar anaknya menjadi priyayi dengan kedudukan tinggi dalam dinas pemerintah. Ia duduk di kelas tertinggi OSVIA (sekolah pendidikan bagi pegawai-pegawai pribumi) pada tahun 1924 dan menjadi camat pada usia 28 tahun. Ia juga seorang dari 13 orang lulusan terbaik akademi pemerintahan sebelum perang. Akademi ini memberi prioritas kepada anak-anak bupati yang ingin melanjutkan, sedangkan di desanya sendiri Sarimin dikenal sebagai “seorang yang telah dimanjakan oleh dewa-dewa”. Kemampuan dan statusnya sebagai priyayi “modern” menjadikan kariernya maju dengan amat cepat di zaman pendudukan Jepang, hanya dalam waktu 3 tahun dia dipromoskai dari

wedana menjadi patih, dan dari patih menjadi bupati. Kemudian terjadilah sesuatu diluar kemampuannya. Hanya selama enam bulan menjadi bupati Brebes datanglah apa yang ia sebut sebagai suatu “kemalangan” (*kualat*) yang menimpa kariernya sebagai seorang administratur.

Faktor lain yang menyebabkan hubungannya dengan kaum perjuangan di karesidenan itu memburuk adalah kecurigaan akan adanya gerakan subversif yang menyambut baik kembalinya penguasa Belanda, di kalangan pangreh praja. Menurut para pemimpin perjuangan, hal ini ada kaitannya dengan Gerakan Untuk Kemenangan, VV (*Vak Voor Victorie*), yang dulu dipimpin oleh Asisten Residen Belanda A.R Coert, pada awal tahun 1940 sesudah Jerman menduduki Belanda. Katanya banyak anggota *vrijmetselarij*, (*Freemasonry*) menjadi anggota gerakan tersebut. Residen Besar dan Bupati Sarimin pernah dinyatakan namanya sudah terkaitan dengan VVV, yang sama sekali tidak menguntungkannya.¹⁰ Di kalangan Negen Broeders reputasi Sarimin lebih jauh lagi dinodai oleh keterlibatannya dengan kasus Wedana Pangkah, yang juga dituduh sebagai anggota VVV, dan menerima sejumlah dana untuk melakuka subversi republik.¹¹

Di Pekalongan tersiar desas-desus tentang dibentuknya komite rahasia pejabat-pejabat tinggi pangreh raja untuk menyambut kedatangan kembali Belanda (*Comite van Ontvangst*), dan menurut salah satu kelompok perjuangan, Bupati R.A.A. Suryo (yang menjabat sejak tahun 1924) juga terlibat. Termasuk juga sekelompok “orang-orang terpelajar” yang setia kepada Belanda, antara lain, anak perempuan Wedana Pekalongan dan teman-temannya. Mereka bergabung dalam Pemuda Permi, golongan pemuda kaum priyayi yang tinggal di Jalan Permi Pekalongan.

Menurut Sarli, tokoh nasionalis tua Pekalongan, Kromo Lawi, paling dibenci di daerah itu. Kenyataannya, hubungan antara beberapa pejabat Pekalongan dengan Kromo Lawi, Sarli dan kelompok kecil nasionalis radikal di ibukota karesidenan itu telah memburuk semasa pendudukan. Kromo Lawi

¹⁰ Pertanyaan No. 15, “Keterangan”, Jawaban tertulis atas pertanyaan jaksa Pekalongan S. Karisaatmojo 31.1.46, Proc. Gen (arsip).

¹¹ Muhammad Nuh, Jawaban tertulis atas pertanyaan Sejarah Militer Kodam VII (Semdam), Semarang, Februari 1959. Semdam, hal 5. Selanjutnya “Jawaban tertulis Semdam”. Wedanan Pangkah didesas-desuskan terlibat dalam penculikan dan pembunuhan sesaat setelah kemerdekaan, kegiatan-kegiatan agen-provokator yang dikatakan bertujuan mendiskreditkan Republik yang baru lahir itu.

diberi kedudukan tinggi oleh Jepang dengan menjadi ketua pertama Putera, lalu menjadi kepala seksi perdagangan *Hokokai* dan pemimpin Barisan Pelopor. Pangreh Praja tidak menyenangnya, karena ia rajin mengunjungi wilayah-wilayah kecamatannya dan pidato-pidatonya mengenai kemerdekaan dalam kursus-kursus Putera yang kemudian menjadi *Hokokai*. Mereka juga benci pada cara Kromo Lawi mengambil alih rumah kediaman wedana Pekalongan untuk dijadikan kantor Putera. Mereka mencurigai pula laporan-laporan tertentu yang disampaikan kepada Jepang yang merugikan pangreh praja dan mengakibatkan mereka ditegur dan dipecat. Tetapi ternyata kalangan priyayi tidak berhasil menggeser kedudukannya.¹² Kromo lawi kemudian melindungi dirinya dengan jalan mendekati kenpetai. Akibatnya ketika meletus bentrokan kenpetai di Pekalongan awal Oktober, pemuda menangkap Kromo Lawi dengan tuduhan agen subversi kenpetai.

Dengan adanya ketegangan antara Kromo Lawi dan pangreh praja Pekalongan yang pro Belanda itu, tidak mengherankan bila berita yang dibawanya dari Jakarta mendapat reaksi dari mereka. Kromo Lawi berada di Jakarta, di rumah kediaman Laksamana Meida, ketika malam itu juga Proklamasi sedang diperdebatkan. Pagi harinya buru-buru ia ke Pekalongan untuk memberi tahu bahwa proklamasi akan diumumkan, meski berita tersebut telah sampai di pangreh praja, termasuk semua bupati, berkumpul di Pekalongan untuk menghadiri sidang *Hokokai* dan *Shu Sangi Kai* (Dewan Penasehat Karesidenan). Kromo Lawi menuturkan kenangannya :

Saya ditertawai Sarimin itu di rumah yang sebelah sini CPM, kita berkumpul disana dengan beberapa Bupati, kemudian saya ceritakan tentang proklamasi itu. Nah, ditertawai, karena ya, yang bisa memerdekakan kita itu adalah negara yang menang anggapan dari Sarimin cs itu, sehingga dia tidak percaya kalau umpamanya saya... kita ini tidak bisa memberi kita hak kemerdekaan. Tidak mengerti bahwa proklamasi ini adalah dari sanubari rakyat Indonesia sendiri.¹³

¹² Laksamana Maeda adalah simpatisan gerakan nasionalis. Teks Proklamasi Kemerdekaan disusun di rumah kediamannya pada tanggal 16 Agustus dan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Lihat Anderson, Java, In a Time Revolution Occupation and Resistance, 1944-1946 (Ithaca, Corneli University Press), hlm. 75.

¹³ Kromo Lawi, Transkripsi III/6, 7.6.73 (arsip)

Sarimin dalam keterangannya mengenai sidang itu lima bulan kemudian menulis antara lain:

... Pada saat itoe seorangpoen ta' ada jang taoe benar tentang seloek-beloeknja Proklamatie, Taoen Kromo Lawi jang habis dari Djakarta menerangkan, bahwa Proklamatie itu beloekn berisi, masih berwoedjoed ideologie, belum mempunyai woedjoed jang njata.¹⁴

Pada waktu itu (akhir Agustus 1945), Sarimin percaya proklamasi tidak memiliki makna apa pun sampai Jepang secara resmi sudah menyerahterimakan kekuasaanya kepada Indonesia. Menunggu sampai ini terjadi, Sarimin berpendapat “tidak akan terjadi perubahan apapun”. Selanjutnya dikatakan bahwa dia bukan tipe pangreh praja yang tinggal diam. Ketika menjadi camat ia pernah mengajukan pendapatnya tanpa diminta kepada residen Belanda, yang mengakibatkan pemindahan dirinya ke kecamatan yang berpenduduk miskin. Bupati Sarimin memang memiliki kepercayaan diri yang tinggi.

Pendapat maupun tindakan Bupati Sarimin tersebut menimbulkan konflik dengan perjuangan revolusioner di Brebes, terutama Kartoharjo. Sebagai anggota pergerakan nasional yang senior di Brebes, ketua KNI kabupaten maupun Barisan Pelopor, dia tidak menyetujui pendapat Bupati Sarimin (sekembalinya dari rapat para bupati di Pekalongan), bahwa Jepang masih bertanggung jawab untuk keamanan sampai Belanda menduduki Indonesia kembali, menurut Perjanjian Postdam.

Seorang tokoh Masyumi kemudian menanyakan kepada bupati, apakah sebagai kepala daerah ia tidak memiliki keyakinan diri untuk mengumumkan proklamasi itu. Jawabnya adalah tidak. Dikatakan oleh tokoh Barisan Pelopor bahwa gerakan revolusioner Brebes akan mendukung bupati apabila bupati mengumumkan proklamasi secara resmi. Hal ini menimbulkan prasangka realistik yang tajam di Brebes. Beberapa pedagang Cina percaya bahwa kemerdekaan itu tidak akan terjadi; sedangkan orang-orang Arab tampak puas dengan sikap bupati dan secara terang-terangan mengatakan

¹⁴ Pertanyaan No. 2, Keterangan 31.1.46, Proc. Gen (arsip)

bahwa orang Jawa tidak mampu untuk memerintah dirinya sendiri, akibatnya justru kekacauan dan perampokan yang terjadi.

Bupati tetap menjelaskan pendapatnya itu dalam perjalanan dinasnyanya keliling kabupaten. Sewaktu ia tiba di Kewedanan Banjarharjo (disebelah barat Brebes) beberapa minggu setelah proklamasi, pemuka setempat telah berkumpul untuk mendengarkan keterangan bupati tentang situasi nasional waktu itu. Seorang tokoh perjuangan Islam, ingat kata-kata bupati, antara lain:

Bagaimana sikap sekutu, kita tidak menang, yang menang sekutu, tunggu saja nanti sikap dari sekutu, memang kalau sekutu menginginkan merdeka kita merdeka. Merdeka atau tidak merdeka yang perlu sekarang aman dan tentram.¹⁵

Sebelum Sarimin mengakhiri pidatonya, banyak hadirin yang meninggalkan tempat duduknya dan berkata “pidato macam apa ini?”, “kaki tangan kolonial”. Seorang tokoh pemuda dari Ketanggungan Barat akhirnya memotong, “Maafkan Tuan, demi ketertiban umum lebih baik berhenti sekarang”.¹⁶ Kemudian rapat dibubarkan. Pemuda-pemuda santri marah pada pidato bupati yang tajam dan melukai itu. Sewaktu meninggalkan kawedanan ia dicoba diculik tetapi gagal. Kemudian Sarimin mengakui secara jujur bahwa pandangan dan sikapnya memang menyinggung perasaan kebangsaan beberapa orang.

Akhirnya pada tanggal 27 September setelah Jepang menyerah terimakan kekuasaannya dan berkat instruksi Mr. Besar, Sarimin menyetujui pengibaran bendera Merah-Putih. Setelah itu baru masalah untuk mematuhi dua perintah yang berbeda bagi para bupati terpecahkan.¹⁷

Rasa pengabdian Sarimin kepada dua pemerintah menjelaskan perbedaan besar antara langkah-langkah nasional dengan kenyataan lokal di masa periode awal kemerdekaan. Di tingkat nasional, masalah ini tampaknya telah dipecahkan. Pada tanggal 30 Agustus di Jakarta berlangsung konferensi pangreh praja se-Jawa dan Madura, yang mencerminkan salah satu prioritas

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid.* Kelompok revolusioner Kota Brebes yang paling radikal yang kemudian menamakan dirinya Pesindo.

¹⁷ *Pertanyaan No. 1,2, Sarimin, Keterangan, 1946, Proc. Gen (arsip)*

dari kaum nasionalis tua dalam kabinet pertama republik, untuk meyakinkan Sekutu bahwa republik adalah salah satu kenyataan, mereka harus mendemonstrasikan dukungan rakyat dan kewibawaan penguasaan terhadap rakyat. Demi tujuan inilah, Soekarno-Hatta berusaha menghindari sistem pemerintahan dan pertanggungjawaban ganda, Jepang dan republik berdampingan satu sama lain. Seperti dikatakan Hatta, "Perintah-perintah telah dikeluarkan kepada semua pejabat pemerintah untuk menyatakan dirinya sebagai pejabat Republik Indonesia dan siap sedia hanya menerima perintah-perintah yang diberikan kepadanya dari atasan yang berkebangsaan Indonesia".¹⁸ Sukarno meyakinkan pangreh praja bahwa mereka memperoleh "kedudukan yang sepadan di republik muda ini dengan apa yang telah mereka terimanya". Jadi kesepakatan di pihak pangreh praja untuk berdiri di belakang republik asal kedudukan dan statusnya terjamin.¹⁹

Di tingkat lokal terjadilah kesenjangan besar antara aspirasi ini dan pelaksanaan yang sebenarnya. Masalahnya terletak pada bagaimana pejabat-pejabat seperti Sarimin dan Jepang menanggapi kenyataan itu. Ada yang menunggu perintah Jepang yang akan memberi kemerdekaan, ada yang percaya bahwa Sekutu akan mengembalikan kekuasaan kepada Belanda, sehingga peranan residen sangat menentukan. Seperti misalnya di Karesidenan Banyumas, proklamasi memperoleh sambutan lebih cepat berkat kepemimpinan residen pergerakan, Mr. Iskaq Cokroadisuryo, yang pada tanggal 5 September, mengumumkan Banyumas sebagai wilayah kekuasaan republik. Di Pekalongan, karena pengangkatannya sebagai residen terlambat, sampai tanggal 23 September Mr. Besar belum resmi mengumumkan "Kemerdekaan Indonesia". Empat hari kemudian, Jepang secara resmi menyerah terimakan kekuasaan kepadanya sebagai residen republik. Sejak itu dilema mengabdikan dua pemerintah terselesaikan dalam pikiran pejabat seperti Sarimin.

Keterlambatan pengangkatan Mr. Besar sebagai residen pun mengakibatkan tertundanya serah terima kekuasaan secara resmi dan pengumuman proklamasi oleh residen sebagai wilayah kekuasaan Republik.

¹⁸ Anderson mengutip Hatta dalam "The Pemuda Revolution ; Indonesia Politics 1945-1946", hlm. 116

¹⁹ Anderson mengutip Sukarno, *ibid*, hlm. 167.

Tidak jelas mengapa semua wakil residen masa pendudukan Jepang (*fuku shuchokan*) diangkat menjadi residen pada tanggal 5 September, kecuali jabatan Residen Pekalongan, Residen Banten dan Walikota Jakarta yang dibiarkan kosong.²⁰ Boleh jadi Jakarta menghendaki residen baru seyogyanya terdiri dari para pejabat atau administratur berpengalaman dari zaman Belanda (sekira 90 persen dari mereka yang diangkat) atau aktivis pergerakan semacam Mr. Iskaq. Ternyata kepercayaan terhadap Mr. Besar sebagai calon residenlah yang tepat didukung oleh mosi KNI Daerah Pekalongan tanggal 12 September. Sembilan hari kemudian Jakarta mengesahkan pengangkatan Mr. Besar.²¹ Bagaimanapun juga keterlambatan ini menimbulkan berbagai penafsiran di kalangan perjuangan. Mereka menduga Jakarta meragukan sejauh mana Mr. Besar memihak republik. Kecurigaan itu timbul karena keinginannya untuk berkompromi dengan residen Jepang mengenai masalah bendera. Dalam suasana kecurigaan, desas-desus dan sentimen anti Belanda, gaya hidup Mr. Besar yang dianggap agak kebarat-baratan dan sikap menyendiri juga disalah tafsirkan. Namun di kalangan perjuangan Tegal umumnya beranggapan bahwa tidak diangkatnya Mr. Besar lebih awal karena pemerintah pusat “meragukannya memimpin gerakan kemerdekaan di karesidenan ini.”²²

Kata sepakat antara kaum nasionalis dan pangreh praja di Jakarta hanya mungkin dicapai berkat kedudukan kaum nasionalis moderat tua yang telah berkolaborasi dengan Jepang dan mayoritas dalam kabinet pertama republik. Di Tiga Daerah, kaum nasionalis tua itu justru radikal yang tidak pernah ikut memegang kekuasaan. Bila sebagian dari mereka pernah memasuki organisasi-organisasi Jepang, mereka tidak melibatkan diri dalam pelaksanaan politik ekonomi rakyat Jepang masa perang. Mereka menyadari amat pedihnya nasib rakyat karena politik itu. Karena itu penyerahan kekuasaan di akhir September 1945 tidak mampu mencegah polarisasi yang semakin jauh antara gerakan revolusioner dan pangreh praja. Polarisasi ini

²⁰ Koesnodiprodo, (penyunting). Himpunan Undang-undang, Peraturan-peraturan, penetapan-penetapan pemerintah Republik Indonesia, 1945 (Jakarta 1951), hlm. 88.

²¹ "Mosi Komite Nasional Daerah Pekalongan". Saya berterima kasih kepada Mr. Besar untuk dokumen-dokumen lain dari KNI Pekalongan (selanjutnya disebut Dokumen Mr. Besar).

²² Surat dari Sekretaris Negara A.G. Pringgodiprodo kepada Dr. Sumbaji, ketua KNI Pekalongan, tertanggal 21 September 1945, Dokumen Mr. Besar (arsip)

mencerminkan tiga kenyataan setempat. Pertama, kaum nasionalis tua tidak berada dalam kekuasaan seperti rekan-rekannya di Jakarta. Kedua, pengelakan Jepang atas kekalahannya dengan Sekutu, dan Ketiga, keraguan di kalangan beberapa pihak terhadap proklamasi. Semakin terisolirnya karesidenan itu dari Jakarta dirasakan oleh semua kelompok. Pangreh praja yang tidak tahu apa yang harus diperbuat karena ketiadaan instruksi-instruksi dari atasan, bertingkah laku sangat hati-hati dan selaku birokratis serta menaati perintah-perintah atasan yang tak kunjung tiba.

C. Kerusuhan di Karesidenan Pekalongan Pada Awal Kemerdekaan

Di sekitar bulan Oktober 1945, masyarakat di daerah Karesidenan Pekalongan dikejutkan oleh pergolakan rakyat yang mengadakan gerakan pemberhentian pejabat pemerintah setempat secara paksa. Gerakan ini terkenal dengan "aksi pendaulatan". Yang menjadi sasaran aksi ini terutama para lurah, camat, wedana, bupati atau pejabat pemerintah lainnya. Secara beramai-ramai para pendukung aksi datang ke tempat korban untuk menangkap dan mengadilinya. Setelah segala kesalahan dituduhkan, si korban dinyatakan diberhentikan dari jabatannya dan penggantinya segera ditunjuk. Bagi yang bernasib sial, bukan jabatannya saja yang dicopot, tetapi nyawanya ikut dihabisi pula. Biasanya aksi ini dilancarkan dengan dibarengi keributan dan kerusuhan. Sesungguhnya keributan semacam ini melanda hampir di berbagai tempat, termasuk beberapa tempat di Karesidenan Pekalongan.

Kerusuhan yang paling menonjol yang terjadi di Karesidenan Pekalongan ini adalah yang melanda di tiga daerah kabupaten, yaitu Kabupaten Tegal, Brebes, dan Pemasang. Di ketiga daerah yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah bagian barat ini, kericuhan-kericuhan semacam ini banyak membawa korban.

Untuk memahami latar belakang gerakan yang bersifat spontan dan kompleks ini, beberapa dari peristiwa itu perlu dikemukakan. Dikarenakan sifatnya yang spontan dan massal, sulitlah untuk menentukan secara pasti tempat awal terjadinya kericuhan tersebut, namun dapat diduga dimulai dari daerah Tegal selatan, terutama daerah di sekitar pabrik gula. Daerah pedesaan

di sekitar Slawi, Adiwerna dan Lebaksiu rupanya banyak memiliki peranan pada masa awal meletusnya kerusuhan ini.

Kurang lebih beberapa bulan sesudah proklamasi, yaitu sekitar awal Oktober 1945, pedesaan di daerah Slawi dan sekitarnya dihebohkan oleh datangnya gelombang kerusuhan. Kelompok massa beramai-ramai datang ke berbagai kelurahan untuk menangkap lurah-lurah yang telah terdaftar sebagai sasarannya. Mereka diseret ke "pengadilan massa" dan sebagian dijatuhi hukuman mati, dibantai para perusuh. Sementara itu sejumlah gudang atau lumbung padi dirampok dan sebagian ada yang dibakar.²³ Pada waktu yang bersamaan, massa perusuh juga bergerak masuk ke Kecamatan Adiwerna dan Lebaksiu. Dengan bersenjata bambu runcing dan golok, mereka datang ke tempat kediaman camat setempat. Camat di kedua tempat itu tidak sempat meloloskan diri, terkepung dan akhirnya tertangkap. Dengan suara riuh sang camat diarak ke balai kecamatan untuk diadili. Segala kesalahan sewaktu ia menjabat dituduhkan kepada dirinya. Tanpa memiliki kesempatan untuk membela diri, camat ini dijatuhi vonis tidak saja dilepas dari jabatannya, melainkan juga harus menebusnya dengan nyawa. Keduanya meninggal dalam arakan bambu runcing.

Sesudah itu massa yang membawa kerusuhan ini bergerak ke arah Pabrik Gula Slawi dan Pangkah. Semua orang Belanda, yang semula bekerja di perusahaan gula tersebut, ditangkap dan diangkut ke sebuah tempat penahanan. Kemudian selang beberapa hari berikutnya, semua orang Belanda tahanan ini dikeluarkan dan oleh sekelompok orang dibawa ke suatu tempat untuk dibantai. Kerusuhan semakin meningkat pada bulan berikutnya. Aksi-aksi dilancarkan dan mulai diarahkan ke dalam kota (dalam hal ini Tegal). Pada awal November, massa yang tengah bergejolak datang dari arah selatan menuju pusat kota Tegal.²⁴ Mereka disebutkan berjalan dalam barisan yang panjang sambil membawa senjata bambu runcing, golok, pedang atau senjata tajam lainnya. Sambil bersorak-sorai mereka juga terdengar mengucapkan

²³ Lihat Bijl. Nefis Periodies No. 2,4 Maret 1946, Proc. General 36. Di dalam laporan disebutkan bahwa kerusuhan ini terjadi pada akhir September 1945. Tetapi menurut pengamatan kami melalui penelitian ke lapangan, peristiwa itu baru mulai terjadi pada awal bulan Oktober.

²⁴ Lihat Suprpto, Tegal dari Masa ke Masa (Kementrian PP dan K, 1959), hal. 62.

takbir. "Allahu Akbar, Allahu Akbar".²⁵ Massa yang tidak sedikit jumlahnya itu kemudian bergerak menuju ke rumah pejabat-pejabat penting.

Salah satu sasarannya yang pertama ialah Bupati Tegal, R. Soenaryo. Ia beruntung sempat melarikan diri ke Semarang beberapa waktu sebelumnya. Tetapi malang bagi keluarga yang ditinggalkannya, mereka dijadikan gantinya. Rupanya para perusuh menjadi penasaran setelah tahu bupati telah melarikan diri dan ibunya, Kardinah (adik RA. Kartini) ditangkap. Keduanya kemudian diberi pakaian goni dan selanjutnya diarak keliling alun-alun dan kota, sambil dicaci maki.

Selain penangkapan secara paksa itu, juga dilancarkan aksi penculikan. Tak sedikit pejabat yang diculik dan ditawan di sebuah tempat di luar kota. Tak sedikit diantaranya juga ada yang hilang selama-lamanya, karena dibunuh. M.M. Singgih (jaksa) dan Abubakar (hakim) hilang dibawa penculik. Kedua orang yang semula tukang ketok-ketok palu pengadilan ini agaknya termasuk sasaran utama pula, sehingga mereka 'diamankan'. Beberapa orang juga mengalami nasib yang sama.

Aksi pendaulatan juga terjadi di daerah Pemalang. Kerumunan massa juga datang dari arah pedesaan bagian selatan dari kabupaten ini, terutama yang berbatasan dengan bagian selatan Kabupaten Tegal tempat awal aksi ini dimulai. Tidak berbeda dengan yang terjadi di Tegal, di daerah ini para pendukung gerakan melakukan aksi pemberhentian lurah dan juga sebagian camat. Gelombang huru-hura ini akhirnya juga menuju Kota Pemalang. Dalam keriuhan massa yang tidak sedikit jumlahnya, salah seorang pejabat pemerintah di kota tersebut menjadi korban. Ia disergap dan dibunuh beramai-ramai di tempat itu pula. Para pendukung aksi juga mengejar pejabat lainnya, suasana begitu menakutkan. Banyak pejabat yang meloloskan diri sebelum massa datang dan menangkapnya.

Di daerah Brebes, yang terletak disebelah barat Kabupaten Tegal, aksi pendaulatan juga terjadi di berbagai desa, baik disekitar pabrik gula di bagian selatan kabupaten ini atau di daerah lainnya. Di kota Brebes ketegangan terjadi sewaktu sejumlah pejabat teras pemerintahan kabupaten tersebut diculik. Bupati Sarimin Reksodiharjo, Patih Palal Pranoto, dan sejumlah wedana

²⁵ *Ibid.*

(antara lain Slamet Wedana Tanjung dan Soedirman Danoewilogo, Wedana Brebes) adalah orang yang diculik dan dibawa ke suatu tempat di Tegal Selatan.²⁶ Orang-orang Belanda di perusahaan gula di Banjarnegara-Brebes Selatan- juga jadi sasaran. Mereka ditangkap dan disekap sebagai tawanan. Agaknya pendukung aksi yang ada di daerah ini tidak berdiri sendiri, mereka ada dalam satu jaringan kegiatan. Setelah tawanan Belanda yang ada di Tegal dibunuh, tak lama kemudian semua tawanan yang ada di daerah Brebes pun mengalami nasib yang sama pula.

Akibat aksi-aksi pendaulatan, timbullah kekosongan kekuasaan. Pemerintahan boleh dikatakan lumpuh. Alat keamanan tak berdaya, dan alat pemerintah lainnya hampir tak berfungsi lagi. Ini terjadi karena banyak jabatan pemerintahan yang kosong. Dalam keadaan darurat pengisian lowongan jabatan itu segera dilakukan (sekalipun tidak menurut prosedur administratif yang legal-rasional sebagaimana mestinya). Satu hal yang menarik, bahwa dua jabatan bupati di Tegal dan Brebes diisi dengan menunjuk pemuka agama yang berpengaruh di daerah masing-masing. Kiai Abu Sudjai, pemuka agama yang berasal dari desa Pacul di Tegal Selatan, ditunjuk menjadi Bupati Tegal, dan Kiai Syatori ditunjuk untuk menjadi Bupati Brebes. Hanya di Pemalang jabatan bupati dipegang orang yang bukan pemuka agama, yaitu Supangat, bekas mantri kesehatan. Baru kemudian setelah kericuhan di daerah ini berakhir, jabatan bupati dipegang oleh seorang kiai, pemuka agama setempat yang berpengaruh.

Sementara itu hubungan antar daerah menjadi tegang dan putus. Timbullah situasi saling mencurigai. Demikian pula hubungannya dengan pemerintahan karesidenan di Pekalongan juga menjadi putus dan penuh ketegangan. Lalu lintas terhambat, karena ditiap perbatasan kabupaten, terutama antara Kabupaten Pekalongan dengan daerah yang sedang bergejolak itu, terdapat penjagaan yang ketat. Masing-masing daerah mencurigai orang yang masuk dari daerah lain. Ketegangan semacam ini juga terdapat di masing-masing daerah yang bergolak.

²⁶ Tempat dan keberadaan tawanan di daerah Tegal tergambar dalam sebuah catatan kenang-kenangan dari Soedirman Danoewilogo, salah seorang korban penculikan. (arsip)

Ketegangan dan kecurigaan tersebut sesungguhnya adalah sebagai akibat logis dari lenyapnya hubungan yang komunikatif antar daerah. Tiap daerah mencoba untuk menjaga daerah masing-masing. Sementara itu muncul kekuasaan dari 'dunia bawah tanah', yaitu para gerombolan bandit yang memegang peranan dalam melakukan aksi kekerasan.

Peranan Lenggong (Bandit)

Salah satu kelompok sosial yang berperan dalam perkembangan politik dan memainkan peranan penting sebelum Oktober 1945, adalah para 'bandit' atau lenggong. Mereka mempunyai kedudukan - kedudukan yang istimewa di mata masyarakat baik karena kebajikannya maupun kejahatannya, suatu campuran antara pemenuhan kewajiban kesejahteraan sosial dan religio-mistisnya dengan perampokan dan pemerasan yang mereka lakukan. Sedang kelompok lain yaitu pokrol bambu yang bekerja untuk membantu orang-orang lemah yang hak-haknya dilanggar dan membantu di pengadilan demi kepentingan orang miskin.

Arti lenggong dipergunakan dalam istilah yang berbeda-beda. Mereka dianggap mempunyai 'derajat' tertentu di mata penduduk setempat karena tingkat pengetahuan (*ngelmu*) yang hanya dikuasai oleh orang-orang terbatas saja atau '*kanuragan*' dan kekuatan magis (*kesakten*) yang diberikan oleh *ngelmu* itu. Melalui hal-hal inilah para lenggong bisa mencapai berbagai tingkat kekebalan dan semacam kesucian.²⁷

Masyarakat petani setempat memandang lenggong dengan rasa segan, takut, dan takjub. Priyayi dan penguasa kolonial, menyebutnya sebagai kecu, garong, dan begal walaupun ada ketergantungan tertentu pada mereka. Belanda di Comal menjulukinya 'anggaok', artinya burung gagak (pemakan bangkai). Bagi penduduk pribumi, mereka dipandang sebagai jago, pendekar, atau sang juara, sebutan yang menunjukkan tingginya status mereka di dalam kehidupan pedesaan.

²⁷ Onghokham, "*Resicency of Madiun* (Thesis Phd, Yale University) lihat juga A.J. Stockwell, *British Policy and Malay Politics during the Malayan Union Experiment, 1942-1948* (Kuala Lumpur, 1978), Bab 8, mengenai kekuasaan politik dan sifat magis-spiritual dari kultus di dalam kehidupan pedesaan di Malaysia sesudah Perang Dunia II.

Seorang nasionalis dari Kewedangan Comal, yang mana terdapat banyak lenggaong, melukiskannya sebagai berikut :

Kalau pencuri hampir setiap desa ada orang yang kerjanya mencuri, tetapi lenggaong tidak mesti. Lenggaong adalah orang yang kuat fisik dan punya ilmu-ilmu (*ngelmu*) dalam, untuk lenggaong memerlukan waktu lama belajar sifat dan ilmu-ilmu dalam. Dan kalau sudah mendapat sebutan lenggaong nafkah hidupnya bukan dari mencuri, tetapi dari orang lain yang memerlukan perlindungan keamanannya. Pada jaman penjajahan umunya disegani oleh rakyat sebab tindakannya tidak mengganggu rakyat, dan yang diganggu adalah aparat Belanda atau kalau rakyat yang diganggu biasanya *tuan tanah*.²⁸

Kadang-kadang seorang lenggaong mempelajari silat dari pesantren, dan kembali ke desanya dan sedikit pengetahuan tentang kata-kata Arab. Di mata rakyat ia memiliki pengetahuann keagamaan yang tinggi dan ilmu kanuragan, sehingga badannya kebal terhadap senjata, berilmu siluman, yaitu kepandaian seseorang untuk bisa memasuki dan meninggalkan rumahnya tanpa diketahui orang lain. Adanya unsur-unsur magis religius yang kuat di daerah pedesaan Islam menyebabkan tidak sedikit kiai-kiai di desa-desa Karesidenan Pekalongan yang dipuja-puja karena ilmunya.

Salah seorang tokoh kelompok ini yang namanya cukup menonjol dalam pergerakan adalah Kutil. Ia dikenal juga dengan nama lain Syahyani, seorang bekas pemangkas rambut berasal dari Desa Talang, di sebelah selatan Kota Tegal. Namanya tenar sebagai algojo dan pemimpin dari "Pemuda Istimewa" yang terdiri dari para bandit. Ia dan kelompoknya banyak disebut-sebut dalam pembunuhan para pejabat yang mereka tuduh sebagai mata-mata Nica atau Belanda. Dalam masa yang kacau itu ia sempat menjadi Kepala Kepolisian Daerah tersebut, sekalipun ia tidak tahu baca tulis.

Perlu diketahui bahwa dalam situasi yang kacau dan kosong akan kekuasaan itu, lahirlah pembentukan apa yang disebut Badan Pekerja Tiga Daerah, yang berpusat di Tegal. Adapun anggotanya terdiri dari para pemuka agama di Tegal, Pemalang, dan Brebes. Dikatakan juga bahwa tujuan badan pekerja ini adalah untuk menanggulangi masalah pemerintahan dan

²⁸ *Ibid.*

perjuangan daerah tersebut. Ada tanda-tanda bahwa dalam pembentukan dan kegiatan badan pekerja ini ada hubungan erat dengan tokoh-tokoh di pusat. Tokoh Kamijaya yang selalu ikut dalam kegiatan badan pekerja ini ditengarai sebagai pegikut Amir Syarifuddin. Sementara itu dari kesembilan anggota badan pekerja tersebut, beberapa diantaranya adalah orang-orang ex-Digulis, yang merupakan aktivis radikal dari kelompok ini. Hubungan Kamijaya dengan orang-orang yang terakhir ini cukup erat, sedangkan dengan yang lainnya tidak jelas. Peranan Kamijaya rupanya cukup penting dalam kegiatan badan pekerja tersebut.

Langkah akhir dan yang terpenting dari tindakan badan pekerja ini ialah tuntutan tentang penggantian Residen Pekalongan menurut yang mereka kehendaki. Perlu dikemukakan bahwa pada waktu meletusnya pergolakan itu Residen Pekalongan yang lama, Mr. Besar telah meninggalkan kantornya, sehingga jabatan residen tersebut kemudian diisi oleh R. Suprpto. Dengan munculnya tuntutan semacam itu maka pemisahan antara daerah Kabupaten Pekalongan yang ada di sebelah timur, dengan ketiga daerah yang sedang bergolak yang ada di sebelah barat menjadi semakin jelas. Dengan melalui berbagai cara akhirnya Badan Pekerja Tiga Daerah dapat memaksakan tuntutannya untuk mengganti Residen Pekalongan, dengan orang yang telah disiapkan, yaitu Sardjio. Tokoh yang ditunjuk ini berasal dari Purworejo, yang pada masa sebelum kemerdekaan dikenal sebagai anggota PKI. Pada tanggal 11 Desember 1945, rombongan dari Badan Pekerja Tiga Daerah, datang di Pekalongan beserta pejabat residen yang telah dipersiapkan itu. Mereka berhasil masuk ke karesidenan, sementara pejabat residen yang lama, R. Soeprpto telah meninggalkan kantornya.

Kehadiran mereka, menimbulkan reaksi keras dari kalangan masyarakat di Pekalongan terutama golongan Islam. Rencana penangkapan Sardjio dan kawan-kawannya telah dipersiapkan. Pada waktu Sardjio berada di Pekalongan, telah terjadi penyergapan atas dirinya. Peristiwa itu terjadi ketika ia dan kawan-kawannya akan mengadakan rapat di Kedungwuni. Ia nyaris tertembak, tetapi justru Kamijaya yang selalu mendampingi yang terkena tembakan tersebut. Pada akhirnya Sardjio, Kamijaya dan lainnya berhasil ditangkap sewaktu akan kembali ke kantor karesidenan. Mulai saat itu

pula usaha penyerangan ke wilayah Tiga Daerah dilakukan. Pasukan Hisbullah dan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) menyerang daerah tersebut secara cepat. Semua tawanan dibebaskan, dan semua orang yang terlibat dalam peristiwa itu ditangkap, dan kemudian ditawan di Pekalongan. Tiga puluh dua orang diantaranya dikirim ke Yogyakarta untuk ditawan. Enam dari mereka kemudian diadili di Pekalongan, April 1947.²⁹ Di samping itu, Kutil, yang terkenal sebagai algojo, juga diadili dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Penataan kembali pemerintahan setempat segera dilakukan. Sebagian pejabat ada yang bisa terus menduduki jabatannya, sedangkan yang lainnya diganti. Suatu hal yang menarik ialah bahwa dalam penataan kembali daerah yang baru bergolak itu, banyak pemuka agama yang berpengaruh disana diangkat untuk menjabat pemerintahan setempat, baik jabatan bupati maupun wedana.³⁰ Dengan dipulihkannya kembali keamanan dan jalan pemerintahan setempat, maka pergolakan daerah atau lebih dikenal dengan Peristiwa Tiga Daerah telah berakhir.

Latar belakang pergolakan daerah dapat dikatakan bahwa pergolakan-pergolakan itu timbul sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang sedang terjadi dalam skala nasional. Pergolakan daerah dapat diartikan sebagai reaksi terhadap perubahan yang sedang terjadi. Mengingat sifatnya yang lokal, maka pergolakan-pergolakan ini sering disebut sebagai suatu "revolusi sosial".³¹ Sebagaimana lazimnya suatu revolusi sosial, maka pergolakan ini juga memiliki sifat-sifat yang kompleks dan multi-faset. Sebagai suatu peristiwa lokal pergolakan tersebut juga menunjukkan keanekaragaman, pencerminan, disamping memiliki sifat-sifat umum juga memiliki sifat-sifat khusus menurut lingkungan daerah masing-masing, tempat pergolakan itu lahir.

²⁹ Periksa Antara, *Dalam Negeri*, 27/3/1947, hal. 1 item 2; dan lihat pula Antara, *Dalam Negeri*, 19/3/1947, hal. 12., item 23.

³⁰ Kyai Abu Soedjai dan Kyai Syatori tetap menjadi Bupati Tegal dan Brebes. Kyai H. Makmur diangkat menjadi Bupati Pemalang menggantikan Supangat. Adapun beberapa pemuka agama yang diangkat menjadi Wedana dan camat adalah : Kyai H. Fachruri Wedana Slawi, Kyai H. Toha Camat Lebaksiu, Kyai H. Syirad Camat Magersari, Kyai H. Zainudin Camat Tarub dan H. Mawardi sebagai Camat Adiwerna

³¹ Lihat B.R.O Anderson, *Pemuda Revolution : Indonesian Politics 1945-1946*, (Ithaca Cornell University, 1967).

Salah satu sifat umum pergolakan ini antara lain ialah sifat protesnya, yang mirip dengan gerakan-gerakan yang terjadi pada zaman kolonial.³² Sifat protes mencerminkan suatu jawaban sosial terhadap arus perubahan yang datang dari tingkat permukaan nasional ke dalam lingkungan lokal. Tingkat respon sosialnya banyak sedikitnya ditentukan oleh derajat lokalitasnya. Bagaimana halnya dengan pergolakan yang ada di daerah pesisir itu.

Dari penampilan aksi-aksi yang dilancarkan dalam pergolakan tadi, dapatlah diketahui beberapa sifat yang terkandung di dalamnya. Diantaranya ialah sifat-sifat : (1) Anti golongan priyayi atau pamong praja (elite birokratis), dan semua yang dianggap telah mantap (*established*); (2) anti unsur-unsur asing, baik Belanda maupun Jepang; (3) dendam yang mendalam; (4) banyaknya kelompok sosial yang tersangkut di dalamnya; dan (5) politik. Sifat anti pamong praja atau priyayi sebagai golongan elite birokratis, tercermin dari aksi-aksi pendaulatannya. Hal ini jelas sekali bahwa aksi pendaulatan adalah merupakan awal dari pergolakan itu terjadi.

Peristiwa yang terjadi di Karesidenan Pekalongan itu ternyata bukanlah sekedar suatu bentuk kerusuhan yang semata-mata kriminal sifatnya, tetapi lebih dari itu, ia merupakan suatu jenis pemberontakan terhadap situasi. Bergolaknya massa adalah mencerminkan respons terhadap situasi lingkungan yang tengah berubah. Proklamasi dipandang sebagai lambang kebebasan dari segala ikatan. Ikatan politik kolonial, ikatan sosial-ekonomi dan kultur yang selama masa penjajahan membelenggunya dianggap harus lepas semuanya. Sesuai dengan ruang lingkupnya maka personifikasi berbagai ikatan itu ditemui dalam bentuk-bentuk nyata yang ada disekitarnya. Situasi konflik yang tercipta dalam hubungan tersebut juga disadari melalui personifikasinya. Personifikasi sifat-sifat kolonial dan feodal sering dicari di dalam diri para pelaksananya. Dalam hal ini para pemong praja dan pejabat pemerintah sering mewakilinya. Adalah wajar apabila para pamong praja dianggap sebagai personifikasi segala sifat pemerintah kolonial, karena memang yang paling dekat dapat dikenali dalam lingkungannya.

³² Mengenai sifat gerakan sosial pada masa sebelum kemerdekaan dapat dibaca dalam Sartono Kartodirdjo, *Protest Movement in Rural Java* (Oxford : Oxford University Press, 1973), "Agrarian Radicalism in Java; Its setting and Development", lihat juga Claire Holt (ed.), *Culture and Politics in Indonesia* (New York: Cornell University Press, 1972), halaman 100-115

Antipati terhadap golongan ini bersumber pada tindakan-tindakan mereka sebagai pelaksana pemerintahan yang korup dan sewenang-wenang. Berbagai sistem pemerintahan pada penjajahan yang langsung mengganggu hak milik akan tanah dan hasilnya merupakan sumber *latent* bagi timbulnya situasi yang konflik. Hal ini bisa dipahami karena tanah dan tanaman diatasnya merupakan sumber vital bagi kehidupan. Konflik-konflik di daerah *onderneming* gula pada masa itu juga bersumber pada pemilikan tanah yang dipergunakan oleh orang atau lembaga lain tanpa imbalan yang seimbang. Dengan kata lain apabila prinsip keseimbangan terganggu, maka terjadilah konflik.

Sumber konflik juga sering ditemui dalam sikap yang kurang tanggap terhadap situasi. Di dalam perubahan yang cepat dikehendaki kecepatan dalam menyesuaikan dengan tuntutan situasi baru. Kelambanan dalam menanggapi tuntutannya yang baru akan menempatkan diri ke dalam situasi konflik, karena ada dalam perbedaan nilai atau norma yang berbeda. Gambaran dalam pergolakan cukup menunjukkan tentang hal ini. Kekosongan situasi memang merupakan salah satu segi yang ikut menentukan bagi lahirnya suatu pergolakan, sekalipun hal itu terganggu pada volume kekosongannya. Dalam hal ini menarik pula munculnya kelompok “bawah tanah” yaitu kaum bandit yang ikut dalam pergolakan. Golongan ini sering memegang peranan dalam membuat keonaran dan tindakan-tindakan yang ekstrem. Untuk daerah pesisir banditisme rupanya telah lama ada terutama pada zaman penjajahan Belanda. Dalam masa revolusi, kelompok ini ikut ambil bagian pula. Pemerasan dan tindakan yang merugikan penduduk baik dilakukan perseorangan atau suatu sistem juga menjadikan sumber bagi lahirnya dendam untuk melakukan pembalasan sewaktu pergolakan terjadi. Diantara orang yang ikut terbunuh dalam kericuhan waktu itu juga ada yang dilandasi kebencian akan tindakan pemerasannya, baik sebagai pejabat maupun sebagai orang kaya di kota (*rentenir* dan sebagainya). Sikap feodal yang tercemar dalam gaya hidup priyayi menjadi sasaran utama untuk ditentang dan dijadikan korban. Satu segi lain yang menarik dalam pergolakan ini ialah diangkatnya pemuka agama dalam pemerintahan administratif. Ada petunjuk bahwa pengaruh pemimpin agama disini tampak lebih dibutuhkan

untuk menguasai situasi baru. Sejumlah kiai diangkat menjadi bupati, wedana dan camat untuk mengganti pejabat lama yang berasal dari masa penjajahan. Jelaslah bahwa dibutuhkan kepemimpinan baru, yang diharapkan sesuai dengan situasi baru itu. Dalam sejarah Indonesia tampilnya pergolakan semacam itu merupakan suatu gejala historis yang penting pula. Pengalaman dari peristiwa historis itu penting untuk dipahami agar dapat menentukan langkah-langkah di masa datang sehingga kesalahan dapat dihindari.

BAB IV

KERUSUHAN DI PEKALONGAN TAHUN 1995 - 1999

Indonesia sejak lama disadari mempunyai potensi konflik yang besar karena kemajemukan masyarakatnya. Kemajemukan yang dimiliki mudah untuk dieksploitasi menjadi sumber konflik antara lain agama, etnis, golongan (SARA). Pemerintah Kolonial Belanda memanfaatkan kondisi keragaman tersebut dengan baik, berdasarkan pengenalan yang mendalam atas masyarakat dan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah yang sekarang menjadi Indonesia. Politik adu domba menjadi senjata yang ampuh, yakni pemerintah Kolonial Belanda berhasil mengelola konflik yang ada di masyarakat untuk kepentingannya.

Begitu beragamnya suku, ras, dan agama membuat semakin rawan konflik horizontal, dan konflik kelompok dalam masyarakat. Sementara itu, begitu banyak kepentingan yang harus diurus secara institusi menyangkut kepentingan seluruh masyarakat menyebabkan konflik vertikal, antara masyarakat dan pemerintah juga cukup banyak. Kurun waktu antara tahun 1995-1999, struktur masyarakat Indonesia kembali mengalami masalah “pembelahan” sosial maupun politik atas dasar suku, agama, ras maupun golongan. Dalam konteks lokal, “pembelahan” juga terjadi di kota Pekalongan, Jawa Tengah. Pembelahan diperlihatkan oleh kecenderungan kembalinya politik aliran pada masa transisi politik sebagai sebuah identitas, baik politik maupun sosial.

Pada bab ini, secara umum akan dibahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusuhan sosial di Pekalongan kurun waktu 1995-1999. Cakupannya meliputi apa latar belakang munculnya kerusuhan, faktor pemicu, kronologi, pola kerusuhan, dan penyelesaian yang dilakukan.

A. Kerusuhan Tahun 1995

Kerusuhan pada tanggal 24 November 1995 dipicu oleh adanya penyobekan kitab suci Al Qur'an yang dilakukan oleh seorang warga etnis Tionghoa. Menurut laporan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang

dilakukan pihak Kepolisian Pekalongan, penyobekan kitab suci tersebut dilakukan pada tanggal 22 November 1995, sekitar pukul 05.15 WIB. Peristiwa penyobekan kitab suci Al Qur'an itu dilihat oleh beberapa saksi, setidaknya dari berita acara milik kepolisian yang mengetahui peristiwa tersebut ada lima orang.¹ Beberapa saat setelah kejadian, beberapa orang berkumpul dan mengetuk pintu rumah di jalan Hayam Wuruk No. 230, namun kemudian berkembang menjadi sebuah kerusuhan. Semakin siang massa yang berkumpul semakin banyak, petugas kepolisian pun mulai berdatangan dan mengamankan lokasi kejadian, namun pintu rumah tersangka penyobek kitab suci tersebut telah dijebol oleh massa.

Dua hari setelah penyobekan Al Qur'an, yakni pada hari Jum'at tanggal 24 November 1995, usai shalat Jum'at, kerusuhan melanda Pekalongan. Ratusan jamaah masjid dari segala penjuru, bergerak menuju rumah di jalan Hayam Wuruk No. 230, tempat kejadian penyobekan Al Qur'an. Toko Siswa (rumah keluarga penyobek Al Qur'an) dijebol oleh massa. Kendaraan berupa sebuah vespa dibakar di luar rumah, barang-barang yang berada di dalam rumah dikeluarkan dengan paksa oleh massa. Massa tidak membakar rumah tersebut, karena di kiri kanan adalah rumah-rumah warga pribumi.² Sejumlah toko dipaksa tutup atau dengan niat dari pemilik toko sendiri menutup tokonya, dan pada pintu atau dinding ditempel tulisan "milik pribumi".

a. Kronologi Kerusuhan

Hari Rabu, tanggal 22 November 1995, pukul 05.15 WIB, terjadi penyobekan Al Qur'an di toko Sinar Matahari jalan Hayam Wuruk No. 230, Pekalongan. Pelaku seorang warga etnis Tionghoa, bernama (JST), umur 42 tahun yang menderita sakit jiwa. Kejadian tersebut disaksikan oleh sekitar lima orang warga pribumi.

Kejadian di pagi hari tersebut mengundang kemarahan masyarakat Pekalongan. Massa berusaha untuk membawa pelaku dan minta

¹ *Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Polri Wilayah Pekalongan, tahun 1995 bandingkan dengan "Pekalongan", dalam Mohtar Mas'ood, dkk. (ed.), Kekerasan Kolektif Kondisi dan Pemicu (Yogyakarta: P3PK UGM, 2001), halaman 249.*

² *Mohtar Mas'ood, dkk. (ed.), ibid., hlm. 250.*

pertanggungjawaban keluarga pelaku. Akan tetapi keluarga pelaku menolak, dan memberi informasi kepada masyarakat kalau pelaku seorang yang sakit jiwa. Keluarga pelaku juga menelpon polisi. Massa yang berkumpul di sekitar tempat kejadian bertambah banyak, orang mulai menggedor-gedor rumah pelaku, sehingga pintu rumah jebol. Situasi berhasil dikendalikan ketika polisi datang mengamankan tempat kejadian. Pihak kepolisian memanggil dan menanyai para saksi yang melihat penyobekan Al Qur'an.

Hari Rabu, 22 November 1995, pukul 21.00 WIB, masyarakat Pekalongan melampiaskan kemarahannya dengan cara melempari rumah-rumah milik etnis Tionghoa. Pada peristiwa tersebut, pura dan gereja juga menjadi sasaran amuk massa. Hari Kamis, 23 November 1995, pukul 10.00 WIB., masyarakat kembali melakukan tindak pengrusakan, yang menjadi sasaran adalah SMA Masehi.

Hari Jum'at, 24 November 1995, usai shalat Jum'at, massa kembali berarak menuju rumah pelaku, dan sebuah rumah milik keluarga pelaku dijebol oleh massa. Petugas dibantu dari ormas Islam berhasil mengendalikan situasi.

b. Detail Peristiwa

Hari Rabu, tanggal 22 November 1995, sekitar pukul 19.00 WIB, massa mulai turun ke jalan. Aparat keamanan yang telah bersiap sejak muncul peristiwa penyobekan Al Qur'an, dengan cara memblokade jalan Hayam Wuruk tidak berhasil menahan gerak warga masyarakat. Massa berjalan sambil melempari toko-toko milik warga etnis Tionghoa. Gema takbir mengiringi laju para demonstran. Lokasi yang menjadi sasaran amuk massa adalah sepanjang Jalan Hayam Wuruk, Jalan Cipto Mangunkusumo, Jalan Sudirman, Jalan Wahidin, Jalan KH Mansyur, Jalan Merdeka, dan Jalan Sultan Agung. Toko-toko di sepanjang jalan tersebut hancur berantakan. Beberapa kendaraan yang diparkir di jalan-jalan itu juga hancur, diamuk massa.³

Peristiwa yang berawal di dalam kota tersebut, kemudian juga menjalar ke luar. Pabrik tekstil Lokatek yang terletak di Pekalongan Barat, tidak

³ Gatra, 2 Desember 1995

luput dari aksi amuk massa. Pabrik dirusak, dan sebuah bis perusahaan dibakar. Pabrik tekstil lainnya yang dijadikan sasaran adalah pabrik tekstil Kismatik, namun kerugian yang diderita tidak separah di Lokatek. Di daerah Pekalongan Timur, aparat keamanan menemukan bom Molotov beserta hulu ledak. Peristiwa amuk massa di Pekalongan itu berlangsung sekitar empat jam. Peristiwa tersebut bersifat spontan dan berada di luar kendali.

c. Penanganan Kasus

Tanggal 22 November 1995, aparat kepolisian datang ke tempat kejadian, beberapa saat setelah mendapat laporan. Aparat kepolisian yang hanya beberapa orang tersebut, akhirnya meminta bantuan tambahan personil, setelah massa mulai beringas. Bantuan personil dari pihak kepolisian cukup membantu menangani masalah, setidaknya arus lalu lintas yang mulai macet dan kacau bisa dikendalikan, juga massa yang berjubel mulai dikendalikan. Kepolisian juga memanggil para saksi mata, juga keluarga si pelaku. Pelaku sendiri kemudian dikirim ke rumah sakit.

Sekwilda, pada hari yang sama, yakni Rabu, 22 November 1995, mengadakan pertemuan dengan Kepala Kandep. Agama setempat untuk membahas masalah yang terjadi di Jalan Hayam Wuruk dan mencari jalan keluar. Hasil yang diperoleh dalam pertemuan tersebut adalah ormas Islam dan para alim ulama perlu diajak bermusyawarah agar kasus tersebut tidak berkembang menjadi lebih parah. Pertemuan dilakukan pada pukul 13.00 WIB.

Langkah koordinasi ditempuh oleh pihak kepolisian dengan mengundang para ulama, ormas Islam, dan instansi terkait untuk menangani masalah tersebut. Hasil yang didapat dari pembicaraan beberapa unit tersebut antara lain adalah bahwa pelaku pengrusakan diproses secara hukum; aktif melakukan penjagaan demi keamanan wilayah; dan membuat naskah kutbah Jum'at untuk dibacakan pada tanggal 24 November 1995. Aparat keamanan, melakukan tindakan pencegahan agar kejadian itu tidak meluas sampai ke luar daerah Pekalongan. Penjagaan cukup ketat dilakukan di jalan yang menuju arah Weleri dan Tegal. Dalam menangani masalah kerusakan tersebut Muspida dibantu oleh ormas-ormas Islam, para ulama, dan tokoh masyarakat.

Setelah kerusuhan, aparat kepolisian memanggil sekitar 80 orang warga untuk diminta keterangannya. Dari sekitar 80 orang saksi, 50 orang langsung diperbolehkan pulang dan 30 lainnya masih diminta keterangannya oleh pihak yang berwajib.

Korban kerusuhan tanggal 22 -24 November 1995⁴

Wilayah Pekalongan Timur dan Selatan

- Jl. Hasanudin : 4 ruko
- Jl. Blimbing : 6 rumah + 1 Gereja GKRI
- Jl. Patiunus : 3 rumah
- Jl. H. Agus Salim : 3 rumah
- Jl. Semarang : 3 ruko
- Jl. Dr. Cipto : 2 toko + 13 ruko
- Jl. Wahidin : 9 rumah + 1 Gereja Baptis
- Jl. Sutomo : 9 toko
- Jl. HOS. Cokroaminoto : 1 toko
- Jl. Kartini : 1 ruko + 8 rumah
- Jl. KH. Wahid Hasyim : 1 ruko
- Jl. Melati : 2 rumah
- Jl. Singkarak : 1 Gereja Pemberitaan Injil
- Jl. Teratai : 1 Vihara

Wilayah Pekalongan Barat dan Utara

- Jl. Merdeka : 4 ruko
- Jl. Sejahtera : 2 rumah
- Jl. Kemakmuran : 2 rumah
- Jl. Kusuma Bangsa : 7 rumah
- Jl. WR. Supratman : 1 rumah
- Jl. KHM. Mansur : 12 ruko
- Jl. Jenderal Sudirman : 3 ruko
- Jl. Dharma Bakti : 1 rumah
- Jl. Gadjah Mada : 7 ruko
- Jl. Sulawesi : 2 rumah

⁴ "Laporan Situasi Daerah, tanggal 23 Nopember 1995". Koleksi Arsip Daerah Pekalongan, 1995

- Jl. Veteran : 1 rumah
- Jl. Angkatan 45 : 1 gereja

Disamping pengrusakan bangunan (rumah, ruko, toko, gereja, dan vihara), juga ada pengrusakan dan pembakaran terhadap kendaraan, jumlah sebagai berikut.

- Pengrusakan mobil kijang : 1 buah
- Pengrusakan mobil carry : 1 buah
- Pengrusakan bus : 1 buah
- Pembakaran mobil : 1 buah
- Pembakaran sepeda motor : 2 buah

d. Refleksi

Menyikapi dan mengkaji masalah konflik sosial yang terjadi di Pekalongan yang menjurus pada “amuk massa” mencerminkan watak dan karakter masyarakat Pekalongan yang spontan, terus terang, dan temperamental. Secara teoritis, protes sosial, kerusuhan maupun konflik selalu berhubungan dengan ledakan kekerasan. Kekerasan itu menurut Eisendadt selalu ada dimana dalam hubungan antar manusia. Oleh karena itu perlu diatur didasarkan pada suatu peraturan dan transformasi simbolis dari kekerasan dan agresi.⁵ Berbeda dengan kejahatan adalah bentuk dari apa yang disebut “kegaduhan sibernetic” yaitu yang menandakan adanya gangguan gangguan pada hubungan yang tertib di antara setiap pelaku atau sistem dan lingkungan. Kekerasan dan kejahatan ini dapat menyatu dalam bentuk kebrutalan apabila didukung oleh kelompok dalam jumlah besar, maka aksi kebrutalan inilah yang disebut “amuk massa”.

Kasus “amuk massa” yang melanda daerah Pekalongan pada bulan November 1995 berpangkal pada kondisi ekonomi, agama, dan kultur yang ada di masyarakat. Kerusuhan tanggal 22 - 24 November 1995 dipicu oleh pelecehan agama. Menurut seorang informan, di Pekalongan masalah yang ada hubungannya dengan agama itu sifatnya sangat sensitif, mudah tersulut apabila terjadi sedikit penyimpangan.⁶ Sebagai daerah yang mayoritas

⁵ S. N., Eisendadt, *Revolusi dan Transformasi Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1986) hlm. 87.

⁶ Wawancara dengan Sanusi, tanggal 10 Juni 2003 di Pekalongan.

penduduknya beragama Islam dan memiliki banyak pondok pesantren, masyarakat Pekalongan dikenal sebagai masyarakat yang Islami. Oleh karena itu masalah-masalah sosial yang menyentuh moral dan nurani warga cepat mendapat respon dari masyarakat. Berkaitan dengan masalah agama Islam, di daerah Pekalongan terdapat atau berkembang sebuah aliran yang sifatnya sangat eksklusif.⁷ Aliran tersebut tidak mau menjadi *makmum*, apabila yang menjadi imam orang yang berasal dari luar kelompoknya. Aliran tersebut pernah dilarang, namun pada tahun 1995 aliran tersebut muncul lagi.

Kondisi ekonomi juga berpengaruh terhadap perilaku kerusuhan yang terjadi di Pekalongan. Di Pekalongan, banyak aktivitas bisnis yang dipegang oleh kaum pribumi. Kondisi kewirausahaan warga pribumi sebagai pemegang kendali ekonomi di wilayah yang terkenal dengan julukan “kota santri” tersebut mulai goyah sekitar tahun 1970 an. Para pengusaha batik di Pekalongan (sebuah sebutan untuk menggambarkan kondisi ekonomi dan agama para pemegang kendali dalam bidang batik adalah sebutan *wong kaji*), dari masa kolonial dikenal sebagai pengusaha yang ulet, kreatif, dan inovatif. Kondisi seperti itu pada awal tahun 1980 an eksistensinya mulai diambil para pengusaha Cina (Tionghoa), sehingga keberadaan para pengusaha pribumi mulai surut. Awal tahun 1980 an di wilayah tersebut terjadi pergeseran “pemegang kendali ekonomi” dari pribumi ke non pribumi (Cina atau Tionghoa) yang *notabene* beragama Nasrani. Hubungan diantara mereka menjadi tidak “manis” karena pengaruh perilaku tertentu dari orang-orang Tionghoa yang menyebabkan mereka menjadi kelompok yang eksklusif.⁸ Kebiasaan yang eksklusif antara lain tercermin dalam tatacara kebaktian dengan menggunakan bahasa Mandarin

Mencermati obyek yang dijadikan sasaran massa dalam melampiaskan kemarahannya, dapat disimpulkan semua korban kerusuhan adalah milik warga etnis Tionghoa atau keturunan. Massa juga tidak melukai atau menjadikan manusia sebagai sasaran. Walaupun dalam bahasa lisan para pengunjung rasa sering melontarkan kata-kata yang intinya mengancam jiwa seseorang. Peristiwa tersebut tampak lebih mudah diidentifikasi dari sasaran

⁷ Mohtar Mas'oed, dkk (ed.), *op. cit.*, hlm.252-253.

⁸ *Ibid.*, hlm. 261.

kerusuhan. Massa tidak melakukan perusakan terhadap barang atau bangunan milik pribumi. Apabila dibuat kategorisasi, maka didapat tiga macam penggolongan, yakni, bangunan rumah, tempat ibadah dan toko atau pabrik (berkaitan dengan kegiatan ekonomi). Bangunan rumah jelas semua milik warga Tionghoa, begitu juga pabrik dan toko, sedangkan bangunan tempat ibadah adalah gereja dan vihara. Kedua bangunan tersebut, kebanyakan mempunyai umat yang berasal dari etnis Tionghoa.

B. Kerusuhan Tahun 1997

Sepanjang tahun 1997 realitas politik di Indonesia mencatat beberapa peristiwa penting. Sebagian peristiwa itu berupa unjuk rasa yang berakhir dengan kerusuhan, sebagian lagi berupa protes politik. Barangkali secara faktual beberapa peristiwa sejenis pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Demikian juga beberapa kerusuhan yang berlatar belakang SARA, kesenjangan sosial, konflik partai dan elite politik pernah terjadi sebelumnya. Namun banyak pihak yang berpendapat bahwa kerusuhan yang terjadi pada tahun 1997 memiliki makna khusus karena beberapa sebab. Pertama peristiwa tersebut terjadi menjelang Pemilu 1997, dan kedua beberapa kerusuhan menunjukkan pola yang cukup spesifik seperti dalam pola penanganan yang dilakukan aparat, pola perlawanan, variasi latar belakang, serta isu yang berkembang.⁹ Dalam konteks lokal, kota Pekalongan juga mengalami kondisi seperti itu.

a. Peristiwa 26 Maret 1997

Hari Rabu, tanggal 26 Maret 1997, ribuan massa mengamuk, sehingga menyebabkan kerusuhan massal yang menelan banyak kerugian. Massa membakar, melempar batu, memukul, dan mencoret-coret, serta mencaki maki tokoh-tokoh yang tidak disukai. Pada peristiwa tersebut, 60 toko rusak, 4 mobil dan 6 sepeda motor dibakar massa.¹⁰ Peristiwa tersebut dipicu oleh rencana pengajian akbar yang akan dilakukan Golkar di pesantren Buaran

⁹ Eep Saefullah, dkk., *Evaluasi Pemilu Orde Baru Mengapa 1996-1997 Terjadi Pelbagai Kerusuhan?* (Bandung: Mizan bekerja sama dengan Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI, 1997), halaman 113.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 131.

dengan mendatangkan Rhoma Irama dan Siti Hardiyanti (Mbak Tutut). Pekalongan, sejak lama sudah dikenal sebagai basis PPP. Warga menganggap pengajian yang akan dilakukan Golkar sebagai “pengajian politik”. Massa yang gelisah mengincar panggung di pesantren Buaran. Sebab kedua, lokasi dan waktu “pengajian politik” berdekatan dengan acara “halakah ulama PPP se Jawa Tengah”. Warga PPP menjadi jengkel, meskipun DPC dan DPW PPP setempat menolak pihaknya dianggap sebagai dalang kerusuhan.¹¹ Panggung yang akan dipakai sebagai tempat pengajian, diserbu dan dirusak oleh massa. Pengrusakan tersebut kembali melanda daerah Buaran pada hari berikutnya, dengan korban material semakin besar. Peristiwa tersebut juga menelan empat korban dengan luka terkena tembakan.

Senin, 10 Maret 1997 antara Pemda dengan ketiga kontestan Pemilu (PPP, Golkar, PDI), membuat suatu kesepakatan yang tidak tertulis, tentang penertiban bendera dan umbul-umbul OPP. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan menciptakan agar Pekalongan tampak indah, menjelang diadakannya penilaian penghargaan Adipura. Ketiga kontestan Pemilu sepakat untuk tidak memasang bendera dan umbul-umbul di tempat seperti tiang listrik, tiang telpon, monumen, dan taman kota.¹²

Hari Sabtu, tanggal 15 Maret 1997, di wilayah Pekalongan Barat dan Utara, aparat Pemda bersama dengan satgas dari ketiga kontestan Pemilu, melakukan penertiban bendera dan umbul-umbul OPP. Kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Bendera yang berhasil ditertibkan sebanyak 429 buah, dengan perincian, bendera PPP sebanyak 223, Golkar 184, dan PDI sejumlah 22. Acara serupa dilakukan di wilayah Pekalongan Timur dan Selatan, yang digelar pada tanggal 24 Maret 1997. Kegiatan tersebut semula berjalan lancar, namun sekitar pukul 13.00 WIB, bersamaan dengan penertiban bendera OPP di daerah Kradenan, suasana berubah menjadi keruh. Masalah mulai muncul karena di daerah yang tidak jauh dari Jalan raya Kradenan, yakni di pondok pesantren Al Qur'an, di Buaran beberapa orang sedang membuat panggung untuk acara pengajian. Acara pengajian tersebut akan dihadiri oleh Rhoma Irama, Mbak Tutut, dan Kiai Zainudin MZ. Pada saat para petugas Pemda dan

¹¹ *Ibid.*

¹² Wawancara dengan Amin Tri M., SH, tanggal 11 Juni 2003 di Pekalongan.

satgas OPP sedang menertibkan sejumlah bendera, mereka dilempari dengan batu oleh beberapa puluh pemuda. Para pemuda yang jumlahnya mencapai ratusan tersebut kemudian mengumpulkan bendera dan umbul-umbul dari semua OPP dan membawanya menuju kearah pondok pesantren Al Qur'an. Sepanjang jalan mereka meneriakkan yel-yel salah satu peserta Pemilu. Bendera yang berhasil dikumpulkan kemudian di bakar diatas panggung yang semula akan dipakai untuk pengajian akbar. Panggung yang saat itu sedang penuh para pekerja, cepat sekali terbakar, sebab terbuat dari kayu. Massa kemudian membakar deklit dan merusak dua kerangka besi untuk tenda para tamu undangan. Aksi massa tersebut menimbulkan kepanikan di lingkungan pondok pesantren. Sasaran amuk massa hanya panggung, mereka sama sekali tidak menyentuh pondok pesantren. Aparat keamanan agak terlambat dalam menangani kasus tersebut. Mereka tiba ditempat kejadian, setelah para perusuh pergi, dan hanya menemukan sisa-sisa kebakaran. Menurut beberapa informan, para perusuh melanjutkan aksinya dengan melempari rumah-rumah penduduk yang dianggap sebagai "pelindung" atau "pendukung" Golkar.¹³

Pukul 16.00 WIB, massa salah satu peserta Pemilu mulai memasang spanduk. Pemasangan spanduk mencapai panjang 1800 meter, di samping itu juga pemasangan bendera, mulai dari jalan Urip Sumoharjo sampai dengan jalan raya Buaran. Malam hari, pukul 20.30 WIB, bertempat di Pringlangu Gg. II, Kodya Pekalongan diadakan pengajian dalam rangka konsolidasi PPP. Pembicara yang diundang dalam pengajian itu adalah KH. Mansyur Mustofa dari Pemalang,¹⁴ KH. Tohir dan KH. Munawir dari Pekalongan. Warga yang menghadiri pengajian diperkirakan mencapai 4000 orang.¹⁵

Selasa, tanggal 25 Maret 1997, kegiatan pembuatan panggung pengajian akbar dimulai lagi dengan pengamanan dari petugas TNI dan Brimob. Sementara itu, sejumlah pemuda mulai pukul 08.00 WIB, melakukan corat-coret di tembok-tembok sepanjang jalan raya Buaran (depan pondok

¹³ Wawancara dengan Abdul Halim, tanggal 11 Juni 2003 di Pekalongan.

¹⁴ KH. Mansyur, termasuk Kiai memiliki gaya dakwah cukup "keras". Wawancara dengan Abdul Halim, tanggal 11 Juni 2003 di Pekalongan.

¹⁵ *Laporan Khusus dari Wali Kota Madya KDH.TK.II Pekalongan, tahun 1997*. Koleksi Arsip Daerah Pekalongan, tahun 1997.

pesantren Al Qur'an) sampai Kertijayan. Isi tulisan antara lain menjelek-jelekkan beberapa orang petinggi Golkar dan para jurkam (juru kampanye). Pada malam harinya, pukul 20.30 sampai 23.15 WIB, bertempat di Banyuurip Alit Gg. III Kodya Pekalongan berlangsung pengajian dengan pembicara K. Tohir dan K. Fadholi yang dihadiri sekitar 3000 orang. Ribuan pengunjung pengajian yang datang dari berbagai daerah memadati jalan-jalan ke arah lokasi pengajian. Massa terkonsentrasi di Buaran dan Banyuurip Alit, yang merupakan jalan ke arah Kedung Wuni. Lokasi pengajian dekat dengan kampus pondok pesantren yang sudah diblokir oleh petugas. Menjelang tengah malam, acara pengajian selesai, massa yang akan pulang kemudian berkumpul di sekitar pondok pesantren dan meneriakkan yel-yel. Suasana mulai memanas, jalan menuju Kedung Wuni diberi rintangan dengan bambu. Pukul 23.25 WIB terjadi insiden pembakaran tiang bendera disamping Kelurahan Kradenan.

Rabu tanggal 26 Maret 1997, pukul 00.15 WIB, terjadi pengrusakan rumah Kepala Desa Banyuurip Alit. Pukul 03.45 WIB terjadi peledakan mercon di rumah H. Agus bin Anwar, jalan Banyuurip Alit. Pintu dan eternit rusak terkena ledakan. Kerusakan mulai memanas lagi pada siang harinya. Pukul 10.00 WIB, massa yang beringas, melampiaskan kemarahannya dengan merusak kios-kios (kios kelontong, bahan bangunan, sembako, dan emas) di sekitar pondok pesantren. Semua barang yang ada di dalam kios diangkut keluar kemudian dibakar. Dua buah mobil milik Panamek yang berisi kain batik juga ikut dibakar. Massa juga merusak sepeda motor, sebuah kantor telepon dan BRI. Pukul 13.30 WIB, terjadi pembakaran ban-ban bekas di sepanjang jalan raya Buaran dan sepanjang jalan Pringlangu sampai jalan Urip Sumoharjo. Pada saat itu jalan telah ditutup oleh aparat dari kepolisian, Brimob, dan Batalyon Infantri 406. Petugas menangkap 25 orang untuk diminta keterangannya sehubungan dengan peristiwa kerusakan tersebut.

Langkah-langkah penanganan dalam menghadapi peristiwa tersebut antara lain. 1) Polri mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan juga dengan ormas-ormas yang ada di wilayah Pekalongan, 2) mengamankan lokasi kejadian, 3) mengamankan para pelaku, 4) mengadakan deteksi untuk mengungkap motivasi dan latar belakang peristiwa, 5) melakukan

penyelidikan terhadap tokoh intelektual, 6) menyiagakan pasukan dari batalyon 406 dan 405 serta kompi Bribmob di tempat kejadian, 7) mengadakan pendekatan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan 8) melakukan interogasi terhadap para pelaku.

Kerugian material pada peristiwa kerusuhan tanggal 26 Maret 1997 adalah sebagai berikut, 1) BRI Unit Banyuwirip Alit, 2) Warpostel, 3) bok telepon umum, 4) 2 buah sepeda motor, 5) kantor SPSI, 6) toko obat batik, 7) toko baru kelontong, 8) toko besi, 9) toko Sinar Mulia, 10) bangunan ruko, 11) toko Anwar, 12) toko Tugu Luwak, 13) toko kelontong, 14) toko roti Budi Susilo, 15) toko Mustika, 16) toko Gentong, 17) toko Surya Kencana, 18) toko lampu dan listrik, 19) toko Wiroto, 20) toko Enggal Jaya, 21) toko Hoki, 22) toko emas Gajah, 23) toko Sri Lianingsih, 24) mobil carry beserta isinya dibakar, 25) 400 batang bambu di bakar, 26) 2 buah dirusak.¹⁶

Dalam peristiwa tersebut dua orang petugas polisi dilaporkan terluka akibat terkena lemparan batu. Sementara itu korban dari warga masyarakat dan dari massa perusuh tidak ada laporan resmi yang masuk. Walaupun begitu, menurut seorang informan, dari pihak yang membuat keonaran tentunya juga ada, apabila melihat cara-cara penanganan yang dilakukan oleh yang berwajib.¹⁷

Minggu, 6 April 1997, pukul 01.00 WIB kembali terjadi pengrusakan dan pembakaran di jalan Pringlangu Pekalongan Barat. Peristiwa itu terjadi akibat adanya salah komunikasi antara para pemuda dan petugas, sehingga cara penyelesaiannya tidak dengan musyawarah, tetapi dengan emosional. Peristiwa itu bermula dari jalan Mas Mansyur, sekelompok pemuda melempari rumah-rumah warga terutama yang berada di tepi jalan. Antara petugas dan para perusuh tidak menemukan jalan damai, kemudian para perusuh dihalau, mereka lari ke arah selatan. Saat itu dari arah selatan muncul sejumlah massa yang baru saja mengikuti pengajian. Pembicara pada pengajian di Kradenan adalah KH. Munawir, KH. Mansyur, dan KH. Afifudin, tiga orang kiai yang dakwahnya dianggap cukup "keras". Massa kemudian menjadi beringas, dan melakukan pengrusakan dan pembakaran yang mengakibatkan kerugian

¹⁶ *Laporan Khusus Polri Wilayah Pekalongan*. Koleksi Arsip Daerah Pekalongan Tahun (1997).

¹⁷ Wawancara dengan Hj. Maslichah, tanggal 11 Juni 2003 di Pekalongan.

warga yang cukup besar. Dalam waktu yang cukup singkat, keadaan menjadi kacau balau dan tidak terkendali, padahal lokasi kejadian dekat dengan Polsek Buaran. Massa merusak toko-toko yang berada di sepanjang jalan yang dilewati.

Sasaran yang dituju adalah dealer Kawasaki yang berada di jalan Pringlangu Pekalongan Selatan. Toko tersebut pintunya dirusak, dan isi toko dibawa keluar kemudian di bakar di tengah jalan. Barang-barang yang dibakar adalah 7 buah motor (6 jenis Kaze dan 1 kawasaki Ninja), sebuah kipas angin, sebuah kotak kunci, sebuah almari besi, 7 buah sepeda jenis federal, dan yang lainnya diacak-acak. Massa juga merusak sebuah toko batik, puluhan tong berisi obat batik dibongkar dan dikeluarkan kemudian dibakar. Sebuah rumah yang digunakan untuk gudang saos tomat serta karoseri juga menjadai sasaran amukan massa yang jumlahnya mencapai ribuan orang.

Petugas aparat keamanan gabungan yang dipimpin oleh Kol. Inf. Amirul Isaeni (Danrem 071/Wijaya Kusuma), Kol. Pol. Drs. Solichin (Kapolwil Pekalongan), dan Dandim Pekalongan berusaha menangani masalah itu dengan cara menghalau massa. Akan tetapi cara itu tidak berhasil, massa tetap tidak beranjak, sehingga aparat keamanan terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan dan menyemprotkan gas air mata.¹⁸

Selasa, tanggal 8 April 1997 kerusuhan terjadi lagi di daerah perumahan Bina Griya Indah (BGI).¹⁹ Ratusan orang melempari rumah-rumah di pemukiman BGI hingga kaca-kaca hancur berantakan.²⁰ Para perusuh masuk ke kompleks perumahan tersebut pada dini hari, namun tak lama kemudian sejumlah warga setempat dibantu oleh petugas keamanan berhasil menghalau para perusuh. Namun pada pagi hari sekitar waktu Subuh, para perusuh kembali beraksi, namun berhasil dipergoki oleh para petugas poskamling dan warga yang akan melakukan ibadah shalat Subuh. Oleh karena itu, peristiwa pada pagi hari itu bisa digagalkan. Warga yang khawatir melihat situasi yang berkembang di BGI, kemudian memukul *titir*,²¹ dan sebagian lagi mengontak petugas keamanan. Suara *titir* membangunkan warga penghuni kompleks

¹⁸ Mohtar Mas'oe'd, dkk. (ed.), *op. cit.*, hlm. 256.

¹⁹ Perumahan tersebut kebanyakan milik para pegawai pemerintah (PNS), dan mayoritas beragama Islam.

²⁰ Wawancara dengan Chaerudin Aslam, tanggal 10 Juni 2003 di Pekalongan.

²¹ Bunyi kentongan yang dipukul dengan nada tertentu sebagai tanda bahaya.

BGI, sehingga mereka semua bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Petugas gabungan dari pasukan 406 Purwokerto, dan Brimob, Polres, Polwil serta Kodim turun ke lokasi mengamankan lokasi kejadian. Para petugas tersebut tetap berjaga-jaga sampai siang hari, untuk mengantisipasi apabila para perusuh kembali ke kompleks BGI.

Minggu, 20 April 1997 kembali terjadi kerusuhan, kali ini sasarannya adalah kantor DPC Golkar Pekalongan di Wiradesa. Kerusuhan terjadi akibat beberapa pemuda Wiradesa yang sedang jalan-jalan dilempari batu dan dikeroyok oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Pada peristiwa itu beberapa orang terluka terkena lemparan batu dan luka akibat senjata tajam. Mereka yang diserang kemudian melarikan diri, tetapi tidak berapa lama mereka datang lagi di tempat kejadian bersama teman-temannya. Karena tidak menemukan yang dicari, para pemuda melampiaskan kemarahannya dengan merusak kantor Golkar. Lokasi perusakan itu tidak jauh dengan tempat kejadian pada tanggal 26 Maret 1997. Akibat peristiwa ini, sejumlah peralatan kantor rusak, dan kaca-kaca jendela pecah.

Selasa, 22 April 1997, kerusuhan terjadi di rumah anggota pantarlih di Simbang Kulon, Buaran. Rumah itu menjadi sasaran amuk massa, sehingga rumah menjadi rusak total, begitu juga seluruh perabot rumah. Peristiwa itu dipicu oleh adanya sekelompok warga Simbang Kulon yang belum terdaftar sebagai calon pemilih, padahal waktu pendaftaran sudah habis. Warga yang berjumlah puluhan orang mendatangi kantor kelurahan untuk meminta penjelasan, dan oleh petugas kelurahan mereka dibawa ke kecamatan agar mendapat penjelasan secara langsung dari Camat. Kartu model A yang dituntut warga agar bisa dicatat sebagai pemilih tetap tidak bisa mereka peroleh, sebab waktu pendaftaran sudah ditutup. Menurut petugas pantarlih, sebenarnya para warga tersebut sudah didatangi, tetapi karena mereka tidak ada di tempat, sehingga tidak didaftar. Hal itu oleh warga dianggap sebagai cara untuk mempersulit dalam mendapatkan kartu Model A. Oleh karena itu yang menjadi sasaran kemarahan warga adalah petugas pantarlih.

Rabu, tanggal 30 April 1997, kerusuhan terjadi lagi. Peristiwa itu berawal ketika satgas AMPI dan Pemuda Pancasila pulang dari kampanye Golkar. Sesampainya di jalan Kartini, mereka dilempari batu, juga saat mereka

di jalan Sudirman. Akibatnya 4 orang satgas terluka. Melihat kejadian tersebut, kawan-kawannya tidak terima, sehingga terjadi perkelahian massal, antara satgas AMPI dan Pemuda Pancasila melawan para pelempar batu. Kerusakan itu terus berlanjut hingga Kamis, tanggal 1 Mei 1997. Dalam kerusakan itu, selain jatuh korban 8 orang luka-luka dan harus di rawat di rumah sakit, beberapa kantor rusak diamuk massa, sedangkan peralatan kantor, dokumen dan perabotan dikeluarkan dan dibakar.

Jum'at, tanggal 23 Mei 1997, kerusakan massal terjadi di pusat kota Pekalongan. Awal terjadinya kerusakan tersebut, tatkala ribuan pendukung PPP memenuhi jalan-jalan protokol di kota Pekalongan. Para pendukung PPP tersebut berkeliling kota sambil meneriakkan yel-yel "hidup bintang". Kericuhan muncul akibat datangnya panser dari aparat keamanan. Dari panser itulah aparat menyemprotkan gas air mata, sehingga massa menjadi marah dan mengamuk dengan cara melempar batu ke arah panser. Kerumunan massa baru beranjak dari lokasi kejadian setelah petugas melepaskan tembakan peringatan. Masih dalam hari dan tanggal yang sama, kerusakan yang membawa korban luka parah sebanyak tiga orang terjadi di Desa Kalimalang. Kerusakan muncul tatkala serombongan massa hendak merusak markas Pemuda Pancasila. Perbuatan itu diketahui warga setempat, sehingga terjadi perkelahian massal antara para pendatang yang hendak merusak markas melawan warga.

Kerusuhan yang menelan korban material cukup besar, terjadi di daerah Karangmalang, pada tanggal 23 Mei 1997. Insiden terjadi antara massa simpatisan PPP usai mengikuti kampanye putaran terakhir di lapangan Sorogenen dengan warga masyarakat desa Karangmalang. Kerusakan itu sebagian besar dilakukan oleh massa dengan melempar dan memukul benda keras ke arah yang dijadikan sasaran. Kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut adalah sebagai berikut :

1. SD. Karangmalang, kaca pecah, genting dan eternit pecah
2. 10 buah rumah rusak
3. Kantor BRI Unit Desa

4. Bengkel mobil

5. Pos pemuda Pancasila.²²

Peristiwa tersebut juga mengakibatkan beberapa orang dirawat di rumah sakit, yakni, Bejo (Satgas PPP, luka di kepala bagian belakang, jari kelingking tangan kanan patah, dan kaki memar), Wiwin (Satgas PPP, luka di kepala bagian belakang dan lengan memar), serta Suroyo (warga Karangmalang, kepala bagian belakang, dan tubuh memar). Menurut pengakuan korban derita²³ akibat perlakuan petugas keamanan yang datang ke tempat kejadian.

b. Refleksi

Seperti halnya di daerah-daerah lain yang menjadi arena kerusuhan massal di Pekalongan pada bulan Maret Mei 1997 di pandang sebagai sesuatu yang mengagetkan dan sangat tidak terduga. Beberapa komentar dari berbagai pihak keluar, dan intinya menyebut kejadian itu sebagai sesuatu yang tidak wajar, sehingga tidak heran kalau timbul pendapat bahwa kejadian tersebut sebagai “rekayasa politik”.

Analisis mengenai kerusuhan di Pekalongan periode Maret - Mei 1997, berdasar, pertama isu agama dipakai sebagai sarana memobilisasi konflik. Kedua, kerusuhan itu adalah hasil dari konspirasi politik oleh kekuatan dari luar Pekalongan. Walaupun asumsi yang kedua tersebut tidak cukup bukti untuk membenarkan atau menolak dugaan persekongkolan itu. Karena kalau memang ada persekongkolan, mengapa warga masyarakat kota itu mudah dihasut untuk menghancurkan sendiri kota mereka? Apakah mereka mudah dihasut karena isu yang dilontarkan oleh para agen provokator adalah isu agama?

Asumsi dasar tulisan ini adalah bahwa “letupan api” kerusuhan itu tidak akan menimbulkan kobaran yang besar kalau tidak tersedia cukup “rumput kering” dan pemicunya. Upaya mobilisasi konflik dalam masa kampanye Pemilu itu memang sangat intensif, terutama dilakukan oleh juru kampanye PPP yang diundang dari luar Pekalongan. Mengingat bahwa para

²² Surat Dinas tentang Laporan Kejadian Kecamatan Pekalongan Timur, tanggal 24 Mei 1997.

²³ Pengakuan korban seperti yang dikutip dalam Laporan Kejadian Kecamatan Pekalongan Timur tanggal 24 Mei 1997.

peserta kampanye PPP umumnya adalah anak muda, yang bukan hanya dalam kondisi kejiwaan yang kurang stabil, tetapi juga termasuk golongan yang masa depannya kurang pasti. Oleh karena itu, kondisi tersebut akan mudah tersulut apabila ada sedikit saja faktor pemicu yang muncul dan mengakibatkan tumbuhnya semangat destruktif. Seperti tampak dalam kronologi peristiwa, sebagian besar dimulai dari golongan pemuda.

Kemudahan timbulnya suasana *chaotic* (kekacauan) yang berkembang dalam kerusuhan Maret - Mei 1997 bisa dijelaskan dengan “ketegangan struktural” yang selalu intensif akibat kampanye Pemilu. Ketegangan itu juga semakin meningkat karena banyaknya kasus-kasus yang beredar mengenai berbagai persoalan negatif dalam masyarakat. Dalam suasana ketegangan seperti itu orang tidak lagi peduli mengenai kebenaran dari dasar-desus itu. Kalau isi rumor itu mendukung citra yang sudah dipunyainya mengenai keburukan dalam masyarakat, maka ia menjadi sangat efektif membantu menyebarkannya. Kasus “ketegangan struktural” terlihat pada peristiwa 25 - 26 Maret 1997. Isu yang berkembang di masyarakat adalah bahwa pengajian akbar yang akan dilakukan di pondok pesantren Al Qur'an Buaran, dengan menghadirkan sejumlah tokoh teras Partai Golkar dari Jakarta sebagai pengajian politik. Masyarakat menganggap masalah itu sebagai sebuah pelanggaran, sebab kalau memang akan kampanye tempatnya bukanlah di sebuah pondok pesantren, karena tempat tersebut adalah tempat untuk menuntut ilmu dan beribadah. Peristiwa tersebut juga didahului oleh adanya sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh aparat atau petugas penertiban bendera. Salah seorang petugas dari pihak pemerintah tidak mau mencabut atau melepas bendera Golkar yang dipasang di tempat yang seharusnya terkena operasi penertiban. Insiden kecil tersebut menjadi contoh adanya diskriminasi yang ada di masyarakat menjelang Pemilu 1997.²⁴ Sikap tidak profesional dari aparat pemerintah juga terlihat dalam menangani masalah kerusuhan. Penangkapan massal dilakukan oleh aparat, bahkan orang yang tidak mengetahui peristiwa tersebut juga diangkut. Penangkapan

²⁴ Wawancara dengan Amin Tri M., SH tanggal 10 Juni 2003 di Pekalongan. Lihat juga Mohtar Mas'oe'd, dkk. (ed.), *op.cit.*, hlm. 245 - 246.

juga disertai dengan perlakuan yang kasar dari aparat baik kepada yang ditangkap maupun pada rumah-rumah yang digeledah.²⁵

Sikap saling curiga antara pemerintah dengan massa dalam hal ini adalah salah satu pendukung partai yang cukup kuat di Pekalongan juga muncul, yang berakibat fatal. Kerusuhan tanggal 23 Mei 1997, dipicu oleh adanya semprotan gas air mata yang dilakukan oleh aparat, terhadap massa PPP yang baru saja mengikuti kampanye, dan mereka berbondong-bondong memenuhi jalan-jalan protokol di dalam kota.

Masalah hubungan yang tidak harmonis antara kedua kelompok masyarakat pendukung organisasi peserta Pemilu (Golkar dan PPP) tercermin dari sikap kebencian penduduk setempat terhadap aparat birokrasi yang cenderung mendukung Golkar. Masyarakat merasakan adanya diskriminasi dalam pelayanan dari birokrasi yang tidak profesional dan berbelit-belit. Pelayanan yang dianggap warga tidak profesional tersebut, menjadi salah satu pemicu kericuhan tanggal 22 April 1997. Warga yang merasa tidak di daftar sebagai pemilih, menuduh petugas pantarlih sengaja tidak mendaftarkan sebagian warganya yang mendukung OPP tertentu di luar Golkar.

Kebencian masyarakat terhadap aparat birokrasi semakin besar, akibat tampilnya beberapa kiai kharismatik yang kritis terhadap keresahan masyarakat. Dalam aspek politis para kiai tersebut selalu berusaha melakukan kritik terhadap perilaku beberapa pejabat pusat dan daerah yang juga jajaran atas pimpinan OPP tertentu. Perilaku dan tindakan yang dianggap menyimpang dari para tokoh tersebut dijadikan bahan kupasan dalam pengajian, dan kiai selalu mengajak kepada umatnya untuk mencoblos partai yang didukungnya. Dakwah para kiai tersebut oleh warga pendukungnya diterima sebagai kenyataan yang harus diungkapkan, dan hal itu menimbulkan sikap warga yang semakin berani. Sementara itu oleh kelompok lain dan para pejabat, ucapan-ucapan kiai tersebut dianggap terlalu kasar dan bersifat provokasi. Keberanian warga menunjukkan sikap kebenciannya terhadap para pejabat pusat dan OPP tertentu, terlihat pada corat-coret yang dilakukan di

²⁵ Sumber DPC PPP Kabupaten Pekalongan. Mengenai laporan perlakuan kasar dan korban kekerasan yang dilakukan aparat keamanan dapat dilihat pada lampiran 1.

tembok tembok di daerah Buaran. Kondisi tersebut mencerminkan dengan jelas hubungan yang tidak harmonis antara kedua OPP.

Secara politis keputusan seorang kiai sangat mempengaruhi keputusan masyarakat pada umumnya, sehingga dalam penyampaian aspirasi menyangkut masalah politik praktis pun, umat selalu mengikuti fatwanya. Khususnya masyarakat di lingkungan pondok pesantren yang kebanyakan warga NU. Dalam aspirasi politik, NU menyalurkan suaranya ke PPP. Dalam kondisi dominasi negara yang kuat dan didukung oleh birokrasi yang selalu berpihak pada kepentingan OPP tertentu, maka semua masalah yang menyangkut keputusan politik praktis seringkali menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Dahrendorf, menyebut fenomena yang demikian sebagai konflik kepentingan.²⁶ Dalam hal ini, kepentingan yang dikehendaki aparat birokrasi sangat berbeda dengan kepentingan yang dikehendaki oleh masyarakat melalui fatwa seorang kiai, sehingga menimbulkan adanya konflik di dalam masyarakat.

Analisis tentang kerusuhan massal bulan Maret - Mei 1997 yang telah terjadi di Pekalongan beberapa tahun silam, akan lebih tajam apabila objek-objek yang menjadi sasaran amuk massa juga diperhatikan. Objek-objek tersebut terdiri atas beberapa kategori, yakni 1) rumah (dirusak massa dan dirusak petugas), 2) ruko, toko atau kios, 3) bank, 4) kantor pemerintah, 5) kantor OPP, 6) mobil pemerintah, dan 7) sarana bagi warga yang dibangun oleh pemerintah, serta 8) atribut partai yang mencerminkan milik lembaga birokrasi pemerintah setempat. Di samping itu juga jatuh korban manusia, baik dari warga maupun dari pihak petugas pemerintah. Kedelapan jenis objek tersebut dapat dikelompokkan lagi menjadi tiga yaitu 1) kantor pemerintah, termasuk atribut partai yang mencerminkan milik pemerintah, 2) sarana yang dibangun untuk para pegawai pemerintah, dan 3) toko dan bank (ruko, kios dan toko serta bank dimasukkan dalam satu kategori yakni yang berhubungan dengan ekonomi.

Jika kategori-kategori tersebut memang tepat maka dengan melihat keterkaitan antara kategori-kategori akan dapat dilihat logika yang ada di balik

²⁶ Ralf Dahrendorf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri Sebuah Analisa-Kritik* (Jakarta: CV Rajawali, 1986).

kerusuhan yang terjadi. Fakta yang cukup menarik adalah walaupun intensitas kerusuhan di Pekalongan sejak bulan Maret sampai Mei 1997 cukup tinggi, namun peristiwa yang menelan korban manusia (luka terkena lemparan batu dan senjata tajam), tercatat hanya di empat tempat. Dari keempat tempat kejadian itu, boleh dikatakan 1 kejadian bukan sebagai akibat kontak langsung dalam kerusuhan. Dua buah peristiwa yang merupakan adu fisik adalah peristiwa tanggal 20 April dan 30 April 1997. Kemarahan massa dalam kerusuhan di Pekalongan ditujukan pada simbol-simbol dari golongan tertentu, dan golongan tersebut adalah pemerintah dan orang Tionghoa. Dalam hal ini yang dianggap sebagai "pemerintah" adalah aparat pemerintah, atribut milik pemerintah dan sarana yang dibangun untuk para pegawai pemerintah. Perusakan yang ada hubungannya dengan "pemerintah" tersebut adalah perusakan kantor kelurahan, pembakaran atribut partai yang condong ke pemerintah (Golkar), pelemparan kompleks BGI yang sebagian besar warganya adalah PNS, pelemparan mobil dinas, perusakan kantor Pemuda Pancasila, perusakan sekolah negeri dan perusakan rumah-rumah penduduk yang bekerja untuk pemerintah. Sedangkan perusakan terhadap ruko, toko dan kios, yang terbanyak adalah milik warga etnis Tionghoa. Kerusuhan tahun 1997 berbeda dengan kerusuhan yang terjadi tahun 1995 tidak ada rumah pribumi yang menjadi sasaran amuk massa, sedangkan pada tahun 1997 ada beberapa rumah warga pribumi yang ikut di rusak, terutama toko - toko di daerah Buaran. Perusakan rumah paling banyak dilakukan oleh aparat keamanan.

C. Kerusuhan Tahun 1998

a. Peristiwa, 15 Februari 1998

Pada tanggal 15 Februari 1998 pukul 17.00 WIB di jalan Hayam Wuruk, jalan Cipto, jalan H. Agus Salim, Pekalongan Timur, terjadi pelemparan rumah dan toko-toko milik orang etnis Tionghoa. Kerusuhan terjadi beberapa saat setelah acara penguburan di Sapuro. Massa yang ikut mengantar jenazah berangkat dengan melintasi daerah Klego, Krapyak dan Poncol menuju Sapura. Rombongan pelayat lainnya datang dari arah Kraton, dan melintasi jalur yang sama. Massa (rombongan pelayat) kemudian berkumpul sehingga

menjadi sebuah rombongan yang cukup besar, dan kemudian terjadilah aksi pelemparan. Aksi pelemparan dengan memakai batu tersebut, menyebabkan kerusakan berupa bangunan yakni: 1) toko roti Purimas, jalan Hayam Wuruk, 2) toko batik di jalan Hayam Wuruk, 3) rumah makan KFC (Kentucky Fried Chicken) Matahari plaza, dan 4) gedung olah raga Prabajaya jalan H. Agus Salim. Di antara massa yang ikut melakukan aksi pelemparan, petugas menangkap dua orang yang diduga sebagai otak peristiwa tersebut.

b. Kasus Gedung Pemuda

Pada saat penelitian ini dilakukan, di atas tanah yang disengketakan telah berdiri sebuah bangunan Masjid Syuhada yang cukup megah dan sebuah patung perjuangan. Persengketaan tanah atau gedung pemuda melibatkan sebuah yayasan pejuang Resimen XVII, seorang pengusaha nonpri, dan dua bank BUMN. Persengketaan ini telah mendapat perhatian dari berbagai kalangan masyarakat, baik dari unsur mahasiswa, pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan dan MUI. Tanah bekas Gedung Pemuda yang disengketakan merupakan tanah yang memiliki nilai sejarah bagi perjuangan rakyat Pekalongan dan TNI. Sampai dengan pertengahan tahun 1998, yayasan pejuang Resimen XVII bersama dengan kelompok masyarakat masih terus mengupayakan agar di atas tanah tersebut bisa didirikan bangunan yang bisa dipakai untuk mengenang para syuhada yang gugur di masa revolusi, dan juga bangunan yang bisa dipakai untuk tempat menuntut ilmu.

Tanah yang sekarang terletak di jalan Pemuda tersebut, pada masa kolonial terdapat sebuah bangunan hotel milik seorang warga Belanda. Tatkala Jepang masuk ke Indonesia, gedung tersebut berhasil diduduki Jepang dan dijadikan markas Kenpetai. Tanggal 3 Oktober 1945, rakyat Pekalongan menyerbu gedung itu dan berhasil mengambil alih gedung, dengan pengorbanan nyawa beberapa puluh pejuang. Pemakaian gedung kembali beralih tangan ketika Pekalongan diduduki tentara Belanda pada masa revolusi. Ketika Belanda harus mengakui kedaulatan kepada pemerintah Republik Indonesia, Belanda menjual gedung tersebut kepada orang Cina. Dalam hal ini, masyarakat Pekalongan yakin bahwa gedung itu diberikan kepada orang Cina bukan dijual, sebab selama masa revolusi orang-orang

Cina membantu Belanda membentuk pasukan yang disebut *puang pui*. Gedung itu kemudian dijadikan sebuah hotel. Kenyataan bahwa orang Cina membantu Belanda, dan orang-orang Cina memandang rendah perjuangan rakyat Pekalongan yang menganggap para syuhada yang gugur itu sebagai orang gelandangan yang hidup di gedung tersebut, menimbulkan kemarahan warga Pekalongan. Pemerintah kemudian menegur dan akhirnya mengeluarkan surat pencabutan hak guna bangunan tersebut dari warga Cina.

Gedung tersebut adalah bekas markas perjuangan, maka para mantan pejuang anggota resimen tersebut yang saat ini telah mendirikan Yayasan Resimen XVII Divisi III/ Diponegoro mengajukan permohonan kepada pemerintah agar tanah tersebut diberikan kepada yayasan. Pemerintah pusat melalui surat No. 3 Tahun 1979, menyetujui permohonan tersebut, selanjutnya tanggal 17 September 1987 Panglima Kodam VII Diponegoro melalui surat keputusan No. S. Kep/200/IX/ 1987 juga telah memberikan persetujuannya. Namun karena yayasan kesulitan memperoleh dana untuk mengurus sertifikat tanah tersebut, maka status kepemilikannya jadi mengambang. Namun secara tiba-tiba terjadi proses jual beli atas tanah tersebut, dan tanah berhasil dibeli oleh seorang direktur perusahaan PT. PGLS. Tahun 1991 tanah tersebut kemudian diusahakan dijual lagi kepada bank milik Negara. Usaha tersebut gagal, karena masyarakat Pekalongan memalui Yayasan Resimen XVII melakukan protes dan teguran kepada bank yang dimaksud. Tahun 1995, tanah tersebut ditawarkan kepada bank lain yang juga milik negara, dan sertifikat kepemilikan beralih ke bank tersebut, walaupun rakyat Pekalongan terus melakukan protes. Timbul ketegangan antara Yayasan Resimen XVII dengan pihak bank, sebab kedua belah pihak memasang papan pengumuman di atas tanah tersebut. Masalah tersebut cepat meluas dan menyulut kemarahan warga. Situasi tersebut hampir menimbulkan konflik terbuka di Pekalongan pada pertengahan tahun 1995. Namun pada akhirnya persoalan itu menjadi reda, setelah di lokasi yang disengketakan itu dibangun tempat ibadah yaitu masjid Syuhada.

D. Kerusuhan tahun 1999

a. Peristiwa 26 April 1999

Kejadian tanggal 26 April 1999, diawali dengan kegiatan pengajian yang dilakukan oleh simpatisan dua organisasi massa yakni PKB dan PPP, dalam tempat yang berdekatan. Pada acara pengajian muncul ejekan-ejekan untuk menjatuhkan kelompok lawan.²⁷ Dari lontaran-lontaran yang ada di pengajian kedua belah pihak kemudian menjadi pemicu kerusuhan yang mengakibatkan beberapa rumah penduduk rusak, 8 diantaranya dilaporkan rusak berat.²⁸ Dalam peristiwa tersebut tidak ditemukan korban jiwa. Pelaku disinyalir adalah simpatisan PKB dan PPP. Lokasi tindak kekerasan di daerah Simbang Wetan, Buaran, yang dikenal sebagai basis PPP. Massa diperkirakan berjumlah 200 an. Kerusuhan bisa dilokalisir oleh petugas dan sebagai tindak lanjut untuk pengamanan daerah, para petugas keamanan menyelidiki beberapa personil yang terlibat dari kedua belah pihak yang bersengketa.

b. Peristiwa tanggal 28 Mei 1999.

Hari Jumat, tanggal 28 Mei 1999, pukul 17.00 WIB terjadi provokasi yang dilakukan oleh sekelompok orang, dengan melempar batu kearah desa Pringlangu Gg. 8. Massa yang melakukan pelemparan tidak jelas identitasnya. Warga desa setempat, tidak menanggapi aksi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal tersebut. Sebagai tindakan antisipasi, warga mengontak petugas keamanan dan juga perangkat atau staf kalurahan.²⁹ Aparat keamanan dan staf kelurahan segera mengamankan lokasi kejadian. Dalam menghadapi situasi seperti itu, menurut sebuah sumber sebuah tindakan dari aparat haruslah tegas, sebelum reaksi yang lebih besar muncul dan mengakibatkan kerusuhan semakin tajam.³⁰

Pukul 17.30, di Kradenan Gang 3, puluhan orang tanpa atribut yang jelas melakukan aksi perusakan dengan cara melempar batu ke arah sebuah rumah milik Hj. Makrufah. Massa yang melakukan perusakan memakai baju ala ninja. Pada saat peristiwa terjadi, masyarakat sedang berada di masjid

²⁷ Wawancara dengan Hj. Maslichah, tanggal 11 Juni 2003 di Buaran, Pekalongan.

²⁸ *Laporan Data Amuk Massa tahun 1997-1999*. Koleksi Arsi Daerah Pekalongan, lihat juga lampiran 2.

²⁹ Wawancara dengan Amin Tri M, SH, tanggal 11 Juni 2003 di Pekalongan.

³⁰ Wawancara dengan Dimyar dan Mujiasih, tanggal 10 Juni 2003 di Pekalongan

untuk shalat Mahgrib. Peristiwa tersebut cukup mengagetkan masyarakat setempat, namun warga tidak melakukan tindakan balasan. Akibat aksi tersebut, korban menderita kerugian material berupa: 1) beberapa kaca rumah rusak, 2) 1 buah TV, 3) 1 buah radio tape, 4) beberapa perabot rumah rusak, dan 5) 1 mobil ber nomor polisi G. 7389 AA, rusak. Korban tidak tahu, para penyerang berasal dari kelompok mana. Menurut penuturan korban, setelah muncul banyak partai baru yang ikut Pemilu 1999, dirinya diajak oleh beberapa partai untuk bergabung, namun tidak ada yang diterima. Dirinya menyatakan telah mempunyai pilihan yang dianggapnya “sudah sreg” dan dia tidak mau ikut-ikutan yang lain dengan cara pindah partai karena “gurunya” pindah partai.³¹

Pada saat yang hampir bersamaan dengan peristiwa di rumah milik Hj. Makrufah, rumah Rodli juga di Gg 3 Kradenan, dirusak massa. Jumlah perusak lebih sedikit dibandingkan yang perusak rumah Hj. Makrufah. Akibat aksi tersebut, Rodli menderita kerugian material yang berupa, almari, kursi tamu, kaca jendela dan pintu hancur. Para perusuh lari ketika aparat keamanan datang. Dari Kradenan, para perusuh lari ke arah desa Jenggot, dan melakukan perusakan terhadap rumah milik warga Jenggot, antara lain milik H. Zaki. Akibatnya beberapa kaca jendela dan pintu hancur. Menurut sumber dari pihak kepolisian, jumlah rumah yang rusak pada peristiwa Jenggot sebanyak 11 rumah.³² Warga Jenggot berhasil menangkap seorang perusuh yang berasal dari Buaran Gg. 2. Perusuh yang tertangkap kemudian diserahkan kepada yang berwajib. Kerusakan kerusuhan kecil sering terjadi di daerah Pekalongan, menjelang Pemilu 1999.³³

Menurut informasi dari salah seorang korban kerusuhan, kerugian dalam bentuk materi tidaklah terlalu merisaukannya, sebab masih bisa dicari lagi. Akan tetapi yang paling merisaukan dan menjadi sebuah pertanyaan dalam benaknya, mengapa hal itu dilakukan oleh orang-orang “sendiri”. Sebuah ilustrasi diberikan untuk memberi gambaran tentang situasi di daerahnya pada tahun 1999.

³¹ Wawancara dengan Hj. Maslichah, tanggal 11 Juni 2003 di Pekalongan

³² *Laporan Resort Pekalongan, Data Kasus Amuk Massa Tahun 1997-1999*. Koleksi Arsip Daerah Pekalongan. Lihat juga lampiran 2.

³³ Wawancara dengan Dimyar, tanggal 11 Juni 2003 di Pekalongan.

“... kami warga sini sudah biasa melakukan shalat jamaah di masjid, nah sekarang setelah ada partai-partai baru yang muncul, kami jadi terpecah. Ada sebagian dari warga yang kemudian memakai cap partai untuk memberi identitas pada warga lainnya, sehingga timbul kasak kusuk. Saya sebenarnya ingin kalau orang dakwah ya dakwah saja, tidak pakai politik. Situasi seperti itu sempat muncul disini, tetapi kemudian setelah selesai Pemilu ya berangsur pulih seperti dulu lagi. Dahulu saya sempat takut, mau apa-apa takut, nanti ada yang tidak suka. Padahal kegiatan saya itu cuma mengajar anak-anak ngaji . Lha itu ada seorang anak yang belum masuk daftar pemilih, dia ikut kampanye sampai beberapa jari tangannya putus akibat mercon yang akan dilempar ternyata meledak duluan”.³⁴

Masih kasus tanggal 28 Mei 1999, peristiwa kerusuhan terjadi di Banyuurip Alit, pukul 23.00 WIB. Peristiwa kerusuhan terjadi antara simpatisan partai PKB dengan PPP. Daerah Pekalongan terutama masyarakat pesantren masih mengkultuskan seseorang, sehingga semua fatwanya diikuti. Masyarakat yang tadinya berada dalam satu kelompok, PPP, tatkala “sang guru” mempunyai partai baru PKB, massa kemudian sebagian lari ke “sang guru”.³⁵ Situasi tersebut ternyata efektif dalam menumbuhkan sikap saling curiga sehingga mudah meledak menjadi sebuah aksi massa. Seperti kerusuhan di daerah Banyuurip Alit. Akibat peristiwa kerusuhan itu, pasar Banyuurip Alit sampai di blokir petugas keamanan dan ditutup. Beberapa toko di sekitar pasar dirusak dan barang-barangnya dirampas. Kerusakan yang ditimbulkan oleh peristiwa tanggal 28 Mei 1999 di Banyuurip Alit, menelan korban material berupa perusakan rumah, perabot rumah tangga, dan barang-barang dagangan, yakni :

1. rumah H. Abdullah Alwan, Gg. 1, kaca jendela besar pecah
2. rumah Abdul Basir, Gg. 1, kaca jendela dan pintu pecah
3. rumah Zakaria Zen, kaca jendela pecah
4. rumah Abu Amer, Gg. 3, kaca jendela pecah dan teras rusak
5. rumah asin Warham, Gg.3 kaca jendela dan pintu pecah

³⁴ Wawancara dengan Hj. Maslichah, tanggal 11 Juni 2003 di Pekalongan.

³⁵ Wawancara dengan Bagir Suropto, tanggal 11 Juni 2003 di Pekalongan.

6. rumah Junaidi, Gg. 5, kaca jendela dan pintu
7. rumah Fur'ul Zen, Gg. 4, kaca jendela pecah, dagangan diambil, almari rusak
8. Hj. Khudzaefah, Gg. 4, barang dagangan (sembako).
9. rumah Hj. Jamilah, Gg. 5, kaca jendela dan pintu pecah, meja kursi rusak
10. rumah Hj. Zaenab, Gg. 4, kaca jendela pecah
11. rumah Munir, Gg. 4
12. rumah Yusup, Gg. 4.³⁶

c. Refleksi

Reformasi demokratik yang dijalankan masyarakat Indonesia menyusul jatuhnya Suharto telah mendorong terjadinya perubahan dalam struktur perpolitikan Indonesia, termasuk di dalamnya perubahan polarisasi dan peta kekuatan politik dalam masyarakat. Perubahan tersebut di antaranya bisa dilihat dari bangkitnya partai-partai Islam dan agama lainnya di Indonesia. Di kalangan umat Islam, misalnya telah hadir partai-partai besar dan kecil dengan variasi ideologis yang berbeda, sekitar 18 diantaranya telah ikut berpartisipasi dalam pemilu 1999. Di antara mereka ada yang secara tegas menyatakan diri sebagai partai Islam, berazas dan ingin memasukkan hukum Islam ke dalam perundang-undangan Indonesia, dan ada pula yang secara tidak tegas menandakan azasnya pada Islam tapi nyata-nyata ingin menegakkan sariah Islam di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Selain kedua kelompok tadi, ada juga partai yang didominasi kalangan Islam dan didirikan oleh tokoh dan pemimpin Islam yang mempunyai komitmen besar bagi kemajuan politik dan perkembangan Islam pada umumnya. Tetapi secara tegas partai ini menyatakan diri bukan sebagai partai Islam. Hal yang sama terjadi juga di kalangan partai non Islam dan nasionalis.

Situasi seperti tersebut di atas menciptakan konflik dalam masyarakat, karena masing-masing partai politik didukung oleh anggota masyarakat yang sangat fanatik yang orientasi ideologisnya telah ditumbuhkan dan dieksploitasi oleh kader-kader partai yang berkompetisi. Dengan demikian konflik yang muncul di lapisan bawah, tidak saja ditandai dengan berhadapannya dua kelompok besar, yaitu mereka yang dipengaruhi Islam dan mereka yang

³⁶ *Laporan Kecamatan Pekalongan Selatan, bulan Mei dan Juni 1999. Koleksi Arsip Daerah Pekalongan.*

dipengaruhi oleh nasionalisme dan agama lain, tetapi juga oleh bersaingnya kalangan partai Islam sendiri.

Seperti diketahui, masyarakat Indonesia masih terjebak dalam orientasi yang sangat ideologis dalam tindakan dan sikap politik mereka. Keikutsertaan dalam partai politik tidak didasarkan pada baik tidaknya partai yang bersangkutan melainkan pada ada tidaknya kesamaan antara ideologi yang dipegang dengan ideologi partai yang bersangkutan. Dalam konteks lokal, di Pekalongan juga terjadi masalah seperti tersebut, yakni persaingan dan persamaan ideologi. Selama kampanye pemilu 1999, banyak partai politik yang berusaha untuk mendapatkan dukungan masyarakat dengan cara membakar emosi mereka dan melecehkan partai lain. Partai-partai Islam misalnya, melakukan move-move politik untuk mengganjal partai nasionalis. Di samping itu juga partai Islam sendiri, sehingga menimbulkan konflik antarkeompok Islam.

Masyarakat Pekalongan mempunyai karakter masyarakat pesisir yang terbuka dan terus terang, begitu juga dengan sikap dan perilaku politik mereka. Pembentukan sikap politik masyarakat Pekalongan dapat dilihat ke zaman dimana NU menjadi kendaraan politik mereka. Sikap NU lah yang sejak lama menjadi sumber pendorong dan pencetak sikap-sikap politik mereka, karena masyarakat Pekalongan secara mayoritas anggota dan simpatisan NU yang cukup fanatik. Perolehan partai yang di dukung NU, yakni PPP selalu mendapat tempat paling atas di Pekalongan. Politik Islam yang dijalankan NU dan kemudian PPP telah mendapat tempat di kalangan masyarakat Pekalongan. Di samping politik seperti itu dianggap sesuai dengan aspirasi mereka yang berharap dapat memperjuangkan Islam lewat politik juga peran ulama disana cukup besar dalam mempengaruhi masyarakat. Hampir sama dengan yang terjadi pada masyarakat NU lainnya, ulama Pekalongan mendapat tempat yang terhormat dalam masyarakat. Ulama dengan menjadi agen yang dapat mendorong masyarakat untuk bersikap politik tertentu.

Politik Islam dan ulama itu adalah dua faktor penting yang mempengaruhi pembentukan budaya politik masyarakat Pekalongan. Bahkan sikap yang terbentuk melalui kedua faktor tadi cukup kuat untuk dapat melawan apa yang biasa mereka sebut sebagai 'pengaruh Golkar' yang selama

Orde Baru telah menjadi kendaraan politik yang dapat menabrak apa saja yang tidak mengikuti politiknya.

Sehubungan dengan jatuhnya Suharto dan dijalankannya demokratisasi oleh pemerintah yang menggantikannya, di Pekalongan juga muncul partai-partai baru. Dari kalangan NU muncul pula upaya-upaya untuk mendirikan partai baru bernama "Partai Kebangkitan Bangsa". Partai ini di Pekalongan mempunyai cabang yang sebagian besar jajaran pimpinanya dahulu menjadi tokoh-tokoh PPP.

Hadirnya partai-partai baru ini tentu saja menggeser polarisasi politik yang selama ini ada di Pekalongan. PPP yang selalu mendapat suara yang cukup signifikan, mendapat 'saingan' baru, yakni PKB. Perkembangan kepartaian di Pekalongan yang masih didominasi oleh paradigma politik Islam, menyimpan potensi ketegangan baru. Potensi konflik itu sekarang justru terjadi di kalangan NU sendiri.³⁷ Konflik antara warga NU ini terjadi karena terbelahnya mereka ke dalam PPP dan PKB. Semula konflik yang ada bersifat tertutup, hanya saling "menilai" di antara para warga NU yang sekarang punya "rumah" yang berbeda. Konflik tertutup tersebut, saat berlangsung kampanye pemilu 1999, berubah menjadi konflik terbuka. Hal itu terjadi karena kesadaran politik masyarakat pada umumnya lebih dikerangkai oleh fanatisme sempit.³⁸ Konflik tersebut terjadi beberapa kali di daerah Pekalongan, dengan cakupan yang berbeda. Kerugian materi yang ditimbulkan akibat konflik antara pendukung PPP dan PKB, cukup besar.

Konflik warga NU pendukung PPP dan PKB, jelas didasari kepentingan politik terutama untuk memenangkan partai masing-masing. Konflik tampaknya terus berlanjut sampai beberapa saat setelah pemilu usai. Konflik yang berlangsung dari masa sebelum pemilu sampai sesudah pemilu tersebut tetap meninggalkan 'luka' dan membuat kedua belah pihak merasa tidak sehalauan. Informasi lain akibat dari pecahnya beberapa ulama ke dalam PPP dan PKB, adalah adanya 'penurunan' sikap hormat masyarakat terhadap ulama yang tidak separtai.³⁹

³⁷ Wawancara dengan Sulistya, tanggal 10 Juni 2003 di Pekalongan.

³⁸ Wawancara dengan Sanusi, tanggal 10 Juni 2003 di Pekalongan.

³⁹ Wawancara dengan Amin Tri M., SH., tanggal 11 Juni 2003 di Pekalongan.

BAB V

PENUTUP

Salah satu fenomena kontemporer dalam masyarakat sekarang ini adalah terjebaknya umat pada simbol-simbol agama, formalisasi dalam segala bentuknya serta merebaknya konflik kekerasan, dan krisis kemanusiaan disulut isu ketimpangan sosial ekonomi. Dari fenomena ini, akhirnya manusia terjebak dalam simplifikasi masalah dan agama dijadikan kambing hitam atas segala problematika zaman. Agama dijadikan sebab utama berbagai masalah sosial, ekonomi, dan merebaknya aksi kekerasan di wilayah Indonesia. Sebenarnya agama pada lebel nilai dan ajaran tidak pernah mengajak penganutnya untuk berbuat kekerasan dan kerusakan di bumi ini. Agama datang sebagai jawaban atas problematika zaman. Misi agama untuk membebaskan umat dari ketertindasan dan ketidakadilan menuju perdamaian, keadilan dan kesejahteraan bagi umat manusia.

Namun pada kenyataannya, masalahnya bukan terletak pada ajaran agama tetapi pada pemahaman umat terhadap ajaran agamanya. Melalui penegasan ini kita dapat membuktikan bahwa konflik itu disebabkan karena adanya kepentingan individu atau kelompok yang disulut dengan dalih agama. Hal ini terlihat di daerah penelitian yaitu Pekalongan, ketika manusia dengan berbagai kepentingan terutama kepentingan ekonomi, politik mengangkat pada titik puncak yang mendorong mereka untuk melakukan manuver politik dengan mengerahkan massa sebagai penyangganya.

Penelitian tentang kerusakan yang mengambil studi kasus di Pekalongan periode 1995 - 1999 ini menunjukkan bahwa berbagai masalah sosial yang berpotensi konflik ini umumnya terkait dengan penyimpangan terhadap norma sosial dan etika moral agama yang dijunjung tinggi di masyarakat. Masalah ketegangan hubungan antara warga pribumi dan warga non pribumi khususnya Cina merupakan masalah sosial di masyarakat yang diakibatkan oleh bentuk hubungan yang tidak harmonis antar kelompok sosial dalam masyarakat yang didasarkan pada kepentingan ekonomi dan agama.

Hal ini tampak dari akibat yang ditimbulkan adanya kerusuhan selama periode 1995 - 1999.

Kebencian terhadap non pribumi khususnya Cina ini sudah nampak pada saat terjadi kerusuhan tahun 1995 yang dipicu oleh adanya penyobekan Al-Qur'an oleh seorang warga non pribumi. Selain itu juga keterlibatan dalam sengketa tanah di Jalan Pemuda yang menyebabkan Saleh Dahlan (Ho Thiong Pe) sebagai salah satu orang Cina yang dijadikan sasaran kekerasan oleh massa.

Dalam tahun-tahun berikutnya konflik menjadi semakin tajam karena adanya pergeseran dalam sistem negara yang ada pada saat itu, maka masalah keputusan yang bersifat politis seringkali menyebabkan adanya disintegrasi dan menimbulkan *social unrest* dalam masyarakat. Hal itu disebabkan oleh adanya kondisi saat itu dominasi kekuasaan negara sangat kuat dengan birokrasi yang selalu berpihak pada suatu aspirasi tertentu, sedangkan di wilayah Pekalongan keputusan seorang kiai sangat mempengaruhi keputusan masyarakat pada umumnya, sehingga dalam menyampaikan aspirasi yang menyangkut masalah politik, umat selalu mengikuti fatwanya. Pada waktu terjadi kerusuhan Pekalongan tahun 1995 - 1999 ada dua kiai yang sangat besar pengaruhnya yaitu Kiai Tohir dan Kiai Munawir (sekarang sudah almarhum). Kedua kiai itu dianggap sebagai masyarakat Pekalongan sebagai "Pakunya Pekalongan".

Konflik yang menimbulkan kerusuhan ini menjadi semakin tajam dalam masyarakat di wilayah Pekalongan, karena penerimaan kepemimpinan oleh masyarakat sangat dipengaruhi oleh keluhuran budi dalam pengetahuan dan kepatuhan menjalankan perintah agama, sehingga dapat dipastikan bahwa pendekatan yang seharusnya dilakukan dalam masyarakat adalah pendekatan yang terkait dengan nilai yang berhubungan dengan masalah moral. Ironisnya pada waktu itu sudah menjadi citra dalam masyarakat Pekalongan, bahwa moralitas birokrasi tidak *legitimate*. Isu kolusi, korupsi, dan tergesernya sumber ekonomi kaum pribumi dari pendatang menjadi citra yang semakin buruk dari birokrasi pemerintah. Keresahan masyarakat Pekalongan menjadi semakin meluas karena perbedaan aspirasi politik sebagai masyarakat dengan aparat birokrasi pemerintah. Perbedaan aspirasi politik ini

mengakibatkan kebencian masyarakat terhadap aparat birokrasi menjadi semakin besar, dengan tampilnya beberapa kiai berpengaruh yang kritis dan tanggap terhadap keresahan masyarakat karena selalu mengkritisi perilaku pejabat pusat dan daerah yang juga merupakan pimpinan OPP tertentu yang sejak lama sebelum masa kampanye telah mengadakan kampanye di mana-mana.

Masyarakat Pekalongan yang terkenal temperamental, maka ucapan kiai yang terlontar dianggap tidak simpatik oleh para pejabat yang tidak suka, sedang bagi warga Pekalongan pendukung partai tertentu dengan mendengarkan cara berdakwah dan sikap kritis dari kiai tersebut justru diterima masyarakat sebagai kenyataan yang harus diungkapkan. Akibatnya warga yang mendukung satu OPP tersebut semakin berani. Bahkan perilaku aparat keamanan dalam menertibkan para peserta kampanye terlihat ada diskriminasi. Aparat keamanan banyak melakukan penangkapan terhadap massa di wilayah Buaran. Perlakuan aparat keamanan kurang simpatik dalam menjalankan tugasnya. Hal inilah yang menimbulkan banyak kalangan masyarakat menduga bahwa munculnya kerusuhan justru dipicu dan dilakukan oleh aparat keamanan. Oleh karena itu, peristiwa yang terjadi selama kurun waktu tertentu 1995 - 1999, kerugian materi yang ditimbulkan akibat konflik antara pendukung OPP tertentu ini sangat besar.

REKOMENDASI

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim tentang Kerusuhan di Pekalongan Periode 1995 - 1999, maka direkomendasikan sebagai berikut :

Dengan memperhatikan berbagai materi kajian yang berkaitan dengan munculnya kerusuhan di Pekalongan 1995 - 1999, maka diperlukan suatu konsep dialog. Diharapkan dalam dialog itu, dihadirkan seluruh komponen masyarakat duduk dalam satu meja untuk membicarakan berbagai persoalan yang muncul. Dengan duduk dalam satu meja itu mereka akan memahami posisi masing-masing dan pada akhirnya seluruh komponen masyarakat itu tidak saling curiga mencurigai. Kesepakatan-kesepakatan yang sudah saling disetujui diantara para pemuka masyarakat itu hendaknya

dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan dambaan masyarakat Pekalongan agar tercipta suasana damai.

Selanjutnya sebagai salah satu fenomena kontemporer yaitu menghidupkan kembali budaya dialog antar umat beragama, sebab dialog selama ini masih terkesan verbalistik, dialog yang hanya terjadi pada level atas yang mengabaikan pandangan keagamaan arus bawah, sehingga dialog kurang menyentuh hati nurani umat secara keseluruhan. Untuk itu konsep dialog diharapkan secara terbuka dengan semangat kekeluargaan yang mengarah pada keselarasan hidup yang harmonis. Dialog diarahkan pada problematika zaman, kemudian kita cari titik persamaan agar kita bersatu dan pada titik perbedaan kita harus saling hormat menghormati, karena perbedaan diantara kita sesungguhnya hanya dalam bentuk simbol, bahasa, tetapi tidak dalam substansi makna dan tujuan akhir.

Oleh karena itu dalam menyelesaikan masalah konflik kita perlu ada rasa sepenanggungan atau *emosional solidarity* dengan lebih memperhatikan hati nurani. *Neotribalism* atau bentuk primitif dalam pengelolaan negara atau bangsa yang mementingkan sentimen primordial harus dihindarkan. Dengan demikian pluralisme akan terbina dan menjadi sebuah kekuatan yang potensial, bukan semata-mata sumber konflik.

Selain itu diperlukan aktualisasi faham kebangsaan yang diwujudkan oleh anggota masyarakat, keluarga, organisasi dan lembaga-lembaga negara, bahkan diperlukan juga penegakan keadilan sosial. Keadilan sosial dimaksudkan bukan hanya sebagai pembagian hasil atau sumber daya yang merata, tetapi lebih-lebih pada pembagian yang egaliter mengenai wewenang atas distribusi sumber-sumber daya. Ikhtiar seperti inilah yang akan berperan dalam menghalangi terjadinya akumulasi kekecewaan publik dan penimbunan dendam massa yang suatu waktu akan termanifestasi dalam bentuk kekerasan dan kerusuhan.

Selanjutnya dalam dialog berkaitan dengan politik, diharapkan semua pihak dan partai politik yang tengah berkompetisi harus menyadari bahwa kekuasaan yang dibangun dengan cara kekerasan akan melahirkan kekerasan dan kerusuhan. Oleh karena itu proses dan prosedur harus dijalani secara demokratis, jujur, adil, sportif dan beradab. Dengan demikian, moralitas

politik, *law enforcement*, kearifan, kebersamaan, peradaban, serta komitmen pada konstitusi dan demokrasi sangat signifikan dalam kekuasaan tanpa kekerasan.

1938
1939

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B.R.O.G.
1967 *Pemuda Revolution: Indonesian Politics 1945 - 1946*. Ithaca: Cornell University Press.
- Collin, R.
1975 *Conflict of Sociology*, New York : The Free Press
- Colombia, Freek and Lindbald, J. Thomas (eds)
2002 *Roots of Violence in Indonesia: Contemporary Violence in Historical Perspective*. Leiden: KITLV Press.
- Crawford and Ronnie D. Lipschultz
1998 *Culture and Politics in Indonesia*. Berkeley : International and Area Studies, University of California & Berkeley
- Dahrendorf, Rolf
1959 *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford : Stanford University Press.
- Dahrendorf, Rolf
1986 *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri Sebuah Analisa Kritik*. Jakarta: Rajawali.
- Eep Saefulloh, dkk.
1997 *Evaluasi Pemilu Orde Baru Mengapa 1996 - 1997 Terjadi Pelbagai Kerusuhan*. Bandung: Mizan bekerjasama dengan Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI.
- Gramsci, Antonio
1971 *Selection from Prison Notebooks*. New York : International Publisher
- Gurr, Ted Robert
1970 *Why Man Rebels*. Princeton New York: Princeton University Press.
- Hobsbawn
1959 *Primitive Rebels*. Manchester: University of Manchester.

- Hobsbawn,
1971 *Bandits*. Penguin Book
- Kadarisman
1978 *Riwayat Perjuangan, T.K : t.p.*
- Koesnadipradja (Penjunting)
1951 *Peraturan-peraturan, Penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1945*. Djakarta.
- Landsberger
1972 *Rural Protest Movement and Change*. London: McMillan.
- Mas'oeed M. dkk (ed)
2001 *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*. Yogyakarta: P3PK UGM.
- Reid, Anthony
1974 *Indonesian Nationalism Revolution*. Melbourne: Youngmans.
- Sartono Kartodirdjo
1973 *Protest Movement In Rural Java*. London: Oxford University Press.
- S.N. Eisendadt
1986 *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Stock Well, A.J.
1978 *British Policy and Malay Politics During the Malayan Union Experiment, 1942 - 1948*. Kualalumpur
- Suprpto
1959 *Tegal dari Masa ke Masa*. Djakarta: Kementerian PP dan K.
- Thohari, Hajrianto Y
1993 *Patah Tumbuh Hilang Berganti*. (Thesis). Jakarta: Pasca Sarjana UII.
- Surat Kabar Harian**
Harian Kompas, 29 Agustus 1998
Harian Kompas, 16 April 1999

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Abdul Halim
Umur : 73 tahun
Pekerjaan : Mantan Lurah Pringlangu
Alamat : Kompleks Gama Permai, Jl. Tunas II / 16 Pekalongan
2. Nama : Khaeron Jazuli
Umur : 64 tahun
Pekerjaan : Mantan Lurah Buaran
Alamat : Buaran Gang 3 / 279, Pekalongan
3. Nama : Chaerudin Aslam
Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Kepala Arsipda dan PDE, Pekalongan
Alamat : Kompleks Bina Griya, Pekalongan
4. Nama : Amin Tri M., S.H.
Umur : 51 tahun
Pekerjaan : Kepala Satpol PP Kota Pekalongan
Alamat : Pekalongan
5. Nama : Sutomo
Umur : 55 tahun
Pekerjaan : Kepala Kantor Kesbanglinmas Kota Pekalongan
Alamat : Pekalongan
6. Nama : H. Ali Imron Bin Hasbullah
Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Wakil Ketua DPC PPP kabupaten Pekalongan
Alamat : Simbang Kulon Gang 3, Buaran Pekalongan
7. Nama : Sanusi
Umur : 47 tahun
Pekerjaan : Kabag. Operasional Polres Pekalongan
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 19 Pekalongan

8. Nama : Hj. Maslichah
Umur : 56 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Buaran Gang 3 Pekalongan
9. Nama : Bagir Suropto
Umur : 41 tahun
Pekerjaan : Lurah Buaran
Alamat : Buaran Pekalongan
10. Nama : Sulistyono
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Kasat IPP Polres Pekalongan
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 19 Pekalongan
11. Nama : Dimiyar
Umur : 39 tahun
Pekerjaan : Perangkat Kelurahan Buaran
Alamat : Buaran Pekalongan
12. Nama : Hj. Ma'rufah
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Gatot Subroto Pekalongan
13. Nama : Mujiasih
Umur : 32 tahun
Pekerjaan : Perangkat Kelurahan Buaran
Alamat : Pekalongan

Lampiran 1

**Nama Korban Pengrusakan oleh Aparat pada
Kerusuhan di Pekalongan Tanggal 25 - 26 Maret 1997**

No	Nama	Alamat	Jenis Kerusakan	Pelaku	Waktu Kejadian
1	Ny. Noor Hasanah Subchi	Desa Kertijayan Gg. II Buaran Pekalongan	3 rumahnya pada kaca depan kiri dipecah pakai pentung dan batu	ABRI berpakaian doreng-doreng hijau dan polos. Perawakan tinggi besar	Rabu, 26 Maret 1997 jam 17.30 WIB. Sambil menggedor kaca mereka bilang. "Ayo keluar (saat kejadian sudah tak ada massa di jalan)
2	Adam	Desa Kertijayan Buaran Kodya Pekalongan	Kaca rumah pecah	ABRI berseragam doreng	26 Maret 1997
3	Akil Pala	Desa Kertijayan Buaran Kodya Pekalongan	Kaca rumah pecah	ABRI berseragam doreng	26 Maret 1997
4	H. Ahmad Husein	Desa Kertijayan Buaran Kodya Pekalongan	Pintu rumah rusak	ABRI berseragam doreng	26 Maret 1997
5	Ismail Bakri	Desa Kertijayan Buaran Kodya Pekalongan	Kaca rumah pecah, burungnya mati, sepeda motor rusak	ABRI berseragam doreng	26 Maret 1997
6	Syafi'i	Desa Kertijayan Buaran Kodya Pekalongan	Kaca rumah pecah, kompresor rusak	ABRI berseragam doreng	26 Maret 1997

No	Nama	Alamat	Jenis Kerusakan	Pelaku	Waktu Kejadian
7	Mbah Situk	Desa Kertijayan Buaran Kodya Pekalongan	Kaca rumah pecah	ABRI berseragam doreng	26 Maret 1997
8	Alimin (mantan Camat)	Desa Kertijayan Buaran Kodya Pekalongan	Kaca rumah pecah	ABRI berseragam doreng	26 Maret 1997
9	Edy Rahmat	Desa Kertijayan Gg. II Buaran Pekalongan	Kaca depan rusak	ABRI berseragam doreng	26 Maret 1997
10	Ibu Hj. Zaenab	Desa Kertijayan Buaran Kodya Pekalongan	Kaca jendela muka pecah	Oknum berpakaian doreng	26 Maret 1997, Jam 18.45 WIB
11	Ibu Hj. Rufiah H. Nawawi	Jl. Raya Kradenan Pekalongan	Kaca jendela muka pecah	Oknum berpakaian doreng	26 Maret 1997, Jam 18.45 WIB
12	Sakri	Jl. Raya Kradenan Pekalongan	Kaca jendela muka pecah	Oknum berpakaian doreng	26 Maret 1997, Jam 18.45 WIB
13	Agusasi	Jl. Raya Kradenan Pekalongan	Kaca jendela warung rusak	Oknum berpakaian doreng	26 Maret 1997, Jam 18.45 WIB
14	Sikeh	Banyuurip Alit Pekalongan	Kaca jendela muka pecah	Oknum berpakaian doreng	26 Maret 1997, Jam 18.45 WIB
15	Ibu Hj. Salamah	Banyuurip Alit Pekalongan	Kaca pintu muka pecah	Oknum berpakaian doreng	26 Maret 1997, Jam 18.45 WIB

Sumber : - DPC PPP kabupaten Pekalongan
- Mohtar Mas'ood, dkk (ed). *Kekerasan Kolektif, Kondisi dan Pemicu*, 2001, Halaman 261 - 262.

Lampiran 2

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TENGAH
 RESORT PEKALONGAN
 Jl. P. Diponegoro No. 19 Pekalongan

DATA : KASUS AMUK MASSA
 TH. 1997 S/D TH. 1999

No.	KESATUAN	TGL KEJADIAN / TKP / SEBAB KEJADIAN	TINDAK PIDANA	KORBAN / KERUGIAN	PELAKU	PASAL YG DILANGGAR	PROSES PENANGANAN	KET 9
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	POLRES PEKALONGAN	6 April 1997 / Tkp. Jl. Raya Buaran Pekalongan / sebab : rasa benci massa thp. Pemerintah (Golkar)	Pengrusakan dan pembakaran 7 unit Spm Kawazaki Ka ze dari Dealernya	Korban jiwa tidak ada, kerugian ± Rp. 50.000.000,00	Massa ± 100 orang / simpatis an parpol tidak jelas identitas - nya	170 jo 187 KUHP	- Riksa saksi - Sita BB - Penyelidikan	
2	POLRES PEKALONGAN	26 April 1999 / Tkp. Simbang Wetan, Buaran, Pekalongan / saling mengejek dalam pengajian yg dilaksana kan masing masing simpatisan parpol	Pengrusakan rumah/kekerasan dimuka umum oleh beberapa orang bersama - sama	Korban jiwa tidak ada, kerugian materiil ± Rp. 10.000.000,00 (8 unit rumah rusak berat)	Simpatisan PKB simpatisan PPP ± 200 orang	170 KUHP	- Penyelidikan identitaspelaku - Temukan per - wakan kedua pihak untuk damai agar kejadian tidak meluas	
3	POLRES PEKALONGAN	28 Mei 1999 / Tkp. Ds. Jenggot, Pekalongan Selatan, sebab : permusuhan simpatisan PKB dan PPP saat kampanye	Kekerasan dimuka umum tdp barang oleh beberapa orang bersama - sama / pengrusakan rumah kedua belah pihak	Korban jiwa tidak ada, kerugian materiil ± Rp. 13.000.000,00 (11 rumah kedua pihak rusak)	Massa simpatisan PKB dgn PPP	170 KUHP	sda	

Pekalongan, 11 Juni 2003
 KASATRESKRIM
 ttd
 A R I F I N
 AKP NRP 62030285



Per
Je